

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Program CSR Pendidikan dari PT. Adaro Indonesia

Penyusunan rencana program *corporate social responsibility* (CSR) bidang pendidikan PT. Adaro Indonesia merujuk pada tujuan pelaksanaan CSR yang ditetapkan perusahaan. Program CSR pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan dan mutu pendidikan. Merujuk tujuan tersebut, kegiatan CSR pendidikan meliputi peningkatan mutu pendidikan formal, beasiswa, dan bantuan untuk infrastruktur. Indikator pencapaian tujuan tersebut adalah mutu mengajar lebih baik, hasil Ujian Nasional meningkat, dan infrastruktur bertambah baik. (Adaro, 2009) Dengan demikian, tingkat efektifitas dana CSR untuk pendidikan dapat dilihat dari pencapaian Ujian Nasional, proses belajar mengajar, serta infrastruktur sekolah.

Perencanaan program CSR pendidikan yang merupakan salah satu bidang program CSR PT. Adaro Indonesia diawali dengan penetapan alokasi total dana untuk program CSR berdasarkan kepatutan dan kewajiban. Alokasi tersebut diusulkan perusahaan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapat persetujuan. Hal itu berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan dikuatkan dengan keputusan 53/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi

yang menyebutkan bahwa program CSR adalah kewajiban perusahaan sejalan dengan pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Pada tahun 2010, alokasi total program CSR PT. Adaro Indonesia yang disetujui Kementerian ESDM sebesar Rp. 32.625.000.000,- untuk enam kabupaten di Kalimantan Selatan (Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Barito Kuala) dan Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan). Alokasi yang CSR yang telah disetujui tersebut menjadi dasar bagi penyusunan rencana program CSR di tingkat kabupaten yang dibagi secara proporsional berdasarkan perhitungan wilayah terdampak pada kabupaten tersebut.

Proses perencanaan program CSR Adaro PT. Adaro Indonesia sangat terkait dengan pemerintah kabupaten. Program yang akan dilaksanakan harus melalui proses pembahasan dan diputuskan oleh sebuah tim perumus yang dibentuk oleh bupati. Keterlibatan pemerintah kabupaten ini menjadi faktor terjadinya perbedaan dalam hal jenis program dalam bidang pendidikan dan bidang lain di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Pada fase perencanaan, Pemerintah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, melalui tim perumus memegang wewenang yang sangat besar dalam menentukan untuk apa dana CSR yang telah dialokasikan perusahaan. Pada satu sisi, mekanisme tersebut memberikan sebuah peluang bagi perusahaan untuk menjalankan program CSR yang sejalan dengan visi pemerintah kabupaten. Pada sisi lain, pihak perusahaan pun dapat menggunakan argumen itu ketika program CSR tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika tidak menyetujui proposal sekolah/madrasah, PT. Adaro Indonesia dapat beralasan bahwa program telah

disusun oleh pemerintah kabupaten sehingga permohonan ini belum dapat disetujui atau kegiatan tidak termasuk dalam program yang disetujui tim perumus. Secara politis, PT. Adaro Indonesia diuntungkan dengan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan karena dapat menghindari tuntutan masyarakat yang permohonannya tidak disetujui. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan pemahaman bahwa CSR merupakan tanggung jawab perusahaan.

Sebagai awal dalam proses perencanaan ditingkat kabupaten, pihak CSR PT. Adaro menghimpun data usulan/usulan program dari masyarakat serta hasil musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa sampai kabupaten. Berbagai usulan masyarakat tersebut menjadi bahan penyusunan draft program CSR oleh Departemen CSR PT. Adaro Indonesia. Draft program itu dibahas dalam tim perumus kabupaten yang diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten dan beranggota para kepala dinas di Kabupaten Balangan. Demikian juga di Kabupaten Tabalong. Tim Perumus menetapkan persentasi alokasi bidang CSR berdasarkan kebijakan kabupaten. Keputusan rapat tim perumus kemudian dituangkan dalam bentuk SK Bupati yang menjadi dasar seluruh penggunaan dana CSR PT. Adaro Indonesia di kabupaten. Mengenai susunan tim perumus serta pengawas dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.

Kebijakan pemerintah kabupaten dalam pendidikan sangat berpengaruh terhadap bagaimana prioritas program CSR dilaksanakan. Pembentukan tim perumus yang merupakan representasi pemerintah kabupaten, agar program CSR dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam pembangunan daerah dan tidak terjadi *overlapping* kegiatan. Dengan adanya tim perumus, pihak PT. Adaro

Indonesia meyakini bahwa program CSR akan sesuai dengan keinginan pemerintah kabupaten. Meskipun melibatkan pemerintah kabupaten pada level kepala dinas dalam perencanaan, tumpang tindih program tetap saja terjadi karena tim tidak sepenuhnya mengetahui tentang keadaan desa. Hal itu terkait dengan minimnya keterlibatan para camat yang membawahi desa-desa pada fase perencanaan.

Proses perencanaan anggaran program CSR tidak memberikan peluang bagi sekolah/madrasah untuk berpartisipasi secara maksimal. Keterlibatan sekolah/madrasah hampir dikatakan tidak ada pada proses perencanaan program CSR. Sekolah/madrasah hanya memohon bantuan yang bersifat fisik, sementara keputusan berada di tangan tim perumus, yang secara struktural berada di bawah Bupati, tanpa mempertimbangkan keperluan sekolah/madrasah. Oleh karena itulah, banyak pengalaman dari pihak sekolah/madrasah yang ditolak permohonan bantuannya meskipun mereka berada pada daerah prioritas dan sangat membutuhkan dana program CSR untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Di samping itu, pihak sekolah/madrasah juga tidak pernah secara resmi diundang untuk berdiskusi tentang program CSR pendidikan. Demikian juga, penelitian yang secara komprehensif mengenai kebutuhan-kebutuhan sekolah/madrasah tidak pernah dilakukan. Penelitian-penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi masih belum menyentuh tentang kebutuhan-kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan dari sekolah/madrasah, terutama yang terletak di desa ring 1 dan 2. Dengan kata lain, perencanaan program CSR pendidikan tidak melalui proses *need assesment* sebagai dasar

penetapan program yang sesuai dengan kebutuhan riil sekolah/madrasah. Hal itu diakui oleh salah satu pimpinan Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN), dulu LP3AP (Lembaga Pengembangan Potensi Pendidikan Adaro Pama), seorang wanita berusia 30-an tahun. Responden mengatakan bahwa program yang dilaksanakan adalah hasil konsultasi dengan pihak dinas pendidikan. Responden beralasan bahwa proses *need assesment* membutuhkan waktu yang relatif lama, sementara program harus segera dilaksanakan.

Pihak Kemenag kabupaten yang secara struktural membawahi madrasah-madrasah di kabupaten, tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program CSR ini. Pihak Kemenag kabupaten hanya menandatangani proposal sekolah yang akan diusulkan ke PT. Adaro Indonesia. Secara umum, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong tidak mengetahui sepenuhnya tentang bagaimana perencanaan program CSR PT. Adaro Indonesia tersebut dilaksanakan. Keterlibatan mereka hanya dalam menyediakan data-data untuk kegiatan CSR pendidikan, misalnya data untuk penerima beasiswa. Kepala Dinas Pendidikan Balangan mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui dengan detail tentang bagaimana pelaksanaan program CSR PT. Adaro Indonesia dan responden memberikan nomor kontak pimpinan divisi CSR PT. Adaro Indonesia. Demikian juga yang dikatakan Dinas Pendidikan Tabalong. Pihak dinas pendidikan hanya menandatangani proposal sekolah yang akan diusulkan ke PT. Adaro Indonesia. Pada saat rapat tim perumus, keterlibatan dinas pendidikan hanyalah memberikan koreksi, beberapa usul, atau persetujuan atas draft program yang telah dibuat pihak CSR PT. Adaro Indonesia. Usul-usul yang diberikan

hanya terkait dengan draft program tersebut, persoalan-persoalan lain yang mendasar tidak menjadi perhatian.

Anggaran program CSR di tiap kabupaten yang telah ditetapkan berlaku satu tahun dan akan diperbaharui tahun berikutnya berdasarkan keputusan hasil rapat tim perumus. Program-program CSR PT. Adaro Indonesia dilaksanakan sesuai dengan distribusi dan alokasi yang telah ditetapkan dalam SK Bupati sehingga proposal masyarakat yang diajukan pada tahun berjalan tidak akan disetujui pada tahun tersebut. Oleh karena itu, proposal sekolah/madrasah yang tidak disetujui harus dikirim kembali pada tahun selanjutnya sebagai bahan untuk penyusunan draft anggaran dan dibahas dalam rapat tim perumus.

Meskipun tidak merupakan bagian dari program CSR dan tidak termasuk dalam program yang tertuang dalam SK bupati, pihak perusahaan dapat saja memberikan bantuan yang dikeluarkan dari komponen lain, bukan dari anggaran CSR PT. Adaro Indonesia. Misalnya, sebuah perguruan tinggi yang menjadi relasi PT. Adaro Indonesia melaksanakan *fun walk* dan PT. Adaro Indonesia memberikan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa atas pertimbangan tertentu, PT. Adaro Indonesia dapat mengalokasikan dana dari anggaran yang lebih fleksibel. Jika merujuk pada prosedur formal, usulan-usulan sekolah/madrasah memang diberi peluang dan menjadi bahan pertimbangan oleh pihak CSR PT. Adaro Indonesia dalam menyusun draft program anggaran CSR. Akan tetapi, pada praktiknya, tim perumus yang menentukan program, meskipun sekolah/madrasah tersebut berada wilayah prioritas. Minimnya ruang untuk partisipasi sekolah/madrasah dalam perencanaan ini akan mengakibatkan program

CSR tidak tepat sasaran. Seperti program pembangunan perpustakaan SMPN 2 Tanta yang dibatalkan karena sekolah telah memiliki perpustakaan.

Dominasi tim perumus (baca : Bupati) tersebut menjadi faktor penentu dalam penetapan program dan anggaran CSR. Keterlibatan pemerintah membuka peluang kepentingan politik dalam program CSR. Oleh karena itulah, dana CSR pendidikan banyak digunakan untuk membantu TK/TPA daripada sekolah/madrasah yang jelas sebagai lembaga pendidikan. Membantu TK/TPA memberikan citra lebih religius bagi penguasa daripada membantu sekolah/madrasah.

Selain persoalan rendahnya partisipasi sekolah/madrasah, tim perumus dalam memutuskan alokasi dan distribusi tidak berdasarkan pada kriteria yang jelas. Oleh karena itulah, tidak bisa dilacak apa yang mendasari sebuah keputusan Tim Perumus. Program CSR PT. Adaro Indonesia menetapkan bahwa penyaluran dana CSR berdasarkan prioritas lokasi terdampak. Akan tetapi, pada keputusan Tim Perumus tidak sepenuhnya berdasarkan prioritas tersebut. Oleh karena itulah, penerima bisa saja berdasarkan kedekatan kepala sekolah/madrasah dengan tim perumus atau dengan pihak PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 2010 misalnya, program CSR PT. Adaro Indonesia mengalokasikan dana bidang pendidikan Rp. 100.000.000,- untuk pembangunan tempat pengajian Alquran di Kantor Polres Balangan. Dasar penyaluran tersebut tentu saja memunculkan tanda tanya besar Dilain pihak, banyak sekolah-sekolah yang berada di ring 1 dan 2 yang justru tidak mendapat distribusi dan alokasi dana

CSR PT. Adaro Indonesia. Jika merujuk pada prioritas yang ditetapkan PT. Adaro Indonesia, banyak keputusan Tim Perumus yang dapat dikritik.

Tidak adanya, standar pada keputusan tim perumus mendorong keputusan berdasarkan “pertemanan” dengan pihak sekolah. Sekolah yang dekat dengan tim perumus akan mendapat bantuan dari program CSR PT. Adaro Indonesia, sebaliknya sekolah/madrasah yang tidak memiliki hubungan dan bersikap kritis dengan anggota tim perumus/PT. Adaro Indonesia cenderung tidak menerima bantuan meskipun rajin mengirim proposal. Keputusan tim perumus juga dapat didasari berdasarkan tren politik anggaran. Penetapan persentasi yang lebih daripada 20% untuk CSR pendidikan didasari oleh tren yang berkembang meskipun pada kenyataannya itu termasuk untuk TKA/TPA, tempat pengajian, dan bimbingan belajar Primagama.

Hal itu tidak sejalan dengan prioritas penyaluran program CSR ditetapkan oleh PT. Adaro Indonesia berdasarkan dampak operasional tambang batu bara. Dalam publikasi Laporan 2009 yang dirilis PT. Adaro Indonesia menegaskan bahwa pertimbangan utama yang dijadikan dasar distribusi dan alokasi program CSR adalah lokasi daerah. Dengan kata lain, wilayah yang terkena dampak tambang akan menjadi prioritas program CSR. Prioritas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut

- 1) Prioritas 1 adalah desa-desa/masyarakat yang bersentuhan atau akan bersentuhan dengan operasional dan atau dampak operasional (Ring 1)
- 2) Prioritas 2 adalah desa-desa/masyarakat yang rentan dengan berbagai kebutuhan berkaitan dengan operasional. (Ring 2)

- 3) Prioritas 3 adalah desa-desa/masyarakat yang berada dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan dan memiliki kepentingan. (Adaro Indonesia, 2009 : 21)

Desa yang paling dekat dengan wilayah tambang (*mining site* dan *hauling road*) disebut sebagai desa terdampak berjumlah 25 desa. Dari 25 desa, 18 desa berada pada ring 1 dan 7 desa pada ring 2. Di Kabupaten Tabalong terdapat 15 desa terdampak, 8 desa di Kabupaten Balangan, 1 desa di Hulu Sungai Utara, dan 2 desa terdampak di Barito Selatan Kalimantan Tengah. Daftar desa terdampak tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6. Dengan kata lain, program CSR PT. Adaro Indonesia diprioritaskan untuk mereka yang tinggal pada wilayah tersebut, termasuk CSR bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada pada ring 1 tersebut sangat merasakan dampak operasional tambang sehingga logis jika mereka menjadi prioritas.

SDN Dahai Kabupaten Balangan dan SDN Padang Panjang adalah dua sekolah yang berada di desa Ring 1 serta merasakan dampak operasional tambang. Dampak fisik yang dirasakan sekolah yang masih bisa di lihat sampai sekarang (Maret 2011) adalah retakan pada dinding ruang kelas akibat *belasting* yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut juga terlihat pada di salah satu kelas SDN Dahai dan ruang guru SDN Padang Panjang. Retakan tersebut juga disebabkan oleh getaran pada saat *belasting* dilakukan perusahaan tahun 2008. Jika merujuk prioritas tersebut, sekolah itu merupakan prioritas utama program CSR.

Pada bidang pendidikan, penetapan prioritas berbasis pada lokasi sekolah tersebut memunculkan permasalahan. Jika sekolah yang berada di wilayah Ring 1

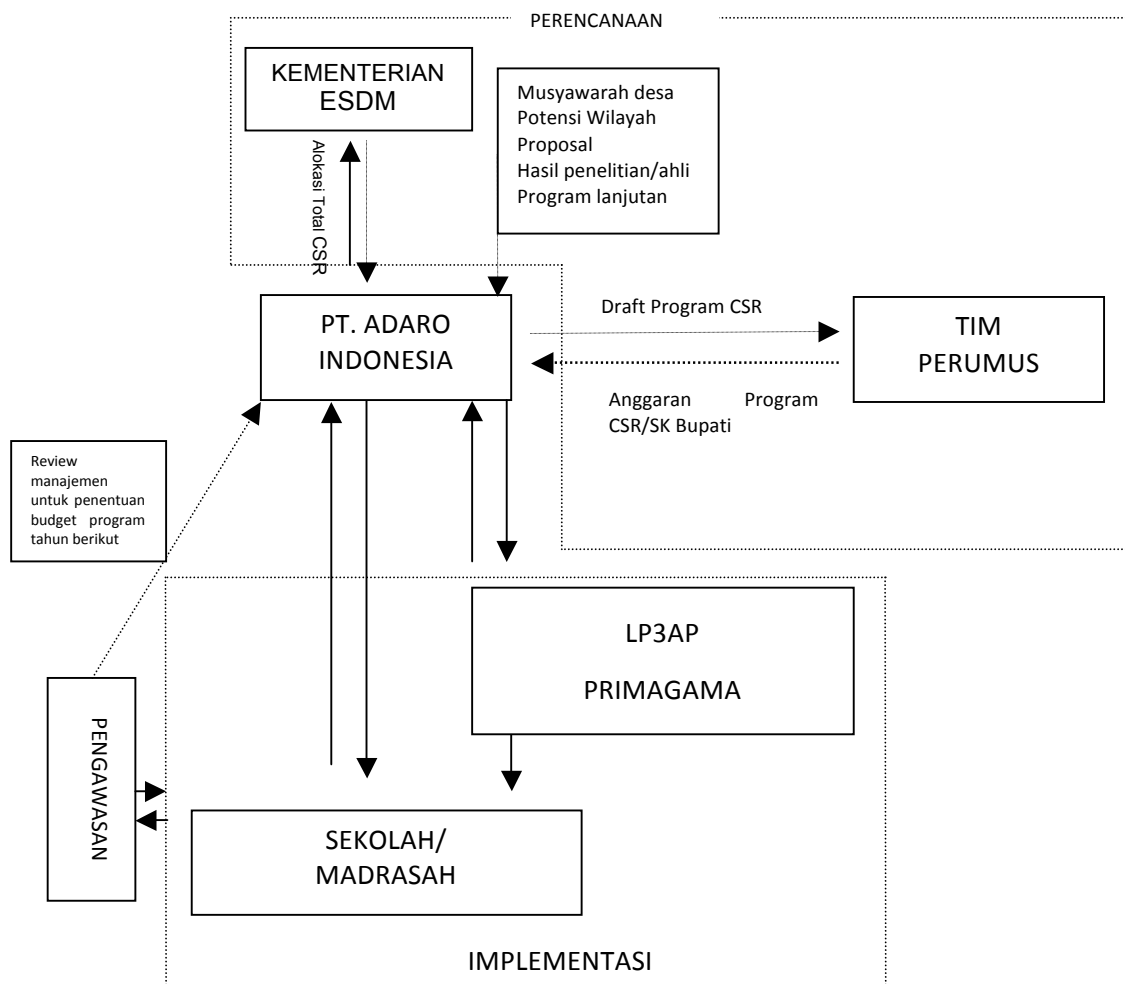
dan Ring 2 lebih diprioritaskan, sekolah yang tidak berada pada ring 1 atau 2 tidak akan menjadi prioritas program CSR dan tidak mendapat alokasi dana CSR. Akan tetapi, di sisi lain, penduduk (baca : anak usia sekolah) desa terdampak operasional tambang tersebut tetapi kemudian memilih sekolah di sekolah/madrasah yang tidak berada di wilayah ring 1 atau 2 atau sekolah/madrasah yang tidak mendapat distribusi dana CSR tidak akan merasakan program CSR.

Siswa dari Sungai Ketapi (Ring 1) tidak akan terlibat dalam program CSR karena mereka melanjutkan pendidikan di MTsN Layap atau MAN 1 Paringin. Demikian juga misalnya penduduk desa Warukin Tabalong. Mereka tidak akan tersentuh program CSR, langsung atau tidak langsung, karena memilih menempuh pendidikan di MAN 1 atau SMAN 2 Tanjung. Itu berbeda dengan kawan-kawan mereka yang bersekolah di SMAN 1 Tanta yang merupakan sekolah model (percontohan) PT. Adaro Indonesia. Dengan kata lain, prioritas CSR PT. Adaro Indonesia lebih cenderung kepada lokasi sekolah bukan berbasis lokasi siswa tempat tinggal siswa. Sekolah yang berada tidak pada ring 1 atau 2 tidak akan menjadi prioritas meskipun di sekolah/madrasah tersebut banyak penduduk desa ring 1 dan 2 yang menempuh pendidikan.

2. Mekanisme dan Proses Penyaluran Dana CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia

Mekanisme dan proses penyaluran dana program CSR pendidikan PT Adaro Indonesia dapat dilihat pada skema berikut

GAMBAR 4.1
MEKANISME PENGELOLAAN CSR PENDIDIKAN
PT. ADARO INDONESIA



Sumber : Diolah dari dokumentasi PT. Adaro Indonesia dan wawancara (2011)

Pada skema 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mekanisme dan proses penyaluran bantuan dana pendidikan melalui program CSR diawali perencanaan program yang melibatkan pemerintah kabupaten melalui tim perumus kabupaten. Pihak CSR PT. Adaro Indonesia menyusun draft program CSR berdasarkan usulan masyarakat, hasil musyawarah perencanaan pengembangan, penelitian/pendapat ahli dan sumber lain. Draft itulah yang dibahas tim perumus dan diputuskan sebagai anggaran program CSR melalui SK Bupati.

Penyaluran CSR ke sekolah dilakukan setelah SK Bupati diterbitkan. Sekolah/madrasah yang proposal bantuannya disetujui, mengambil dana tersebut ke Divisi Keuangan PT. Adaro Indonesia serta menandatangani tanda terima. Uang yang diterima tersebut kemudian digunakan oleh sekolah/madrasah sesuai dengan proposal dan dipertanggungjawabkan. Mengenai penggunaan dana tersebut akan dibahas pada bagian tersendiri.

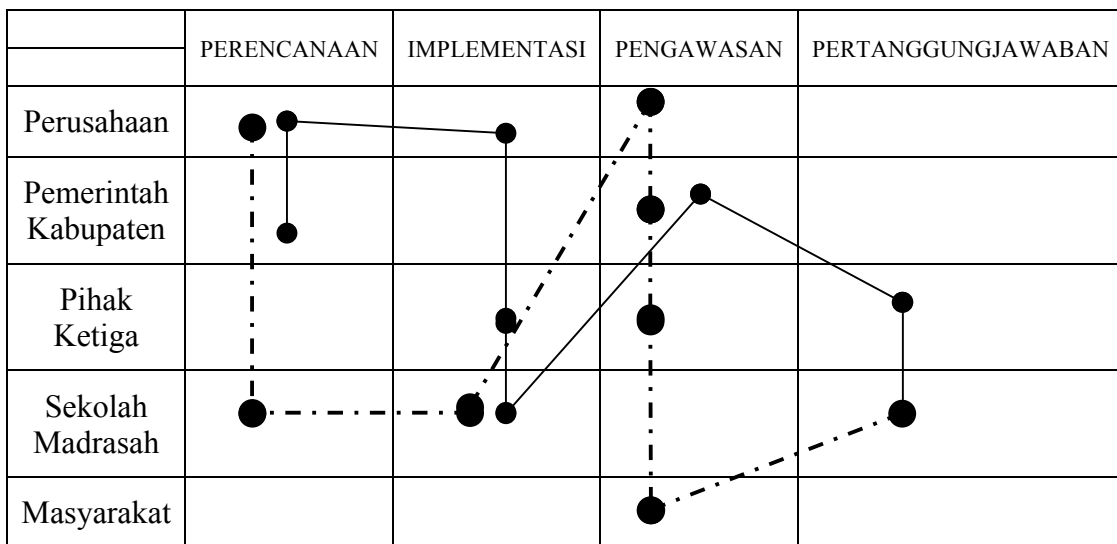
Program yang bersifat bangunan fisik dilaksanakan oleh pihak CSR PT. Adaro Indonesia. Misalnya, pembangunan perpustakaan SMAN 1 Tanta. Pihak CSR PT. Adaro Indonesia membangun perpustakaan sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan menunjuk kontraktor yang bertanggungjawab dalam pembangunan tersebut. Pihak sekolah hanya terlibat dalam penandatanganan serah terima bangunan tersebut tanpa terlibat dalam proses pembangunannya

Program CSR lain yang melalui pihak ketiga dilaksanakan LP3AP dan Primagama atau pihak lain. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan program kerja pihak ketiga tersebut. Lembaga tersebut mempertanggungjawabkan

penggunaan dana CSR kepada PT. Adaro Indonesia seperti yang dilakukan sekolah/madrasah.

Bertolak dari gambaran di atas, proses dan mekanisme penyaluran dana CSR serta pihak yang terlibat dapat digambarkan sebagai berikut

GAMBAR 4.2
ALUR PROSES PENYALURAN DANA CSR PENDIDIKAN
PT. ADARO INDONESIA



Garis hitam menunjukkan bahwa perusahaan bersama pemerintah kabupaten menyusun anggaran dan rencana program CSR yang kemudian dilaksanakan oleh perusahaan, pihak ketiga, atau sekolah/madrasah. Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan perusahaan. Pada fase pertanggungjawaban, pihak ketiga atau sekolah/madrasah yang melaksanakan program CSR bertanggungjawab untuk melaporkan kegiatan program CSR ke perusahaan. Pada gambar tersebut terlihat masih rendahnya peluang bagi partisipasi sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah hanya terlibat dalam penggunaan

dan pertanggungjawaban bantuan dana yang diterima dengan alokasi yang sangat sedikit. Sementara, sekolah tidak terlibat dalam perencanaan program CSR. Garis hitam putus-putus menggambarkan mekanisme yang lebih berbasis kepada partisipasi sekolah/madrasah dalam program CSR pendidikan.

3. Distribusi dan Alokasi Dana CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia

Bagian ini akan menyajikan hasil penelitian terkait dengan distribusi dan alokasi dana program CSR pendidikan. Distribusi dan alokasi tersebut juga dilihat pada sekolah dan madrasah yang menjadi lokasi penelitian. Bentuk program CSR pendidikan yang didistribusikan dan dialokasikan pada sekolah/madrasah berbentuk dana, pembangunan fisik, serta kegiatan non fisik.

a. Kabupaten Balangan

Program CSR PT. Adaro Indonesia meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Pada tahun 2010, Total dana CSR yang dialokasi untuk Kabupaten Balangan sebesar Rp. 14.762.142.857,- dengan rincian sebagai berikut

TABEL 4.1
ALOKASI DANA CSR PT. ADARO INDONESIA
DI KABUPATEN BALANGAN

NO	PROGRAM	ALOKASI (RP)
1	<i>Economic Development</i>	2.195.000.000,-
2	<i>Education</i>	1.335.000.000,-
3	<i>Health</i>	1.465.000.000,-
4	<i>Social Culture</i>	5.275.000.000,-
5	<i>Operational Cost</i>	285.000.000,-
6	<i>Special Project</i>	4.207.142.857,-

Sumber : SK Bupati Balangan Nomor 188.45/98/Kum Tahun 2010, 26 Maret 2010

Program CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia dan partner di Kabupaten Balangan dialokasikan sebesar Rp. 1.335.000.000,- serta proyek khusus bimbingan belajar untuk persiapan UN untuk siswa kelas IX (MTs/SMP) dan kelas XII (MA/SMA) sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga total alokasi CSR pendidikan Kabupaten Balangan Rp. 4.335.000.000,-. Alokasi untuk pendidikan tersebut 29,36% dari total alokasi CSR PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Balangan yang sebesar Rp. 14.762.142.857,-. Distribusi dan alokasi dana program CSR pendidikan tersebut dapat dilihat pada lampiran 7.

Distribusi dan alokasi CSR PT. Adaro Indonesia sebagian besar tidak langsung diberikan kepada proses pendidikan. Distribusi dan alokasi program CSR tersebut mayoritas diberikan kepada sarana prasarana TK/RA, TKA/TPA, beasiswa pendidikan tinggi, serta pihak ketiga Primagama. Distribusi yang langsung ke sekolah hanya kepada SDN Sungai Ketapi, SMPN 3 Paringin, dan SMPN 4 Halong yang menerima mendapat alokasi program CSR di tahun 2010. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa dana CSR yang didistribusikan ke lembaga non sekolah/madrasah, yaitu TK dan TK/TPA serta Bimbingan Belajar Primagama sebesar Rp. 4.240.000.000,- atau 97, 81% dari total dana CSR pendidikan Rp. 4.335.000.000,- sedangkan dana yang langsung untuk sekolah/madrasah sebesar Rp. 95.000.000,- atau 2, 91% dari total alokasi CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia.

Dilihat dari besarnya alokasi juga terlihat perbedaan. Alokasi dana CSR untuk SDN Sungai Ketapi sebesar Rp. 15.000.000,- lebih sedikit daripada alokasi untuk TK Harapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-. TK ini terletak di daerah

ibukota kabupaten dan tidak terletak di lokasi yang termasuk terkena dampak operasional tambang. Disamping itu, alokasi yang cukup besar Rp. 100.000.000,- didistribusikan kepada Polres Balangan untuk membangun tempat mengajian Alquran. Alokasi tersebut lebih besar daripada alokasi untuk tiga sekolah yang hanya menerima Rp. 95.000.000,-.

Alokasi yang terbesar dan cukup menarik perhatian pada penelitian ini adalah distribusi kepada Bimbingan Belajar Primagama Balangan dengan alokasi sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Alokasi tersebut merupakan 69,20% dari total alokasi dana CSR PT. Adaro Indonesia di tahun 2010. Program Bimbingan Belajar Primagama tersebut dilaksanakan sejak tahun 2009 setelah Kabupaten Balangan memutuskan untuk tidak mengalokasikan dana program CSR untuk LP3AP. Menurut seorang responden, keputusan pelaksanaan bimbingan belajar oleh Primagama merupakan keinginan Bupati Balangan dan Presiden Direktur PT. Adaro Indonesia ketika berkunjung ke Kabupaten Balangan. Menurut informasi lain yang diperoleh dari beberapa sumber, Primagama yang melaksanakan program CSR pendidikan tersebut merupakan milik seorang pengusaha yang kegiatannya berpusat Banjarmasin dan secara operasional dikelola oleh seorang guru SMKN 1 Paringin. Pada tahun 2010, bimbingan belajar dilaksanakan oleh pengajar Primagama dan bertempat di kampus Bimbel Primagama, tanpa keterlibatan pihak sekolah. Bimbingan dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan. Pada tahun 2011, bimbingan melibatkan guru sekolah dan mentor dari Primagama. Bimbingan oleh pengajar Primagama setiap dua minggu sekali, dan

oleh guru masing-masing satu minggu sekali di seluruh madrasah/sekolah di Kabupaten Balangan.

Pada tahun 2010, Primagama menyewa sebuah rumah untuk tempat bimbingan belajar tersebut. Rumah tersebut adalah milik seorang PNS Pemerintah Kabupaten Balangan dan berlokasi tidak jauh dari pasar Paringin. Operasional Primagama di Balangan dikelola oleh seorang guru SMKN 1 Paringin. Pengelola tersebut bertugas menyiapkan teknis Bimbel dan berkoordinasi dengan pihak sekolah/madrasah peserta bimbingan belajar. Mengenai kebijakan Bimbel: penunjukkan mentor, materi bimbingan, dan hal lain, diputuskan oleh Primagama Banjarmasin.

Alokasi untuk bimbingan belajar Primagama mencapai tiga milyar rupiah tersebut digunakan untuk membimbing 2037 orang siswa tingkat MTs/MA dan SMP/SMA. Jika dihitung *unit cost* Bimbel adalah

$\text{Rp. } 3.000.000.000,- / 2037 = \text{Rp. } 1.472.754,-$

Dengan demikian, *unit cost* bimbingan belajar Primagama adalah sebesar Rp. 1.472.754,- per siswa.

Total alokasi CSR untuk Primagama tahun 2010 tersebut hampir sama dengan jumlah dana BOS untuk SD tahun 2011 dan lebih besar daripada dana BOS untuk SMP tahun 2011. Dana BOS Balangan pada tahun 2011 dialokasikan untuk SD sebesar Rp. 5.533.306.000,- (Rp. 397.000/siswa) dan untuk SMP sebesar Rp.1.561.230.000,- (Rp. 572.000,-/siswa). (Banjarmasin Post, 9 Juni 2011) Perbandingan ini menunjukkan bahwa alokasi CSR pendidikan sangat

besar dan cukup untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan di Kabupaten Balangan.

Pelaksanaan program CSR oleh pihak ketiga didasarkan pada pihak ketiga yang menjadi mitra tersebut. Distribusi untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Balangan misalnya, berdasarkan kebijakan pengurus digunakan oleh untuk pengadaan alat dan seragam sekolah (tas, alat tulis dan seragam) yang kemudian dibagikan kepada SD-SD di daerah pedalaman. Demikian juga bantuan dana untuk alat-alat permainan edukatif siswa TK/RA. Alat tersebut didistribusikan sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam hal ini bidang yang menangani PAUD/TK/RA. Ironisnya, dasar penunjukkan TK/RA yang menerima adalah mereka yang rajin ikut kegiatan atau punya hubungan yang baik dengan pihak Dinas Pendidikan.

Selain itu, distribusi program CSR di Kabupaten Balangan tidak berdasarkan prioritas desa terdampak operasional tambang PT. Adaro Indonesia. Semua program CSR pendidikan yang langsung ke sekolah/madrasah didistribusikan ke wilayah desa yang tidak terdampak operasional tambang kecuali distribusi ke TK Pirsus di Desa Lokbatung Paringin yang merupakan desa Ring 2.

Jika mencermati pada sekolah dan madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini, alokasi dan distribusi dana CSR dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.2
ALOKASI PADA LOKASI PENELITIAN DI KABUPATEN BALANGAN

	≤2008	2009	2010
MIN Layap	Beasiswa	-	-
SDN Dahai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tandon air dan sumur bor 2. Pengecatan ruang kelas 	Beasiswa untuk 7 orang siswa sebesar Rp. 400.000,-/siswa	Bantuan tas dan perlengkapan sekolah untuk semua siswa, 134 siswa
MTsN Layap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tes sidik jari untuk mengetahui bakat siswa 2. Pembuatan lapangan basket 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa untuk 7 orang siswa sebesar Rp. 400.000,-/siswa 2. Bimbingan Belajar Primagama untuk 172 orang siswa kelas IX 	Bimbingan Belajar dengan Primagama untuk 157 orang siswa kelas IX
SMPN 3 Paringin	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lima unit komputer PC, satu proyektor, dan laptop senilai Rp. 40.000.000,- 2. Beasiswa untuk 7 orang siswa sebesar Rp. 300.000,- per siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan lapangan sekolah dan jalan dalam bentuk pengurukan dengan tanah dengan alokasi Rp. 50.000.000,- 2. Alquran digital dan buku bacaan dengan alokasi Rp. 10.000.000,- 3. Sarana air bersih dengan alokasi Rp. 3.000.000,-
MAN 1 Paringin	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa untuk 7 orang siswa sebesar Rp. 300.000,-/siswa 2. Bimbingan Belajar dengan Primagama untuk 68 orang siswa kelas XII 	Bimbingan Belajar dengan Primagama untuk 71 orang siswa kelas XII
SMAN 1 Paringin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk perangkat teknologi informasi dan jaringan komputer. 2. Pengecatan bangunan dan pagar sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa untuk 7 orang siswa sebesar Rp. 300.000,-/siswa 2. Bimbingan Belajar Primagama untuk 182 orang siswa kelas XII 	Bimbingan Belajar Primagama untuk 152 orang siswa kelas XII

Di olah dari wawancara dan dokumentasi sekolah (2011)

Pada tabel tersebut terlihat bahwa madrasah yang mendapat distribusi dan alokasi dari Program CSR PT. Adaro Indonesia lebih sedikit daripada sekolah. MIN Layap misalnya, hanya pernah mendapat bantuan beasiswa pada tahun 2006/2007. Madrasah ini merupakan madrasah ibtidaiyah terdekat dengan daerah ring 1 (Sungai Ketapi dan Dahai). Hal itu terkait dengan lokasinya yang jauh dari desa terdampak dan tidak ada siswa yang bersekolah di madrasah ini. Selain itu, MIN Layap merupakan MIN Model di Kabupaten Balangan. “Madrasah memang tidak begitu diperhatikan oleh pemda, tetapi apabila kami mendapat prestasi akan diakui sebagai prestasi pemerintah daerah”, kata seorang guru.

Demikian juga MAN 1 Paringin dan MTsN Layap. Pada tahun 2009, beasiswa untuk tujuh orang siswa MAN 1 Paringin adalah sebanyak Rp. 300.000,- per siswa. Pada MTsN Layap. Siswa yang menerima beasiswa sebesar Rp. 300.000,- untuk tujuh orang siswa. Pada tahun 2009, uang Rp. 300.000,- tersebut diberikan hanya sekali. Beasiswa Rp. 300.000,-/tahun bukanlah jumlah yang besar. Jika dihitung per bulan, seorang siswa hanya menerima Rp. 25.000,- dan dibandingkan dengan biaya transport mereka ke sekolah dengan angkutan pedesaan sebesar Rp. 5.000, PP/hari, jumlah uang beasiswa tersebut relatif tidak memadai.

Dua madrasah, MTsN Layap dan MAN 1 Paringin yang menjadi lokasi penelitian, hanya diikutsertakan dalam program CSR pada pelaksanaan bimbingan belajar (Bimbel) oleh Primagama. Selain disebabkan alasan organisasi vertikal yang bukan bagian dari pemerintah kabupaten, kurangnya distribusi program CSR

ke madrasah juga disebabkan kurangnya inisiatif dalam mengirim proposal bantuan ke PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 2010, siswa kelas IX MTsN Layap yang mengikuti bimbingan belajar berjumlah 157 orang. Jika dinilai dengan “uang” yang dihitung berdasarkan *unit cost* bimbingan belajar (Rp.1.472.754,- per siswa), alokasi yang diterima MTsN Layap untuk Bimbel tersebut sebesar Rp. 231.222.386,-. Sebelumnya, MTsN Layap juga menerima bantuan satu paket pembuatan lapangan basket serta diikutkan tes bakat melalui sidik jari. Dua bantuan ini diterima sebelum tahun 2009 oleh MTsN Layap.

Pada MAN 1 Paringin, sebanyak 71 orang siswa kelas XII yang mengikuti bimbingan belajar yang juga dikelola oleh Primagama. Jika dihitung dengan nilai uang berdasarkan *unit cost* Bimbel, alokasi untuk bimbingan belajar yang diterima madrasah ini sebesar Rp. 104.565.538,-. Bimbingan belajar dilaksanakan sepenuhnya oleh Primagama tanpa melibatkan para guru, baru pada tahun 2011 guru dilibatkan dalam bimbingan belajar tersebut.

Penyerahan beasiswa PT. Adaro Indonesia dilaksanakan secara simbolis pada saat upacara peringatan hari besar nasional atau acara lain yang dihadiri oleh banyak undangan. Pada surat Dinas Pendidikan Balangan, nomor 420/376/Dikdas/Disdik/2009, 28 April 2009 disebutkan bahwa kriteria siswa berhak mendapat beasiswa adalah

- 1) Masyarakat tidak mampu
- 2) Tidak mendapat beasiswa dari lembaga lain
- 3) Diutamakan kelas XII.

Surat tersebut merupakan petunjuk teknis kepada pihak sekolah/madrasah bahwa yang bisa diusulkan mendapat beasiswa adalah masyarakat tidak mampu, tidak menerima beasiswa lain, dan diutamakan kelas XII. Petunjuk pemilihan siswa penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tidak ada memprioritaskan atau mempertimbangkan siswa yang berasal dari desa terdampak. Di sini tampak sekali, ketidakkonsistenan, prioritas PT. Adaro Indonesia dengan praktik di lapangan ketika kebijakan telah berada di pemerintah kabupaten.

Jika berpedoman kepada daerah prioritas CSR, SDN Dahai yang terletak di Ring 1 merupakan sekolah yang berhak untuk diprioritaskan mendapat alokasi program CSR. Sekolah ini terkena dampak getaran belasting perusahaan yang menyebabkan dinding salah satu ruang kelas retak. Pada tahun 2009, mereka pernah memohon untuk melakukan *mining tour* bagi siswa sekolah tetapi tidak disetujui oleh pihak PT. Adaro Indonesia.

Pada tahun 2010, SDN Dahai menerima bantuan tas sekolah serta peralatan sekolah yang kemudian dibagikan kepada seluruh siswa yang berjumlah 134 siswa. Bantuan tas dan peralatan sekolah yang diterima sekolah dasar didistribusikan melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Balangan. Ibu JK, pengurus GNOTA Balangan menyebutkan peralatan sekolah tersebut dibagikan kepada sekolah dasar yang berada di daerah pedalaman. Dengan demikian, kriteria yang dipakai GNOTA tidak berdasarkan lokasi dengan operasional tambang. Disebabkan kriteria itulah, siswa MIN Layap tidak menerima bantuan tas. Pada tahun 2010, alokasi yang didistribusikan untuk

GNOTA yang kemudian disebarkan ke sekolah dasar di Kabupaten Balangan adalah Rp 100.000.000,-.

Bantuan lain yang diterima SDN Dahai tahun sebelumnya adalah bantuan air bersih berupa tandon air dan instalasi air bersih, serta satu unit komputer. Instalasi air bersih tersebut tidak hanya diberikan untuk sekolah tetapi untuk seluruh masyarakat di desa Dahai. Bantuan air bersih tersebut dapat dilihat sepanjang jalan di Desa Dahai dan Sungai Ketapi berupa tong air berwarna orange dan diletakan di depan rumah, pada waktu tertentu mobil tangki air bersih akan mengisi tandon tersebut.

Hal yang menarik dari satu unit komputer ini adalah bagaimana sekolah mengambil bantuan tersebut. Ketika pihak sekolah memohon bantuan satu unit komputer (PC) kepada CSR PT. Adaro Indonesia, mereka disuruh mengambil komputer yang ada di Balai Desa Dahai. Kejadian itu menjadi sumber munculnya pertanyaan dan kecurigaan di kalangan guru apakah bantuan untuk sekolah selama ini diambil oleh desa. Di sisi lain, sekolah juga pernah memohon bantuan proyektor digital akan tetapi ditolak CSR PT. Adaro Indonesia.

Berbeda dengan sekolah/madrasah tersebut, dana yang relatif besar diterima oleh SMPN 3 Paringin. Pada tahun 2010, mereka menerima bantuan pengurukan halaman dan jalan menuju sekolah. Lokasi sekolah di daerah pegunungan membuat kondisi lapangan tidak datar. Dengan pengurukan itu halaman sekolah agar menjadi landai sehingga dapat digunakan sebagai lapangan. Alokasi yang diterima sekolah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-. Lapangan yang

diurug tersebut terletak di tengah-tengah lokasi sekolah. Lapangan diurug dengan tanah saja dan sedikit batu sehingga relatif lebih rata daripada sebelumnya.

SMPN 3 Paringin lebih banyak menerima bantuan dari program CSR PT. Adaro Indonesia daripada sekolah lain. Pada tahun 2010, sekolah mendapatkan bantuan dari program CSR PT Adaro berupa pengerasan jalan ke arah sekolah sekitar 200 meter senilai sekitar Rp. 50.000.000,-, dan Alquran digital 18 buah dan buku bacaan senilai sekitar Rp. 20.000.000,-. Sekolah juga mendapat bantuan sarana air bersih yang bernilai sekitar Rp. 3.000.000,-. Selain itu, pada tahun 2009, sekolah juga menerima bantuan lima unit komputer (PC), satu buah printer, dan satu buah proyektor digital. Pada tahun 2009, tujuh orang siswa menerima beasiswa sebesar Rp. 300.000,- per tahun.

Semua bantuan yang diterima SMPN 3 Paringin tersebut berbentuk barang/fisik (bukan dana segar) sehingga pihak sekolah tidak memiliki catatan yang akurat tentang berapa nilai alokasi bantuan tersebut. Pada saat wawancara, responden menyebutkan tahun bantuan dan alokasi tidak semua merujuk kepada catatan sekolah, karena tidak semua bantuan disebutkan alokasinya terutama yang berbentuk barang/fisik. Alokasi yang banyak diterima oleh sekolah ini terkait dengan inisiatif mereka untuk mengirim permohonan kepada PT. Adaro Indonesia.

Pada tingkat SMA, SMAN 1 Paringin yang terletak di pusat kota menerima bantuan yang cukup besar pada tahun 2008. Alokasi dana yang mereka pada tahun tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- dan digunakan untuk instalasi jaringan komputer sekolah. Pada tahun berikutnya, SMAN 1 Paringin hanya

diikutsertakan dalam bimbingan belajar untuk persiapan UN. Pada tahun 2010, jumlah siswa XII yang mengikuti bimbingan belajar adalah 152 orang siswa. Jika dinilai dengan nilai uang yang dihitung dari unit cost bimbingan belajar, dana CSR yang diterima SMAN 1 Paringin sebesar Rp. 223.858.616,- yang merupakan hasil perkalian Rp. 1.472.754 per siswa dan 153 siswa.

Siswa SMAN 1 Paringin juga menerima beasiswa seperti sekolah lain pada tahun 2009. Beasiswa diterima oleh 7 orang siswa sebesar Rp. 300.000, per orang dan hanya diterima sekali pada tahun 2009. Selain itu, sekolah juga menerima bantuan pengecatan bangunan dan pagar. Kepala sekolah tidak mengetahui berapa alokasi bantuan untuk itu.

Distribusi serta alokasi program CSR di Kabupaten Balangan tidak terfokus pada beberapa sekolah, tetapi menyebar ke seluruh kabupaten sesuai dengan kebijakan tim perumus. Selain itu, sejak tahun 2009 Kabupaten Balangan tidak melibatkan Lembaga Pengembangan Potensi Pendidikan Adaro Pama (LP3AP) dalam program CSR bidang pendidikan tetapi melibatkan Primagama untuk bimbingan belajar persiapan UN yang diikuti oleh seluruh siswa kelas IX dan XII di Kabupaten Balangan.

b. Kabupaten Tabalong

Distribusi dan alokasi program CSR pendidikan pada Kabupaten Tabalong secara kuantitas lebih banyak daripada Kabupaten Balangan. Hal tersebut terkait dengan jumlah desa yang bersentuhan dengan operasional tambang PT. Adaro Indonesia lebih banyak berada di wilayah Kabupaten Tabalong daripada di Kabupaten Balangan. Desa terdampak operasional tambang atau dalam term PT.

Adaro Indonesia “bersentuhan” yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong sebanyak empat belas desa dari duapuluh lima desa sedangkan desa yang berada di wilayah Balangan sebanyak delapan desa.

Alokasi dana CSR PT. Adaro Indonesia dan partner di Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 15.828.665.714.-. Dana tersebut dibagi lagi untuk bidang-bidang CSR lain yang dirincikan pada tabel berikut

TABEL 4.3
ALOKASI DANA CSR PT. ADARO INDONESIA
DI KABUPATEN TABALONG

NO	PROGRAM	ALOKASI (RP)
1	<i>Economic Development</i>	3.389.320.000,-
2	<i>Education</i>	2.402.500.000,-
3	<i>Health</i>	3.980.417.143,-
4	<i>Social Culture</i>	1.975.000.000,-
5	<i>Operational Cost</i>	302.857.143,-
6	<i>Special Project</i>	3.778.571.428,-
		Rp. 15.828.665.714.-.

Sumber : Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/261/2010 , 08 Juni 2010

Program CSR bidang pendidikan sebagaimana tergambar pada tabel di atas dialokasikan dana sebesar Rp. 2.402.500.000,- . Alokasi untuk pendidikan juga pada bidang *special project* melalui LP3AP sebesar Rp. 2.142.857.143,- sehingga total alokasi untuk pendidikan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.545.357.143,- atau 28,71% dari total dana CSR Rp. 15.828.665.714.-.

Alokasi dana CSR untuk pendidikan tersebut kemudian didistribusikan dan dialokasikan lagi dalam berbagai program secara lebih rinci yang dapat dilihat pada Lampiran 8. Distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan di Kabupaten Tabalong dipusatkan pada sekolah model yaitu SDN Laburan, SDN Plus Murung Puduk, SMP Plus Murung Puduk, SMPN 2 Tanta, dan SMAN 1 Tanta. Meskipun demikian, sekolah/madrasah lain juga mendapat distribusi dan alokasi dana CSR tergantung keputusan tim perumus. SMAN 1 Tanjung misalnya, pada tahun 2010 menerima alokasi dana sebesar Rp. 228.571.429 untuk membangun WC. SMAN 1 Tanjung berada di kota Tanjung dan jelas tidak berada di daerah terdampak ring 1 atau 2.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jika di bandingkan dengan Kabupaten Balangan, distribusi dana CSR di Kabupaten Tabalong relatif mempertimbangkan prioritas penerima CSR yang ditetapkan PT. Adaro Indonesia. Sebelas dari tiga puluh lima penerima dana CSR berada pada desa Ring 1 dan 2 atau sekolah yang terdekat dengan wilayah itu. Selain itu, tabel tersebut menunjukkan bahwa distribusi yang langsung ke sekolah/madrasah adalah sembilan belas sekolah/madrasah dan salah satunya adalah madrasah yaitu MTs Ihya Ulumiddin di Desa Bilas Upau. Total dana CSR yang langsung dialokasikan ke sembilan belas sekolah/madrasah itu sebesar Rp. 480.000.001 atau 10,56 % dari total alokasi CSR Pendidikan Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 4.545.357.143,- . Persentasi alokasi yang langsung ke sekolah/madrasah tersebut lebih besar dari pada alokasi di Kabupaten Balangan yang hanya 2,91%.

Alokasi dana CSR pada sekolah/madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini beragam untuk komponen yang berbeda pula. Alokasi yang diterima sekolah/madrasah dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.4
ALOKASI PADA LOKASI PENELITIAN
DI KABUPATEN TABALONG

	≤ 2008	2009	2010
MIN Limau Manis	-	1. Beasiswa 3 orang siswa berprestasi Rp. 300.000,- per siswa dan 4 orang siswa tidak mampu Rp. 200.000,- per siswa 2. Bantuan penyelesaian mushala sebesar Rp. 13.000.000,-	-
SDN Laburan	1. Pembuatan pagar sekolah 2. Pembangunan mushala 3. Rehabilitasi ruang kelas	Beasiswa 3 orang siswa berprestasi Rp. 300.000,- per siswa dan 4 orang siswa tidak mampu Rp. 200.000,- per siswa	1. Pembangunan lapangan basket 2. Pembangunan perpustakaan beserta buku-buku 3. Bantuan 1 unit komputer PC 4. Instalasi Listrik 5. Peningkatan gizi siswa
MTs Ar Raudlah	Satu unit komputer PC dan printer	-	-
SMPN 2 Tanta	1. Komputer (PC) dua unit 2. Printer Canon IP 1880 dua unit 3. Meja komputer	1. Komputer (PC) enam unit 2. Laptop Axio satu unit 3. Proyektor satu unit 4. Printer Canon IP 1880 dua unit 5. Tempat sampah sepuluh buah	1. Sumur bor dan fasilitas air bersih dengan alokasi Rp. 18.000.000,- 2. Laptop dua unit dengan alokasi Rp. 10.000.000,-

MAN 1 Tanjung	-	Beasiswa untuk kelas XI dan XII (4 orang) Rp. 450.000,/siswa dan untuk kelas X (3 orang) Rp. 400.000,-/siswa	-
SMAN 1 Tanta	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa untuk kelas XI dan XII Rp. 450.000,/siswa dan untuk kelas X Rp. 400.000,-/siswa 2. Dua unit laptop dan proyektor, printer serta UPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan perpustakaan dan buku-buku senilai Rp. 150.000.000,- 2. Pemasangan instalasi listrik 3. Pengadaan peralatan laboratorium kimia dengan alokasi Rp. 15.000.000,- 4. Rehabilitasi WC dan pembangunan WC 5. Tandon air 6. Dua unit laptop 7. Delapan buah tempat sampah

Sumber : Diolah dari wawancara dan dokumentasi sekolah (2011)

Tabel diatas menunjukkan bahwa madrasah pada semua tingkat lebih sedikit menerima alokasi program CSR PT. Adaro Indonesia. MIN Limau Manis pernah mendapat alokasi dana Rp. 13.000.000,- untuk memperbaiki mushala madrasah pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, tujuh siswa MIN Limau Manis mendapat beasiswa dari PT. Adaro Indonesia. Tiga orang siswa menerima beasiswa prestasi sebesar Rp. 300.000 dan empat orang siswa menerima beasiswa siswa kurang mampu sebesar Rp. 200.000,-. Total alokasi beasiswa tahun 2009 yang diterima MIN Limau Manis adalah Rp. 1.700.000,-. Beasiswa tersebut hanya diterima sekali di tahun 2009.

Alokasi tersebut sangat kontras dengan alokasi pada SDN Laburan. Pada tahun 2010, SDN Laburan mendapat bantuan fisik dari program CSR PT. Adaro Indonesia berupa pembuatan lapangan basket mini, pembangunan perpustakaan beserta buku-buku, bantuan satu unit komputer PC, serta instalasi listrik. Bantuan tersebut diterima sekolah dalam bentuk fisik. Bantuan lain adalah berupa beasiswa untuk tujuh orang siswa serta peningkatan gizi siswa. Beasiswa yang diterima oleh tujuh siswa SDN terdiri dari tiga orang siswa menerima beasiswa prestasi sebesar Rp. 300.000,- per siswa dan empat orang untuk siswa kurang mampu sebesar Rp. 200.000,- per siswa. Beasiswa tersebut diterima sekali pada tahun 2009. Pihak sekolah tidak terlibat dalam pembangunan dan hanya menerima bangunan yang sudah selesai dibangun. Guru terlibat secara pribadi berhubungan dengan usaha yang digelutinya sebagai pembuat batu bata dan membantu mencari buruh bangunan untuk kontraktor pelaksana.

Pada tahun 2010, SDN Laburan mendapat distribusi program CSR berupa peningkatan gizi siswa. Para siswa mendapat bantuan makanan bergizi berupa susu dan biskuit seminggu sekali. Mereka juga mendapat vitamin yang harus diminum siswa di rumah. Setiap satu bulan sekali, para siswa harus menyerahkan botol vitamin tersebut sebagai syarat mengambil vitamin untuk bulan berikutnya. Perkembangan berat badan siswa diperiksa setiap bulannya dan dicatat pada kartu perkembangan kesehatan siswa yang disimpan pihak sekolah.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, SMPN 2 Tanta menerima bantuan sumur bor dan fasilitas air bersih senilai Rp. 18.000.000,- dan dua unit laptop dengan alokasi Rp. 10.000.000,-. Pada awal 2011, sumur bor

sudah tidak berfungsi lagi karena tidak adanya air tanah di wilayah tersebut. Peneliti menduga itu disebabkan dampak dari tambang batu bara yang telah merusak daerah resapan air di daerah pegunungan.

Pada tahun 2009, sekolah ini menerima bantuan berupa komputer (PC) sebanyak enam unit, laptop Axio dan proyektor satu unit, printer Canon IP 1880 dua unit dan tempat sampah sepuluh buah. Pada tahun sebelum, bantuan yang sekolah terima adalah komputer (PC) dua unit dan printer Canon IP 1880 dua unit serta meja komputer.

SMPN 2 Tanta sebagai salah satu sekolah model pernah pula akan dibantu pembangunan perpustakaan. Rencana pembangunan itu dibatalkan karena SMPN 2 Tanta telah memiliki perpustakaan. Pihak sekolah mengusulkan untuk diganti dengan pembangunan laboratorium tetapi disetujui. Preseden tersebut mengkonfirmasi bahwa program CSR pendidikan dapat tidak tepat sasaran karena ketidaktahuan tim perumus tentang kebutuhan sekolah/madrasah.

Jika melihat tabel tersebut di atas, SMAN 1 Tanta merupakan sekolah yang paling banyak menerima alokasi dana CSR pada tahun 2010. SMAN 1 Tanta menerima bantuan berupa pembangunan perpustakaan dan buku-buku senilai Rp. 150.000.000,- , pemasangan instalasi listrik, pengadaan peralatan laboratorium senilai Rp. 15.000.000,- dan rehabilitasi serta pembuatan wc, tandon air, dua unit laptop, serta delapan buah tempat sampah. Bantuan tersebut diterima oleh sekolah dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk dana segar sehingga nilai uang hanya berdasarkan ingatan responden.

Pada tahun 2009, SMAN 1 Tanta juga menerima dua unit laptop, satu unit proyektor digital, printer serta UPS. Pada tahun yang sama, beasiswa juga diterima oleh tujuh orang siswa sebesar Rp. 400.000, persiswa kelas X (3 orang) dan Rp. 450.000,- per siswa kelas XI dan XII (4 orang). Menurut wakil kepala sekolah. Pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, merasa lebih mudah jika menerima bantuan CSR yang berbentuk barang. Meskipun demikian, prasarana sekolah tersebut dibeli oleh pihak CSR PT. Adaro Indonesia berdasarkan spesifikasi yang disebutkan dalam proposal sekolah.

Jika dilihat dari alokasi program CSR, SMAN 1 Tanta dan SMPN 2 Tanta berbeda dengan MAN 1 Tanjung dan juga MTs Ar Raudlah. MTs Ar Raudlah merupakan MTs yang terdekat dengan desa terdampak operasional tambang. Hampir 50% siswa MTs Ar Raudlah berasal dari desa Barimbun yang merupakan Desa Ring 1. Dengan rekomendasi Bupati Tabalong, madrasah ini telah mengirim proposal ke CSR PT. Adaro Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Tabalong untuk membangun lokal baru, pada tahun 2010. Akan tetapi, bantuan yang diterima hanya berupa 40 sak semen dari Pertamina Tanjung. Bantuan CSR PT. Adaro Indonesia yang pernah diterima MTs Ar Raudlah adalah sebuah komputer (PC) dan printer pada tahun 2008 dan beasiswa sebelum tahun 2008. Bantuan komputer tersebut berhubungan dengan suami seorang guru yang bekerja di PT. Adaro Indonesia. Hal tergambar dari penuturan Kepala MTs Ar Raudlah

Selain beasiswa serta satu unit komputer, kami tidak pernah mendapat bantuan CSR PT. Adaro Indonesia. Madrasah seperti tidak mendapat perhatian dari perusahaan. Apakah madrasah bukan sekolah? Pada tahun 2010, kami telah mengirim proposal ke CSR Adaro untuk membangun lokal baru. Lokal sekarang yang kami gunakan terlalu kecil. Saya, beberapa orang guru, serta komite madrasah menghadap bupati untuk memohon bantuan. Pada waktu itu, bupati menyarankan agar kami memohon bantuan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Tabalong. Permohonan tersebut sudah direkomendasi oleh Bupati. Sampai sekarang, hanya Pertamina Tanjung yang membantu berupa 40 sak semen.

MTs Ar Raudlah dapat dikatakan merupakan madrasah yang cukup agresif berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada tahun 2009, mereka mengirim surat ke CSR PT. Adaro Indonesia untuk mengikutsertakan MTs ini dalam berbagai workshop guru yang dilaksanakan oleh LP3AP. Guru dan kepala madrasah beberapa kali mengikuti workshop/pelatihan peningkatan kualitas pembelajaran tetapi setelah itu tidak lagi dilibatkan.

MAN 1 Tanjung yang terletak di kota Tanjung merupakan madrasah aliyah negeri yang terdekat dengan wilayah tambang PT. Adaro Indonesia. Madrasah ini tidak pernah mendapat alokasi program CSR PT. Adaro Indonesia. Distribusi program CSR PT. Adaro Indonesia tidak pernah dialokasikan untuk MAN 1 Tanjung. Pihak madrasah telah mengirim proposal kepada CSR PT. Adaro Indonesia untuk pengembangan madrasah tetapi tidak disetujui pihak perusahaan. Program CSR yang didistribusikan ke madrasah ini hanya beasiswa kepada siswa. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang menjadi lokasi penelitian ini, distribusi dan alokasi untuk madrasah masih sangat kecil. Meskipun madrasah telah mengirim proposal berkali-kali, permohonan tersebut sangat sulit untuk disetujui oleh tim perumus dan PT. Adaro Indonesia.

Pada tabel tersebut terlihat bantuan untuk sekolah lain relatif lebih banyak, tidak termasuk pelatihan untuk guru. Hal itu berhubungan dengan status sekolah tersebut sebagai sekolah model. SDN Laburan, SMPN 2 Tanta, dan SMAN 1 Tanta merupakan tiga dari lima sekolah model yang di kembangkan PT. Adaro Indonesia melalui *School Improvement Program LP3AP*.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa distribusi dan alokasi program CSR lebih cenderung untuk pihak ketiga. Distribusi dan alokasi yang langsung untuk sekolah/madrasah sangat sedikit dan tidak mencukupi, serta tidak tepat alokasi sehingga kemungkinan untuk berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sangat kecil

4. Penggunaan Dana CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia

Penggunaan dana CSR pendidikan pada dua kabupaten: Balangan dan Tabalong tidak berbeda. Teknis penggunaan dana yang telah dialokasikan dapat dikelompokkan dalam tiga cara

a. Penggunaan oleh Departemen CSR PT. Adaro Indonesia

Departemen CSR PT. Adaro Indonesia menggunakan dana CSR berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dalam SK Bupati. Departemen CSR menggunakan dana CSR hanya program CSR yang terkait dengan pembangunan fisik. Pembangunan perpustakaan, penyempurnaan lapangan sekolah, dan pembangunan fisik lain dilaksanakan dengan menunjuk kontraktor yang dianggap memenuhi syarat. Departemen CSR PT. Adaro Indonesia juga melaksanakan pengadaan keperluan sekolah jika hal tersebut diperlukan atau pihak sekolah ingin menerima “barang” saja atau tidak ingin membeli sendiri dengan alasan lebih mudah.

Penggunaan dana CSR dalam bidang pendidikan, fisik maupun non fisik tetap merujuk peraturan pengadaan yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, untuk beberapa alasan bisa tidak dilaksanakan bila menyangkut hal spesifik. Seperti bimbingan belajar. Penunjukkan dengan alasan pihak ketiga tersebut ada di kabupaten bersangkutan dan tidak ada lagi lembaga yang kredibel. Dengan kata lain, penggunaan dana CSR, untuk alokasi tertentu, harus melalui proses lelang. Akan tetapi, untuk kasus khusus, PT. Adaro Indonesia bisa saja untuk melakukan penunjukkan langsung. Penunjukkan langsung inilah yang dominan dilakukan dalam pembangunan fisik atau proyek non fisik. Hampir semua proyek

pembangunan fisik oleh program CSR dilakukan tidak melalui proses lelang. Pihak sekolah serta beberapa responden yang sering terlibat dalam lelang (tender) menyebutkan bahwa tidak pernah mengetahui ada lelang (tender) dalam pembangunan sarana sekolah oleh program CSR PT. Adaro Indonesia.

Menurut seorang guru di sebuah sekolah model, pada saat proses pembangunan fisik berlangsung papan informasi proyek tidak terlihat terpasang di depan bangunan. Lazimnya pembangunan fisik di sekolah/madrasah yang menggunakan dana APBN/APBD, papan informasi tersebut paling tidak memberikan informasi kepada publik tentang siapa kontraktor proyek, alokasi dana, nama proyek, serta jangka waktu pembangunan. Informasi tersebut penting sebagai bentuk transparansi penggunaan dana CSR pendidikan. Hal itu juga berhubungan dengan pengawasan publik terhadap program CSR pendidikan. Tanpa adanya papan informasi tersebut, publik seolah dihalangi untuk mengetahui dan mengawasi program CSR pendidikan.

Pada saat program CSR dilaksanakan berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dalam SK Bupati tersebut di atas, pihak pemerintah kabupaten tidak lagi terlibat. Pejabat Dinas Pendidikan dan Kemenag kabupaten tersebut mengatakan dua hal, *pertama*, dalam hal penggunaan pihak dinas tidak terlibat, terutama menyangkut dana. *Kedua*, pihak Dinas Pendidikan dilibatkan dalam hal program terkait sekolah atau siswa yang berada dibawah wewenang Dinas Pendidikan. Sementara, Kemenag kabupaten hanya terlibat sebagai pejabat yang mengetahui pada proposal bantuan yang dibuat oleh madrasah.

b. Penggunaan oleh Pihak Ketiga

Penggunaan alokasi dana CSR pendidikan juga melibatkan pihak ketiga. Pada tahun 2010, di Kabupaten Tabalong melibatkan Lembaga Pengembangan Potensi Pendidikan Adaro Pama (LP3AP) yang kemudian melebur dalam Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) di tahun 2011. PT. Adaro Energy Tbk. yang merupakan induk PT. Adaro Indonesia (AI) dan perusahaan lain, membentuk sebuah yayasan bernama Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN). Efektif sejak awal 2011, yayasan ini melaksanakan semua program CSR PT. Adaro Indonesia yang berbentuk non fisik di Kabupaten Tabalong yang sebelumnya dilaksanakan oleh LP3AP.

Pada tahun 2010, program CSR pendidikan di Kabupaten Balangan berada dibawah tanggung jawab LP3AP. Kegiatan LP3AP (sekarang YABN) yang terus menerus dilaksanakan adalah berbentuk workshop untuk peningkatan kualitas guru-guru pada sekolah yang menjadi binaan mereka: yaitu SDN Laburan, SD Plus Murung Pudak, SMPN 2 Tanta, SMP Plus Murung Pudak, dan SMAN 1 Tanta. Sekolah-sekolah tersebut mendapat alokasi CSR yang lebih banyak daripada sekolah lain di Tabalong. Selain itu, guru-guru juga mendapat kesempatan mendapat beasiswa dari program CSR.

Kegiatan workshop tersebut dilaksanakan sejak 2009, meliputi bidang

- 1) Pelatihan dan workshop bagi semua tenaga pengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan proses belajar mengajar.
- 2) Penyusunan standar mutu pendidikan yang melibatkan guru, kepala sekolah, siswa dan kultur sekolah.

- 3) Melengkapi sekolah dengan Sistem Informasi Manajemen Sekolah sebagai pengukur sekolah model.
- 4) Membekali kepala sekolah agar memiliki kompetensi, antara lain merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu sekolah sehingga sekolah memiliki visi, misi, strategi, jaminan kualitas lulusan, program, SOP serta kendali mutu.
- 5) Membekali siswa agar mampu menerapkan keterampilan belajar yang baik seperti menghafal, peta pikiran, membaca cepat, dan membuat resume. (PT. Adaro Indonesia, 2010)

Penetapan program yang dilaksanakan LP3AP tersebut berdasarkan konsultasi dengan pihak berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Tabalong. Pelaksana berbagai workshop tersebut adalah PT. SG yang ditunjuk pihak LP3AP. Akan tetapi, PT. SG menyerahkan lagi pelaksanaan workshop tersebut kepada sebuah konsorsium KPI dari luar Kalimantan. Dengan demikian, workshop dan berbagai pelatihan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan LP3AP sepenuhnya tetapi melibatkan pihak lain. Responden menginformasikan bahwa kontrak dengan perusahaan ketiga itu akan dihentikan dan digantikan dengan pihak ketiga lain yang benar-benar berkompeten. Pengelolaan yang melibatkan banyak pihak tersebut akan berdampak kepada pengeluaran dan efektivitas biaya yang dikeluarkan.

Selain itu, LP3AP juga mengelola perpustakaan dan perpustakaan keliling dengan dua armada bis mini yang telah dimodifikasi menjadi perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling tersebut mendatangi sekolah-sekolah yang

dianggap memerlukan oleh LP3AP. Sekolah-sekolah yang dikunjungi perpustakaan keliling sejak senin sampai jumat adalah TK/SD Hasbunallah, SDN Kapar Hulu, SDN Banyu Tajun, SDN Masingai 1, SDN Padang Panjang 2, SDN Pulau Kuu, MIN Kabuau, SDN Mangkusip, SD Plus Murung Pudak, SDN Bagok, SDN Dahur, SDN 1 Tanta, MI Duhat, SDN Mamburai, SDN Kasiau, SDN Bilas, SDN Laburan, SDN Manduin, SDN Tamiyang, SMP Plus, SMPN 2 Tanta, SMP Ikhwanushafa, SDN Sei Pimping, MTsN/MA Sei Pimping, SMPN Pulau Kuu, SMPN 2 Kelua, SMPN 5 Tanta, SMPN Banua Lima, SMP 4 Murung Pudak, SMPN 3 Tanjung, SMP/SMA Hasbunallah, SMAN 1 Banua Lima Pasar Panas (Barito Timur), dan MTsN Pasar Panas. Sekolah-sekolah tersebut di kunjungi dua kali dalam sebulan.

Pihak ketiga yang juga menggunakan dana CSR adalah IAIN Antasari serta Primagama. Dua lembaga ini menggunakan dana CSR pendidikan untuk program yang telah ditetapkan. IAIN Antasari melaksanakan pengembangan madrasah : masing-masing satu madrasah, agar menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dalam ekonomi. Primagama melaksanakan bimbingan belajar untuk persiapan UN di Balangan.

c. Penggunaan oleh Sekolah/madrasah

Selain penggunaan oleh pihak CSR dan pihak ketiga, alokasi dana CSR juga digunakan langsung oleh sekolah. Pada tingkat sekolah/madrasah, dana CSR digunakan sesuai proposal sekolah yang sudah disetujui. Dana yang mereka terima dibelikan barang sesuai kebutuhan sekolah. Setelah mendapat pemberitahuan dari pihak CSR PT. Adaro Indonesia, kepala sekolah/madrasah

bersama bendahara atau guru, mengambil dana tersebut ke kantor PT. Adaro Indonesia, di Dahai, Paringin. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli segala keperluan sesuai dengan proposal yang telah mereka kirim dan disetujui tim perumus.

Pihak sekolah/madrasah menggunakan dana tersebut tidak berdasarkan petunjuk penggunaan PT. Adaro Indonesia. “Tidak ada petunjuk dalam penggunaan dana CSR tersebut, seperti halnya penggunaan dana BOS”, kata kepala MIN Limau Manis. Hal itu juga dikatakan staf TU SMPN 2 Tanta yang mendapat bantuan dana sebesar Rp. 18.000.000,- untuk membuat sumur bor. Mereka menggunakan dana tanpa standar biaya dan tanpa dibebani kewajiban membayar pajak. Penggunaan tersebut juga tanpa mekanisme kontrak kerja dengan segala prosedur seperti halnya penggunaan uang oleh instansi pemerintah pada jumlah tertentu. Dengan kata lain, sekolah/madrasah hanya membeli atau membayar upah jasa seperti halnya menggunakan uang pribadi.

Penggunaan dana program CSR tersebut dibuktikan dengan kuitansi yang dibubuhi meterai 6000 untuk penggunaan Rp. 1.000.000,- ke atas. Di atas meterai dan tanda tangan penerima, dalam hal ini toko, dibubuhkan stempel toko. Tidak ada keharusan dalam penggunaan dana CSR untuk mencari rekanan yang memiliki badan usaha berbentuk CV atau badan usaha lain. Toko apapun dapat dijadikan tempat membeli membeli keperluan sekolah/madrasah yang bersumber dari dana CSR pendidikan.

Pada tahun 2008, SMAN 1 Paringin menerima alokasi dana CSR sebesar Rp. 50.000.000,-. Pihak sekolah kemudian mengambil dana tersebut ke Kantor

Adaro Indonesia di Desa Dahai. Sesuai dengan proposal sekolah yaitu untuk fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pengadaan tanah, pihak sekolah menggunakan dana dengan membeli alat-alat yang sekolah butuhkan. Pembelian alat-alat tersebut dilakukan oleh pihak sekolah dan menunjuk pihak ketiga yang ahli dalam hal TIK tersebut.

Penggunaan dana tersebut dirincikan sebagai berikut

1	Pembelian tanah sekitar sekolah	5.512.500,-
2	Pembelian 2 buah AC	5.600.000,-
3	Pembelian karpet dan gordena	1.314.000,-
4	Komputer 6 unit PC (Intel Core 2 duo)	30.000.000,-
5	Instalasi jaringan komputer dan pengadaan perangkat pendukung	4.981.000,-
5	Penambahan daya dan instalasi listrik	1.500.000,-
6	Pembelian antena grid	842.500,-
7	Biaya pemasangan antena <i>wireless</i>	250.000,-

Tidak berbeda dengan itu, MIN Limau Manis menggunakan dana program CSR sesuai dengan usul mereka kepada pihak CSR PT. Adaro Indonesia. Setelah ada pemberitahuan bahwa permohonan mereka disetujui, kepala sekolah serta bendahara dan seorang guru berangkat ke Kantor PT. Adaro Indonesia di Desa Dahai untuk mengambil dana tersebut. Setelah dana mereka terima, kepala sekolah menunjuk guru untuk membeli keperluan penyelesaian mushala. Dana sebesar Rp. 13.000.000,- yang mereka terima tersebut digunakan dengan rincian

1. Pembelian perangkat sound system	Rp. 2.000.000,-
2. Pembelian karpet mushala	Rp. 1.000.000,-
3. Membeli cat	Rp. 1.500.000,-
4. Instalasi listrik	Rp. 4.500.000,-
5. Membeli tong air dan perlengkapan untuk tandon air bersih	Rp. 2.500.000,-
6. Jasa tukang	Rp. 1.500.000,-

Penggunaan dana oleh sekolah/madrasah tidak diharuskan dengan aturan tertentu. Tidak ada aturan yang ditetapkan agar harga lebih murah dan kualitas barang terjamin, misalnya dengan keharusan adanya surat penawaran dari beberapa toko sehingga dapat membandingkan harga. Dengan kata lain, penggunaan dana CSR PT. Adaro Indonesia seperti menggunakan duit pribadi dan sangat mudah tanpa peraturan dan pedoman yang dapat mencegah penyelewengan dalam penggunaan.

Penggunaan dana CSR tidak melalui sistem yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan. Penerima dana CSR menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa diatur dalam sebuah pedoman yang dapat meminimalisasi salah kelola atau penyelewengan dana CSR.

5. Pertanggungjawaban Sekolah/madrasah Penerima Dana CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia

Setelah menggunakan dana dari program CSR pendidikan, sekolah/madrasah membuat laporan pertanggungjawaban kepada perusahaan. Pada bagian berikut digambarkan tentang bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah yang telah mendapat bantuan dari program CSR pendidikan.

a. Kabupaten Balangan

Bentuk pertanggungjawaban program CSR pada Kabupaten Balangan berdasarkan bantuan yang sekolah/madrasah terima. SDN Dahai pada tahun 2009 menerima bantuan dari program CSR berupa satu unit komputer PC. Bantuan tersebut tidak berupa “uang” tetapi berupa barang. Sekolah dasar ini mempertanggungjawabkan bantuan tersebut hanya dengan menandatangani berita acara serah terima barang. “Komputer itu kami ambil dari kantor kepala desa. Pada awalnya kami memohon kepada Adaro (pen. CSR PT. Adaro Indonesia) tetapi tidak disetujui. Setelah kami desak dengan alasan sekolah sulit membuat surat-surat, mereka menyuruh mengambil yang ada di kantor desa. Kami hanya menandatangani bukti serah terima barang. Mengenai bantuan tas dan peralatan sekolah, kami juga menandatangani berita serah terima, kemudian wali kelas mendistribusikan kepada siswa”. Pertanggungjawaban sekolah dasar ini hanya sekedar menandatangani surat serah terima barang karena mereka tidak pernah mendapat bantuan berupa “uang”.

Beasiswa untuk SDN Dahai diserahkan kepada siswa dengan menandatangani daftar tanda terima. “Beasiswa tersebut secara simbolis

diserahkan pada upacara, kemudian kami membagikan kepada siswa dengan tanda terima”, kata Kepala SDN Dahai tetapi beliau tidak menemukan berkas daftar tanda terima tersebut. Oleh karena itu, responden tidak dapat menyebutkan jumlah beasiswa yang diterima dengan akurat. “Sekitar Rp. 300.000,- persiswa untuk tujuh orang siswa”, sambung responden.

Pada tingkat SMP, SMPN 3 Paringin mempertanggungjawabkan bantuan yang mereka terima dengan menandatangani berita acara serah terima. Seperti telah disebutkan sebelumnya bantuan dari program CSR yang didistribusikan ke sekolah ini berupa bantuan barang/fisik. Setelah barang diterima, beberapa kali pihak CSR PT. Adaro Indonesia datang untuk memeriksa bantuan-bantuan tersebut. Laporan pertanggungjawaban sekolah hanya sebatas menandatangani berita acara serah terima serta audit terhadap program CSR di sekolah tersebut tidak pernah dilakukan. Di sisi lain, pemeriksaan hanya dilaksanakan untuk mengetahui apakah program sudah dilaksanakan atau belum.

Pada level sekolah yang sama, MTsN Layap tidak pernah menerima bantuan dari program CSR berupa dana segar. Pada tahun 2010, madrasah ini hanya mengikuti program bimbingan belajar yang diikuti kelas IX serta beasiswa. Bimbingan belajar tersebut dilaksanakan oleh Primagama, pihak madrasah hanya membantu dalam hal sosialisasi kepada siswa. Mengenai beasiswa, pihak madrasah membagikannya kepada siswa yang telah ditetapkan dan membuat tanda terima beasiswa yang ditandatangani siswa.

Pada tingkat SMA/MA, MAN 1 Paringin menerima bantuan berupa bimbingan belajar serta beasiswa. Berikut penjelasan Kepala MAN 1 Paringin

“Kami tidak dituntut mempertanggungjawabkan bantuan program CSR tersebut. Seingat saya, beasiswa diserahkan kolektif kepada madrasah dengan bukti tanda terima. Kami menandatangani tanda terima tersebut, kemudian membagikannya kepada siswa yang telah ditetapkan disertai daftar tanda terima yang ditandatangani siswa. Terkait dengan bimbingan belajar pada tahun 2010, kami mensosialisasikan kepada siswa kelas XII yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan pada 2011, kami hanya menyediakan ruang kelas dan beberapa orang guru”,

Responden menjelaskan bahwa pertanggungjawaban MAN 1 Paringin tidak rumit. Madrasah mempertanggungjawabkan bantuan beasiswa dengan menandatangani tanda terima beasiswa untuk siswa MAN 1 Paringin secara kolektif kemudian menyerahkannya kepada siswa yang telah ditetapkan disertai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh siswa. Keterlibatan madrasah pada kegiatan bimbingan belajar tahun 2010 juga sangat sedikit. Madrasah hanya mengumumkan kepada siswa kelas XII mengenai jadwal dan tempat bimbingan.

Berbeda dengan itu, pada tahun 2009, SMAN 1 Paringin harus mempertanggungjawabkan bantuan CSR PT. Adaro Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,-. Pertanggungjawaban tersebut dibuat setelah menggunakan dana dengan rincian serta dilengkapi kuitansi bukti pembelian. Kuitansi pembelian dibubuhi meterai 6000 untuk transaksi Rp. 1.000.000 atau lebih. Laporan tersebut diserahkan ke Kantor PT. Adaro Indonesia di Desa Dahai. Laporan pertanggungjawaban tidak diumumkan kepada siswa atau orang tua siswa sebagai bentuk transparansi. Di samping itu, pihak auditor perusahaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban sampai ke sekolah.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat SMAN 1 Paringin berupa kolom penerimaan yang terdiri dari kolom tanggal, uraian, dan Rp. Pada kolom

pengeluaran dibagi lagi menjadi kolom tanggal, uraian, Rp, dan jumlah. Pada rincian pertanggungjawaban tersebut tidak ada kolom pajak yang dibayar sesuai peraturan yang berlaku. Pengeluaran pada laporan tersebut berjumlah sama dengan penerimaan dengan saldo Rp. 0. Pada bagian bawah laporan tersebut ditandatangani oleh Kepala SMAN 1 Paringin dan bendahara. Sedangkan bentuk bantuan berupa pengecatan pagar, dipertanggungjawabkan dengan menandatangani berita acara serah terima bantuan.

b. Kabupaten Tabalong

Di Kabupaten Tabalong, pertanggungjawaban penggunaan dibuat dengan rincian penggunaan serta dilampiri dengan bukti kuitansi. Hal itu tergambar dari pernyataan MIN Limau Manis yang menerima bantuan Rp. 13.000.000,- membuat laporan rincian penggunaan dana dan dilampiri dengan kuitansi. Setelah itu, diserahkan ke Kantor PT. Adaro Indonesia di Dahai. Laporan pertanggungjawaban MIN Limau Manis dibuat dengan kolom nomor, uraian, serta biaya dan ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah.

Pertanggungjawaban SDN Laburan dalam program CSR PT. Adaro Indonesia hanya berupa penandatanganan berita acara serah terima. Hal itu, terkait dengan bantuan berupa bangunan fisik yang sekolah terima. “Setelah bangunan selesai, berita acara serah terima kami tandatangani dan distempel. Seingat kami, SDN Laburan tidak pernah menerima “uang” dan itu lebih mudah kalau menerima sudah jadi”, kata Wakil Kepala SDN Laburan. Jika memasuki sekolah ini, akan terlihat tulisan Adaro pada pagar sekolah serta mushala sebagai tanda bantuan dari program CSR PT. Adaro Indonesia. Terkait dengan audit, dia menyambung,

“pihak Adaro saja yang datang untuk mengecek bangunan”. Hal tersebut memberikan petunjuk bahwa audit terhadap laporan atau berita acara serah terima tidak pernah dilakukan sampai ke sekolah.

Tidak berbeda dengan itu, yang terjadi pada MTs Ar Raudlah. Madrasah ini menerima bantuan satu unit komputer PC. “Bantuan tersebut diserahkan oleh suami salah satu guru disini. Dia bekerja di PT. Adaro Indonesia. Kami, pada waktu itu, hanya menandatangani tanda terima barang. Setelah itu tidak ada yang mengecek tentang bantuan tersebut”, kata kepala madrasah. Mengenai pertanggungjawaban beasiswa yang dibagikan ke siswa, dia menjelaskan, “saya sudah lupa tentang beasiswa tersebut. Kira-kira sebelum tahun 2008, beasiswa tersebut kami diserahkan kepada sekolah pada saat upacara resmi kemudian kami bagikan ke siswa yang berhak dengan tanda terima”. Dari pernyataan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diserahkan dan dibuktikan dengan serah terima barang tidak pernah diperiksa sampai ke tingkat sekolah secara detail.

Sekolah lain yang memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban ini adalah SMPN 2 Tanta. Sebagai sekolah model, SMPN 2 Tanta menerima distribusi bantuan dari program CSR lebih banyak daripada MTs Ar Raudlah. Sekolah ini mempertanggungjawabkan bantuan tersebut dengan dua cara berdasarkan bentuk bantuan. Tahun 2010, sekolah ini mendapat bantuan dana sebesar Rp. 18.000.000,- untuk pembuatan sumur bor. Dana tersebut di pertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban yang disertai dengan lampiran kuitansi dan diserahkan ke Kantor PT. Adaro Indonesia di Desa Dahai. Pada tahun yang sama, SMPN 2 Tanta mendapat bantuan dana sebesar

Rp. 10.000.000,- untuk pembelian dua buah laptop. Pertanggungjawaban yang dibuat seperti halnya pertanggungjawaban bantuan sumur bor. Setelah itu, ada staf PT. Adaro Indonesia yang datang ke sekolah untuk melihat serta memotret sumur bor yang telah selesai dibuat.

Hal itu menggambarkan bahwa pemeriksaan oleh auditor atas laporan tersebut tidak pernah dilakukan sampai ke sekolah. Transparansi bantuan juga tidak terlihat di SMPN 2 Tanta. Laporan hanya diserahkan kepada PT. Adaro Indonesia dan tidak diumumkan kepada siswa atau orang tua siswa. Bantuan CSR PT. Adaro Indonesia yang digunakan untuk komputer tersebut selain dicatat sebagai inventaris sekolah, juga ditulis pada selembur kertas berfigura dan digantung di dinding ruang tata usaha. Pada kertas berfigura tersebut tertulis “Daftar Barang-Barang TIK Bantuan CD PT. Adaro Indonesia”, kemudian dibawahnya tertulis bantuan yang diterima sekolah, jumlah, tahun, keberadaan barang, keadaan barang, dan tanggal penyerahan. Akan tetapi, informasi mengenai alokasi dana per barang tidak disebutkan dan bantuan yang ditulis disitu adalah bantuan tahun 2008 dan 2009. Pada bagian bawah ditandatangani oleh Kepala SMPN 2 Tanta dan ditulis pula pengelola TIK sekolah.

Pada tingkat SMA/MA pertanggungjawaban program CSR juga tergantung bentuk bantuan. Wakil Kepala SMAN 1 Tanta menjelaskan bahwa keterlibatan sekolah dalam pertanggungjawaban bantuan bangunan fisik adalah dengan menandatangani berita acara serah terima bangunan. “Bantuan berbentuk uang, misalnya bantuan untuk alat laboratorium sebesar Rp. 15.000.000,-, kami pertanggungjawabkan dengan membuat laporan berisi rincian penggunaan dana

tersebut. Kuitansi-kuitansi dilampirkan pula pada laporan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut kami serahkan ke Dahai sekitar bulan September”, ujarnya. Ketika ditanyakan tentang audit, responden menjawab bahwa tidak pernah ada auditor yang datang ke sekolah untuk mengecek secara detil kebenaran laporan pertanggungjawaban atau bantuan bangunan fisik.

Tidak adanya ketentuan tertulis yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban tersebut berimplikasi pada format laporan pertanggungjawaban yang berbeda-beda pada setiap sekolah/madrasah. Pihak sekolah/madrasah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan keinginan dan pemahaman mereka. Dengan kata lain, sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan tidak merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan dengan disertai ketentuan yang dapat menjamin akuntabilitas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat tersebut hanya diserahkan kepada pihak CSR PT. Adaro Indonesia sebagai pemberi bantuan. Sekolah/madrasah tidak diwajibkan untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada komite sekolah/madrasah serta Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga tidak diharuskan untuk dipublikasikan sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itulah, banyak guru tidak mengetahui bantuan apa yang pernah diterima oleh sekolah/madrasah. Guru yang mengetahui hanya guru yang terlibat saja dalam proses penggunaan dana tersebut.

Berbeda dengan itu, pertanggungjawaban sekolah/madrasah yang menerima bantuan program CSR berupa bantuan fisik/barang. Sekolah/madrasah hanya menandatangani berita acara serah terima barang. Pada bantuan semacam ini, pihak sekolah/madrasah kerap tidak mengetahui berapa alokasi dana CSR yang mereka terima. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya dokumen yang mereka simpan terkait bantuan tersebut. Sekolah/madrasah hanya mencatat bantuan tersebut pada buku inventaris dan tidak menyebutkan berapa dana yang dialokasikan untuk pembelian barang tersebut. Pada catatan inventaris tersebut hanya disebutkan bahwa itu merupakan bantuan dari program CSR PT. Adaro Indonesia tanpa merincikan berapa alokasi dana untuk itu.

Dalam konteks pertanggungjawaban, pelaksanaan program CSR mengharuskan audit oleh audit internal PT. Adaro Indonesia dan juga dari lembaga pemerintah, BPKP. Akan tetap, pemeriksaan tersebut tidak sampai ke sekolah/madrasah. Mencermati penggunaan dan pertanggungjawaban dana CSR tersebut oleh sekolah tergambar sebuah proses yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Mungkin itu pula yang menyebabkan masyarakat, tidak hanya sekolah/madrasah, selalu mengandalkan CSR PT. Adaro Indonesia jika mereka memerlukan bantuan dana. Dari sekedar membangun jalan kecil sampai membangun gedung besar, semua berharap kepada program CSR PT. Adaro Indonesia.

Pada bagian ini dapat dilihat bahwa program CSR tidak diiringi oleh pertanggungjawaban yang relatif akuntabel. Pertanggungjawaban tidak disertai dengan proses pemeriksaan oleh auditor sehingga kesesuaian laporan dengan fakta

dilapangan dapat diragukan. Selain itu, pertanggungjawaban tidak disertai dengan proses publikasi laporan kepada siswa, orang tua dan masyarakat. Dengan kata lain, transparansi laporan pertanggungjawaban, yang dapat menjadi titik tolak pengawasan oleh publik, tidak dilaksanakan dengan baik

6. Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana pendidikan adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan agar dana yang telah dialokasikan tepat sasaran. Secara formal, pengawasan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Dalam SK Bupati Balangan dan juga Tabalong disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh para camat dimana program CSR dilaksanakan. Pada bagian berikut digambarkan tentang pengawasan terhadap program CSR pendidikan.

a. Kabupaten Balangan

Pengawasan pengelolaan dana CSR, sejak perencanaan anggaran dan fase selanjutnya, tidak dilaksanakan secara optimal. Secara formal struktural, pengawasan program CSR seharusnya dilakukan oleh para camat yang ditunjuk dalam SK Bupati Balangan. Para camat itulah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan program CSR PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Balangan. Akan tetapi, pada praktiknya pengawasan tidak dilakukan oleh para camat terhadap pelaksanaan program CSR pendidikan di Kabupaten Balangan. Seorang camat menjelaskan bahwa mereka memberikan rekomendasi proposal bantuan yang diajukan oleh lembaga/organisasi masyarakat. “Kami akan melihat apakah proposal bantuan tersebut telah didanai oleh pemerintah. Apabila telah dibiayai pemerintah, proposal tersebut tidak akan kami berikan rekomendasi. Menyangkut CSR pendidikan, kami tidak terlibat karena sekolah berada dibawah koordinasi Dinas

Pendidikan”, kata Camat Juai. Itu menunjukkan bahwa keterlibatan camat adalah dalam hal program CSR di desa sedangkan CSR pendidikan para camat tidak terlibat.

Pengawasan dalam program CSR Pendidikan sangat minim, untuk tidak mengatakan “tidak ada”. Para camat yang secara formal struktural bertugas sebagai pengawas tidak mengawasi pelaksanaan program di sekolah/madrasah. Hal itu dikonfirmasi oleh pihak sekolah/madrasah yang terlibat dalam program CSR. Misalnya, program CSR yang menyedot alokasi terbesar : Bimbingan Belajar UN, tidak mendapat pengawasan dari yang berwenang dalam hal ini camat. Kepala Tata Usaha MAN 1 Paringin mengatakan bahwa camat tidak pernah datang ke madrasah ini untuk mengawasi program CSR yang dilaksanakan: bimbingan belajar. Kepala SMAN 1 Paringin juga mengkonfirmasi bahwa program bimbingan belajar tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan. Menurut responden tersebut pihak Primagama hanya berkoordinasi untuk pelaksanaan bimbingan belajar.

Hal senada juga di katakan oleh kepala SMPN 3 Paringin. “Pihak Adaro biasanya datang hanya mencek apakah bantuan CSR sudah kami terima. Pengawasan bimbingan belajar dilaksanakan pihak perwakilan Primagama yang datang untuk berkoordinasi pelaksanaan Bimbel tersebut misalnya terkait kesiapan guru dan kelas”, ujarnya. Terkait pengawasan Bimbel tersebut, Kepala TU MTsN Layap mengatakan bahwa tidak ada pengawasan oleh pihak CSR PT. Adaro Indonesia atau camat. “Yang datang adalah pihak Primagama untuk berkoordinasi tentang jadwal dan tempat Bimbel di madrasah ini”.

Pengawasan oleh perwakilan Primagama tersebut dilakukan oleh pelaksana operasional. Pada beberapa kesempatan, pihak Primagama datang ke sekolah untuk melihat bagaimana proses bimbingan belajar dilaksanakan. Pengawasan tersebut hanya sebatas terkait teknis, bukan pada proses pembelajaran. Primagama mempercayakan sepenuhnya proses bimbingan belajar kepada para mentor yang mereka sudah anggap sangat profesional.

Pengawasan dalam program yang lain, misalnya, bantuan sarana prasarana, dilakukan oleh pihak CSR PT. Adaro Indonesia. Pengawasan dalam hal ini hanya bersifat melihat apakah pembangunan sudah dilaksanakan atau belum. Berbagai program CSR pada SMPN 3 Paringin diawasi oleh pihak CSR PT. Adaro Indonesia. “*Adaai dahulu buhannya maliati* (dulu ada pihak PT. Adaro Indonesia yang datang untuk melihat program CSR yang dialokasikan di SMPN 3), kata kepala SMPN 3 Paringin. Pengawasan pembangunan fisik yang bersumber dari dana CSR dilakukan hanya sebatas melihat bangunan-bangunan saja, tidak dalam makna pengawasan untuk menggali persoalan-persoalan yang dihadapi dan mencari solusinya.

Pada sekolah/madrasah yang tidak terlibat dalam program CSR PT Adaro Indonesia atau hanya sekedar menerima bantuan beasiswa serta tas, pengawasan sama sekali tidak dilaksanakan. Pada MIN Layap dan MTsN Layap, pengawasan sama sekali tidak dilaksanakan. Hal itu disebabkan madrasah ini tidak menerima bantuan yang “besar” . Bantuan yang mereka pernah mereka terima hanya beasiswa dan program nonfisik yang dananya tidak besar. Pada SDN Dahai, tidak ada sedikitpun praktik pengawasan terhadap pengelolaan program CSR di

sekolah, karena sekolah ini hanya menerima bantuan tas sekolah. “Dahulu, pernah ada dari LP3AP datang ke sini, saya sudah lupa kapan. Mereka untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru. Seingat saya, tidak ada pengawasan bantuan CSR yang dilaksanakan di sekolah kami. Setelah kami mendapat bantuan tas dan perlengkapan sekolah, tidak ada pengawasan dalam proses pemberian bantuan tersebut”, kata kepala SDN Dahai.

Publik juga tidak menunjukkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR PT. Adaro Indonesia. Itu menjadi cerminan bahwa publik tidak begitu peduli dengan pelaksanaan CSR di Kabupaten Balangan. Ada beberapa orang yang mengkritik tentang program CSR yang mereka anggap sarat penyelewengan dan tidak tepat, tetapi hanya sebatas perbincangan saja. Di samping itu, kontrol sosial melalui media massa pun tidak pernah memberikan pengawasan atau kritik terhadap program CSR PT. Adaro Indonesia. Justru, sebaliknya, media massa banyak mengekspos kegiatan CSR yang sangat menonjolkan keberhasilan program CSR PT. Adaro Indonesia.

a. Kabupaten Tabalong

Seperti halnya di Kabupaten Balangan, tanggung jawab pengawasan pengelolaan program CSR dibebankan kepada para camat, sebagaimana disebutkan SK Bupati Tabalong. Akan tetapi, pada praktiknya, pengawasan oleh para camat tersebut tidak dilaksanakan. Camat yang ditemui pada penelitian ini mengatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan program CSR merupakan tanggung jawab camat. Pada dasarnya para camat mengetahui tugas mereka terkait program CSR PT. Adaro Indonesia. Akan tetapi, pengawasan terhadap

program CSR pendidikan tidak mereka lakukan. Para camat lebih berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan di wilayah mereka. Hal itu disebabkan oleh wewenang bidang pendidikan yang berada di bawah Dinas Pendidikan. Akan tetapi, Dinas Pendidikan pun tidak melakukan pengawasan terhadap program CSR.

Tidak adanya pengawasan camat tersebut sejalan dengan pernyataan pihak sekolah. Pihak sekolah yang mendapat distribusi program CSR selalu mengatakan tidak ada praktik pengawasan oleh camat. Pengawasan yang dilakukan di MIN Limau Manis dapat dikatakan tidak ada. Ketika MIN ini menerima bantuan dari Program CSR berupa penyelesaian mushala madrasah, tidak ada pihak PT. Adaro Indonesia atau camat yang mengawasinya. Baru ketika selesai, mushala tersebut dipotret oleh staf CSR PT. Adaro Indonesia. Bantuan program CSR tidak untuk membangun mushala yang difoto tersebut tetapi lebih kepada kelengkapan mushala. “Ada dari perusahaan yang memotret mushala bantuan Adaro”, ujar kepala MIN Limau Manis yang mendapat bantuan penyelesaian pembangunan mushala. Pengawasan dalam hal ini lebih berbentuk pada pencekan hasil akhir, bukan pengawasan dalam proses penggunaan dana bantuan CSR tersebut.

Pengawasan secara lebih aktif dilakukan oleh pihak internal perusahaan, terutama dalam hal pembangunan fisik. Pengawasan dilakukan dengan kunjungan ke lokasi pembangunan yang dilaksanakan CSR PT. Adaro Indonesia. Pengawasan perusahaan lebih dominan daripada pengawasan oleh para camat. “*bantuan Adaro datang maliati pas pembangunan perpustakaan* (Pihak Adaro yang

datang mengawasi pembangunan perpustakaan)”, papar seorang guru di SDN Laburan. Responden kemudian menyambung, “pengawasan terkait pelaksanaan workshop dilaksanakan oleh pihak LP3AP. Dulu yang sering datang adalah Bapak F”. Bapak F adalah salah satu pimpinan LP3AP Tanjung sebelum berubah menjadi YABN. Bapak F tersebut adalah lulusan Program Studi Teknik Sipil Politeknik Banjarmasin.

Pada tingkat SMP, pengawasan tergambar dari penuturan Wakil Kepala SMPN 2 Tanta, “biasanya ada datang dari PT. Adaro Indonesia untuk melihat bantuan yang bersifat fisik. Pihak LP3AP juga datang ke sekolah untuk melihat bagaimana hasil workshop. Apakah para guru mempraktikkan hasil workshop yang diikuti”. Penuturan responden tersebut menggambar bahwa pengawasan yang dilakukan di SMPN 2 Tanta berbentuk memonitoring pelaksanaan program CSR dan melihat apakah materi workshop dipraktikkan guru dalam mengajar. Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan adalah untuk mengetahui sampai dimana program CSR di sekolah yang bersangkutan telah dilaksanakan. Di samping itu, pengawasan program CSR dijalankan oleh pelaksana program itu sendiri bukan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam program.

Tidak berbeda jauh dengan itu, pengawasan program CSR di SMAN 1 Tanta. Wakil Kepala SMAN 1 Tanta mengatakan bahwa yang sering datang ke sekolah adalah dari CSR PT. Adaro. “*bukan* Adaro yang datang (Pihak CSR PT. Adaro Indonesia yang datang)”. Responden mengatakan bahwa camat hanya datang ke sekolah pada saat acara peringatan hari besar Islam yang dilaksanakan sekolah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lebih dominan dilakukan oleh pihak CSR PT. Adaro Indonesia serta pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana. Camat yang bertanggung jawab sebagai pengawas program tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya tersebut di sekolah/madrasah. LP3AP yang terlibat dalam pelaksanaan workshop bagi guru melakukan pengawasan ke sekolah untuk melihat hasil workshop. Mereka kadang-kadang melakukan pengawasan ke sekolah untuk melihat apakah guru mempraktikkan hasil workshop dalam pembelajaran.

Akan tetapi, pengawasan tersebut tidak berjalan dengan optimal karena pengawasan tersebut bukan oleh pihak yang ditunjuk LP3AP sebagai pelaksana workshop atau pengawas independen yang kompeten dalam bidang metodologi pembelajaran. Pelaksana workshop ditunjuk LP3AP sebuah perusahaan yang kemudian menunjuk lagi sebuah konsorsium untuk menjadi pelaksana workshop. Oleh karena itu, pengawasan tidak efektif karena dilakukan oleh pihak LP3AP yang notabene tidak mengetahui esensi workshop tersebut. Terkait dengan itu pula, pengawasan tersebut tidak ada upaya pemecahan masalah karena keterbatasan pihak LP3AP. Dengan kata lain, LP3AP hanya melakukan monitoring untuk mengetahui apakah hasil workshop dipraktikkan oleh guru sedangkan apabila ada persoalan mereka tidak memberikan solusi.

Seperti telah disebutkan, pada saat proyek CSR tersebut dilaksanakan, transparansi masih sangat kurang. Misalnya, pada saat pembangunan fisik di SMAN 1 Tanta yang bersumber dari dana CSR PT. Adaro Indonesia masih berjalan, informasi yang menyebutkan anggaran dana serta keterangan lain

tentang pembangunan tersebut tidak ada terlihat di sekitar proyek. “Tidak ada papan informasi proyek, tahu-tahu bangunan sudah berdiri” ujar seorang guru. Dengan papan informasi proyek tersebut, publik mengetahui alokasi dana serta siapa yang menjadi kontraktor proyek. Lebih jauh, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengawasi proses penggunaan dana CSR oleh publik. Pengawasan oleh publik akan dapat mengurangi praktik penyelewengan oleh pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan pribadi.

Seperti telah digambarkan pada bagian terdahulu, MTs Ar Raudlah dan MAN 1 Tanjung sangat sedikit terlibat dalam program CSR PT Adaro Indonesia. Oleh karena itulah, tidak ada pengawasan program CSR pada dua madrasah ini. MTs Ar Raudlah tercatat pernah mendapat bantuan satu unit komputer dan tidak ada tindak lanjut dari bantuan tersebut berupa pengawasan atau verifikasi apakah bantuan telah diterima madrasah. Pengelola CSR PT Adaro Indonesia ke MTs Ar Raudlah mengunjungi madrasah pada saat menyerahkan komputer. Setelah itu, tidak ada lagi staf perusahaan yang datang ke madrasah tersebut.

Terkait dengan pengawasan ini, pihak Dinas Pendidikan Tabalong punya ekpektasi untuk terlibat dalam proses pengawasan ini. Seorang Kepala Bidang yang ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Dinas Pendidikan Tabalong mengungkapkan, “kami tidak dilibatkan dalam program CSR ini, semestinya paling tidak dalam monitoring kami terlibat”. Ini menunjukkan bahwa pihak Dinas Pendidikan tidak memiliki akses untuk melakukan monitoring dalam berbagai program CSR. Pejabat lain yang ditemui bahkan mengatakan, “kami ini ibaratnya sebagai subjek saja, apabila ada beasiswa dari Adaro, kami yang

menyediakan data. Setelah itu tidak tahu apa-apa lagi”. Pihak Dinas Pendidikan terlibat dalam program CSR terkait dengan penyediaan informasi yang diperlukan pihak pelaksana CSR. Program beasiswa misalnya, Dinas Pendidikan yang menyediakan data siswa yang berhak. Dari data itulah, PT. Adaro Indonesia mendistribusikan beasiswa.

Gambaran yang diatas menunjukkan bahwa program CSR pendidikan tidak disertai dengan pengawasan yang memadai oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan, dalam hal ini camat. Pengawasan yang dilakukan lebih tepat disebut sebagai monitoring terhadap program CSR pendidikan karena dilakukan oleh pelaksana program itu sendiri. Di samping itu, pengawasan oleh publik juga tidak maksimal.

7. Hasil dan Dampak Program CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia

Pada bagian ini, maksud dari hasil program CSR pendidikan adalah sesuatu yang didapatkan dan dirasakan langsung keberadaannya oleh penerima bantuan dana melalui program CSR PT. Adaro Indonesia. Selain itu, yang dimaksud dengan dampak adalah pengaruh atau akibat dari hasil program CSR pendidikan bagi siswa atau warga sekolah lain.

a. Kabupaten Balangan

Alokasi dana CSR pendidikan di Kabupaten Balangan sebesar Rp. 4.335.000.000,- yang merupakan 29,36% dari total alokasi CSR di kabupaten tersebut. dikatakan belum optimal. Sebanyak 69,2% dari alokasi CSR pendidikan didistribusikan kepada Primagama untuk kegiatan bimbingan belajar sehingga alokasi untuk program lain sangat sedikit. Oleh karena itulah, hasil dan dampak program CSR pendidikan tidak terlihat maksimal pada sekolah/madrasah di Kabupaten Balangan, terutama di lokasi penelitian.

Hal itu dapat dilihat pada bagian berikut

1) Hasil-Hasil dan Dampak Umum Program CSR Pendidikan

Di Kabupaten Balangan, hasil program CSR pendidikan yang dapat dilihat pada sekolah/madrasah sangat sedikit yang dapat yang dapat menunjang proses pembelajaran. Secara umum, hasil dan dampak program CSR pendidikan pada sekolah/madrasah dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.5
HASIL DAN DAMPAK UMUM PROGRAM CSR PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BALANGAN

SEKOLAH/MADRASAH	HASIL	DAMPAK
MIN LAYAP	-	-
SDN DAHAI	Tandon air dan sumur bor	Ketersediaan air bersih untuk warga sekolah
	Pengecatan ruang kelas	Kebersihan dan keindahan ruang kelas
	Siswa menerima beasiswa	Membantu dan meringankan biaya pendidikan yang ditanggung orang tua
	7 orang siswa mendapat bantuan tas dan perlengkapan sekolah	Membantu dan meringankan biaya pendidikan
MTsN Layap	Tes sidik jari siswa	Mengetahui bakat dan minat siswa
	Lapangan basket	Siswa dapat berolahraga bola basket untuk menyalurkan bakat dan minat
	Bimbingan belajar siswa	Siswa dapat mengikuti bimbingan belajar Primagama secara gratis serta membantu guru dalam menghadapi UN
	7 orang siswa mendapat bantuan beasiswa	Meringankan biaya pendidikan siswa yang ditanggung orang tua
SMPN 3 Paringin	Siswa dapat mengikuti bimbingan belajar Primagama secara gratis	Siswa dapat belajar lebih intensif untuk menghadapi UN dan membantu sekolah/madrasah dalam persiapan UN
	Lima unit komputer	Siswa dapat menggunakan untuk kegiatan latihan komputer dan menunjang tata usaha kantor
	Satu proyektor digital	Pembelajaran dengan menggunakan multimedia
	Satu laptop	Pembelajaran dengan menggunakan multimedia

	Lapangan dan jalan sekolah lebih layak	Warga sekolah dapat melaksanakan upacara dan olahraga di lapangan sekolah serta memudahkan akses menuju sekolah
	Bertambahnya koleksi perpustakaan dan Alquran digital	Siswa dapat menambah wawasan melalui buku-buku perpustakaan serta siswa dapat lebih mudah belajar membaca Alquran
	Sarana air bersih	Warga sekolah dengan mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sekolah
	7 orang siswa menerima beasiswa	Meringankan biaya pendidikan siswa yang ditanggung orang tua
MAN 1 Paringin	Siswa dapat mengikuti bimbingan belajar Primagama secara gratis	Siswa dapat belajar lebih intensif untuk menghadapi UN dan membantu sekolah/madrasah dalam persiapan UN
	7 orang siswa menerima beasiswa	Meringankan biaya pendidikan siswa yang ditanggung orang tua
SMAN 1 Paringin	Perangkat teknologi informasi dan jaringan komputer	Siswa dapat belajar dan praktik tentang teknologi informasi
	Pengecatan bangunan dan pagar	Keindahan, kebersihan, dan keamanan sekolah
	Siswa dapat mengikuti bimbingan belajar Primagama secara gratis	Siswa dapat belajar lebih intensif untuk menghadapi UN dan membantu sekolah/madrasah dalam persiapan UN

Minimnya alokasi yang langsung diterima oleh sekolah/madrasah menjadi salah satu faktor rendahnya hasil dan dampak umum yang diperoleh siswa sekolah/madrasah dari program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia. Selain itu, distribusi dan alokasi yang diterima sekolah/madrasah sangat sedikit yang mendukung langsung proses belajar mengajar. Di samping itu, hasil dan dampak

program CSR sangat sedikit yang dirasakan SDN Dahai yang merupakan sekolah pada desa ring 1 serta mayoritas siswanya dari desa ring 1.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil yang berdampak pada proses pendidikan adalah pada SMPN 3 Paringin dan SMAN 1 Paringin. Pada SMPN 3 Paringin, hasil yang dapat diterima terkait dengan proses pembelajaran adalah bantuan berupa perangkat proyektor digital yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, hasil yang ada hubungan dengan proses pendidikan adalah bantuan buku bacaan yang berdampak bagi bertambahnya wawasan siswa serta dapat menjadi sumber pembelajaran di sekolah. Di samping itu, bantuan perangkat komputer yang diterima SMAN 1 Paringin memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan kata lain, hasil dari program CSR pendidikan yang dirasakan siswa terbatas pada pemakaian dan penggunaan bantuan yang diterima sekolah/madrasah. Mengenai dampak khusus terhadap proses pendidikan dan prestasi akademik siswa akan dibahas pada bagian tersendiri.

Bantuan-bantuan lain lebih cenderung tidak terkait langsung dengan proses belajar mengajar sehingga hasil dari bantuan tersebut juga tidak akan berdampak terhadap prestasi akademik siswa. Siswa-siswa SDN Dahai yang mendapat bantuan tas dan perlengkapan sekolah dapat meringankan beban biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Demikian juga, bantuan tandon air bersih dan sumur bor yang hasilnya terbatas pada manfaat langsung dan tidak menunjang secara langsung bagi proses pendidikan. Di sisi lain, hasil yang dirasakan SMPN 3 Paringin yang mendapat bantuan perbaikan halaman dan jalan adalah kemudahan

akses bagi siswa menuju ke sekolah. Hasil bantuan dana tersebut tidak terkait dengan proses pendidikan di sekolah karena tidak menjadi komponen utama yang dapat mendukung proses belajar mengajar di kelas.

2) Dampak Program CSR Pendidikan terhadap Proses Pendidikan

Di Kabupaten Balangan, proses pendidikan pada sekolah/madrasah tidak terkait dengan program CSR yang di laksanakan PT. Adaro Indonesia. Program CSR tidak dialokasikan untuk program-program yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, baik itu proses belajar mengajar atau kegiatan non akademik. Dengan kata lain, proses belajar mengajar yang inovatif dan berkualitas di sekolah/madrasah tidak dapat diklaim sebagai dampak dari program CSR tetapi lebih sebagai hasil dari upaya sekolah/madrasah serta guru itu sendiri. Oleh karena itulah, dampak program CSR pendidikan bagi proses pendidikan sangat minim. Hanya dua sekolah yaitu SMPN 3 Paringin dan SMAN 1 Paringin yang merasakan dampak program CSR dalam proses belajar mengajar di kelas melalui penggunaan proyektor digital dari program CSR. Itupun masih dalam jumlah yang sangat terbatas.

Mencermati enam sekolah/madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini, proses belajar mengajar lebih dominan dilaksanakan dengan metode ceramah, bahkan di SDN Dahai masih menggunakan kapur tulis. Dengan kata lain, proses pembelajaran di kelas dilaksanakan oleh guru dengan metode ceramah dan kadang-kadang menggunakan sarana multimedia proyektor digital. Pada SDN Dahai dan MIN Layap proses pembelajaran didominasi oleh metode ceramah.

Hal itu tentu saja tidak dapat dikaitkan dengan program CSR PT. Adaro Indonesia karena program CSR tidak banyak terlibat dalam peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah/madrasah tersebut.

Pada SMPN 3 Paringin misalnya, para guru relatif lebih sering terlihat menggunakan proyektor digital dibandingkan sekolah/madrasah lain. “Kami disini sering menggunakan LCD proyektor, tetapi para terpaksa bergantian menggunakannya karena jumlahnya terbatas”, kata kepala SMPN 3 Paringin. Meskipun belum memadai, bantuan proyektor digital memberikan dampak bagi peningkatan kualitas proses belajar dengan perangkat multimedia. Hal itu relatif lebih baik daripada MTsN Layap. Proses pembelajaran pada madrasah ini juga didominasi dengan ceramah dan jarang menggunakan media digital karena keterbatasan media digital tersebut. Ketika beberapa kali mengunjungi madrasah ini, peneliti tidak pernah melihat ada guru yang menggunakan media proyektor digital. Demikian juga pada SMAN 1 Paringin. Di sekolah tersebut terlihat proses pembelajaran kadang-kadang menggunakan media proyektor. Penggunaan media tersebut tidak berhubungan dengan program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia karena minimnya bantuan untuk sarana prasarana dari program CSR.

Di samping proses belajar mengajar, dampak program CSR juga tidak terlihat pada kegiatan non akademik yaitu kegiatan ekstra kurikuler (Ekskul) di sekolah/madrasah. Mengenai kegiatan Ekskul tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7. Kegiatan ekstrakurikuler tidak merupakan kegiatan yang menjadi perhatian program CSR pendidikan. Oleh karena itulah, kegiatan Ekskul tidak dapat dikatakan sebagai hasil atau dampak dari program CSR. Implikasi lebih jauh,

prestasi non akademik siswa juga tidak dapat dikatakan sebagai keberhasilan program CSR pendidikan.

3) Dampak Program CSR Pendidikan terhadap Prestasi Akademik

Di Kabupaten Balangan, dampak program CSR pendidikan terhadap prestasi akademik dapat dilihat dari rata-rata hasil UN tingkat SMP/MTs dan SMA/MA se-kabupaten. Dari rata-rata nilai tersebut dapat dilihat apakah program bimbingan belajar yang diikuti oleh seluruh siswa yang akan mengikuti UN memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi akademik siswa.

Dampak program CSR pada kabupaten ini, terutama program bimbingan belajar oleh pihak ketiga yang dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- tidak terlihat secara konsisten terlihat selama beberapa tahun. Terlepas dari perdebatan terkait UN, hasil ujian pada kabupaten ini tidak menunjukkan dampak positif. Hal itu, dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.6
RATA-RATA NILAI UASBN/ UN BALANGAN SERTA PERINGKAT
SE-KALIMANTAN SELATAN

NO	TINGKAT	2007		2008		2009		2010		2011	
		RATA2	RANK	RATA2	RANK	RATA2	RANK	RATA2	RANK	RATA2	RANK
1	SD/MI	5,45	-	5,82	12	5,85	12	6,07	12	6,1	-
2	SMP/MTs/SMPT	6,09	-	7,05	-	7,13	5	6,89	13	7,17	12
3	SMA/MA	7,01	-	7,21	-	7,32	1	6,62	13	6,86	-

Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas (2009, 2010) dan Direktorat Pembinaan TK dan SD (2010)

Pada tabel tersebut tergambar bahwa prestasi akademik yang dicerminkan dari hasil UN/UASBN tidak konsisten dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010, rata-rata nilai UASBN SD/MI di Balangan adalah 6,07 dan berada pada peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tingkat SMP/MTs, nilai rata-rata UN adalah 6,89 dan berada pada peringkat 13 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai tahun 2009 yaitu 7,13 pada peringkat 5 se-Kalimantan Selatan. Pada tingkat SMA/MA, nilai rata-rata yang diraih adalah 6,62 pada peringkat 13 dari 13 kabupaten kota. Pencapaian ini jauh menurun dari tahun sebelumnya (2009) yang meraih nilai 7,32 pada peringkat 1 se-Kalimantan Selatan.

Melihat data dua tahun terakhir, klaim keberhasilan program CSR Pendidikan di Balangan perlu dikaji ulang. Selama ini, program CSR dianggap punya andil dalam pencapaian hasil UN tahun 2007/2008 yang meraih peringkat 3 Provinsi Kalsel untuk SLTA dan peringkat 2 untuk tingkat SLTP. Pada tahun 2008/2009, prestasi itu meningkat, peringkat 2 tingkat SLTA dan peringkat 1 tingkat SLTP. (PT. Adaro Indonesia, 2009). Keberhasilan tersebut tampaknya diakui sebagai dampak dari bimbingan belajar yang didanai oleh Program CSR Adaro. Ketua Dewan Pendidikan Balangan mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas daripada peran CSR PT. Adaro Indonesia. “Bagaimanapun juga nilai UN tersebut merupakan bukti meningkatnya kualitas pendidikan di Balangan. Akan tetapi, ternyata siswa Balangan banyak yang tidak lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri”, ujar Ketua Dewan Pendidikan Balangan.

Mengenai peringkat tersebut, terutama tahun 2008/2009, tampak ada perbedaan dengan data yang dirilis oleh Puslitbang Kementerian Pendidikan Nasional. Pada data itu disebutkan peringkat Balangan untuk tingkat SMA/SMA adalah 1 sedangkan untuk SMP/MTs/SMPT peringkat 5. Pada tahun 2010, peringkat UN menurun drastis menjadi peringkat 13 pada kedua jenjang pendidikan tersebut. Hasil UN yang tidak menggembirakan tersebut paling tidak memberikan sinyal bahwa dampak dari bimbingan belajar tidak terlalu besar untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Secara khusus, pencapaian UN sekolah/madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini serta kegiatan ekstra kurikuler dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.7
RATA-RATA NILAI UASBN/UN SEKOLAH/MADRASAH, DAN
EKSKUL DI KABUPATEN BALANGAN

NO	SEKOLAH/MADRASAH	UN				EKSKUL
		2008	2009	2010	2011	
1	MIN Layap	6,02	6,07	5,79	6,24	2
2	SDN Dahai	5,69	6,01	5,69	6,12	0
3	MTsN Layap	6,5	6,01	7,08	7,41	5
4	SMPN 3 Paringin	-	-	-	7,24	4
5	MAN 1 Paringin	7,32	7,53	6,77	7,22	2
6	SMAN 1 Paringin	7,43	7,55	6,67	7,03	0

Diolah dari wawancara dan dokumentasi sekolah/madrasah

Pencapaian hasil UN sekolah/madrasah dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan, sebagaimana tergambar pada tabel di atas, bukan merupakan dampak dari program CSR PT. Adaro Indonesia. Semua sekolah/madrasah pada tingkat SMP/MTs dan MA/SMA dilibatkan dalam bimbingan belajar sehingga hasil UN tersebut tidak dapat diklaim secara khusus sebagai dampak dari program CSR PT. Adaro Indonesia. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, nilai UN MAN 1 Paringin lebih tinggi daripada nilai rata-rata UN SMAN 1 Paringin yang sama-sama mengikuti bimbingan belajar.

Hal itu menunjukkan bahwa nilai yang dicapai sekolah/madrasah tidak terkait dengan program CSR tetapi berhubungan dengan faktor lain di sekolah/madrasah. Demikian, juga pada tingkat SMP/MTs, SMPN 3 Paringin dan MTsN Layap sama-sama terlibat dalam bimbingan belajar tetapi nilainya berbeda. Dengan kata lain, pada sekolah/madrasah tersebut dampak program CSR berbentuk bimbingan belajar tidak dapat dilihat per sekolah/madrasah tetapi dapat dilihat dari hasil se-kabupaten.

Demikian juga, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah. Program CSR tidak memberikan dampak bagi proses pembelajaran non akademik di sekolah/madrasah. Ekstra kurikuler yang lebih menekankan kepada pengembangan potensi siswa dalam bidang seni, olah raga, serta keterampilan tidak terlihat menjadi perhatian program CSR di Kabupaten Balangan. Oleh karena itulah, pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah/madrasah sangat tergantung pada sekolah/madrasah itu sendiri, bukan karena dukungan dari program CSR PT. Adaro Indonesia. Pada tabel di atas terlihat, SDN Dahai dan pada SMAN 1

Paringin tidak melaksanakan satu kegiatan Ekskul pun. Itu berbeda dengan sekolah/madrasah lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Ekskul. Pada MIN Layap melaksanakan dua jenis Ekskul : Pramuka dan UKS, MTsN Layap melaksanakan lima kegiatan ekskul : olahraga, Pramuka, kesenian, tilawah Alquran, dan kaligrafi, SMPN 3 Paringin melaksanakan empat kegiatan Ekskul : maulid habsyi, pramuka, olah raga, dan pengajian Alquran sedangkan MAN 1 Paringin melaksanakan dua Ekskul: Pramuka dan PMR.

Dalam konteks kualitas proses pendidikan, akreditasi sekolah/madrasah dapat dijadikan tolok ukur pencapaian delapan standar nasional pendidikan. Pada tabel 4.13 terlihat bagaimana peringkat akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini. MAN 1 Paringin dan SDN Dahai memperoleh peringkat akreditasi C sedangkan sekolah/madrasah lain meraih peringkat B. Peringkat akreditasi tersebut, paling tidak, menunjukkan tingkat kualitas pendidikan terkait dengan delapan standar nasional pendidikan. Lebih detil mengenai akreditasi sekolah/madrasah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.8
NILAI, PERINGKAT, TAHUN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH DI
KABUPATEN BALANGAN

NO	SEKOLAH/MADRASAH	NILAI	PERINGKAT	TAHUN
1	MIN Layap	82	B	31-12-2007
2	SDN Dahai	68	C	26-11-2009
3	MTsN Layap	81	B	26-11-2009
4	SMPN 3 Paringin	-	-	-
5	MAN 1 Paringin	58	C	9-11-2009
6	SMAN 1 Paringin	83	B	31-12-2007

Sumber : BAN Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Selatan tersedia <http://www.ban-sm.or.id/provinsi/kalimantan-selatan/akreditasi>

Pada tabel tersebut terlihat akreditasi sekolah/madrasah di Balangan bervariasi. Pada tingkat SD/MI, dapat dilihat SDN Dahai hanya mendapat nilai 68 pada akreditasi tahun 2009 sedangkan MIN Layap meraih peringkat B dengan nilai 82. SMPN 3 Paringin belum terakreditasi karena sekolah ini baru menerima siswa pada tahun 2008 sementara MTsN Layap mendapat nilai 81 dengan peringkat B. Pada tingkat SMA/MA, SMA 1 Paringin meraih peringkat B dengan nilai 83 pada tahun 2007. Nilai itu lebih baik daripada MAN 1 Paringin yang hanya mendapat 58 dengan peringkat C.

Seperti di awal dibagian ini, program CSR di Kabupaten Balangan lebih difokuskan pada bimbingan belajar sehingga program CSR tidak sampai langsung ke proses belajar mengajar di sekolah/madrasah. Oleh karena itulah, dapat

disimpulkan bahwa program CSR tidak memberikan dampak positif pada proses dan hasil pendidikan di Kabupaten Balangan.

b. Kabupaten Tabalong

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa program CSR di Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui LP3AP berupa kegiatan non fisik, sedangkan pembangunan sarana prasarana dibawah koordinasi langsung CSR PT. Adaro Indonesia. Alokasi CSR pendidikan di Tabalong sebesar Rp. 2.402.500.000,- . dan *special project* melalui LP3AP sebesar Rp. 2.142.857.143,- sehingga total alokasi untuk pendidikan di Tabalong pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.545.357.143,- atau 28,71% dari total dana CSR.

Terkait dengan dampak program CSR, ada pernyataan menarik terkait dampak program CSR PT. Adaro Indonesia bagi sekolah/madrasah di Kabupaten Tabalong. Pernyataan itu dikemukakan oleh seorang kepala sekolah, perempuan berusia menjelang 50 tahunan, yang dimutasi ke sekolah model. Pada saat pertama datang ke sekolah model tersebut responden langsung mempertanyakan dalam hatinya apa yang menjadi model. Menurut responden tidak ada yang istimewa dari sekolah tersebut. Itu menjadi sinyalemen awal bahwa program CSR yang telah berjalan tiga tahun di sekolah itu tidak memberikan dampak positif bagi proses pendidikan sekolah. Pada awalnya, kepala sekolah tersebut membayangkan bahwa sekolah model binaan PT. Adaro Indonesia adalah sekolah yang berkualitas dalam semua aspek, karena didukung oleh dana dari program CSR dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain.

1) Hasil dan Dampak Umum Program CSR Pendidikan

Hasil program CSR pendidikan di Kabupaten Tabalong lebih dapat dilihat pada sekolah model dan kegiatan lain yang dikelola oleh LP3AP dengan total alokasi 47.14% dari dana CSR pendidikan. Pada sekolah/madrasah lain, hasil yang dirasakan relatif sangat minim. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.9

HASIL DAN DAMPAK UMUM PROGRAM CSR PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABALONG

SEKOLAH/MADRASAH	HASIL	DAMPAK
MIN LIMAU MANIS	7 orang siswa menerima beasiswa	Meringankan biaya pendidikan siswa yang ditanggung orang tua
	Penyelesaian mushala madrasah	Warga sekolah dapat melaksanakan salat berjamaah dengan mudah
SDN LABURAN	Pagar sekolah	Peningkatan keindahan dan keamanan sekolah
	Mushala	Warga sekolah dapat melaksanakan salat berjamaah dengan mudah
	Ruang kelas	Proses pembelajaran lebih nyaman
	Lapangan basket mini	Siswa dapat berolahraga bola basket dan mengembangkan bakat
	Ruang Perpustakaan dan bahan pustaka	Siswa dapat meningkatkan wawasan yang mendukung proses pembelajaran
	1 unit komputer	Memudahkan penatausahaan sekolah
	Instalasi listrik	Penggunaan listrik untuk proses pendidikan dengan aman
	Peningkatan gizi siswa	Siswa lebih menyadari tentang kesehatan, terutama terkait dengan pentingnya makanan bergizi
	7 orang siswa menerima beasiswa	Meringankan biaya pendidikan siswa yang ditanggung orang tua
	Guru mengikuti workshop metode pembelajaran	Meningkatnya pengetahuan guru

MTs Ar Raudlah	1 unit komputer	Memudahkan tata usaha sekolah
SMPN 2 Tanta	8 unit komputer dan printer	Memudahkan tata usaha sekolah serta sarana pembelajaran tambahan bagi siswa
	3 unit laptop	Para guru dapat menggunakan sebagai media pembelajaran
	10 buah tempat sampah	Memudahkan membuang sampah sehingga kebersihan sekolah lebih terpelihara
	Sumur bor	Tidak berfungsi
	Guru mengikuti workshop metode pembelajaran	Meningkatnya pengetahuan guru
MAN 1 Tanjung	7 orang siswa menerima beasiswa	Meringankan biaya pendidikan siswa yang ditanggung orang tua
SMAN 1 Tanta	4 unit laptop	Para guru dapat menggunakan sebagai media pembelajaran
	2 unit proyektor	Para guru dapat menggunakan sebagai media pembelajaran
	Perpustakaan dan bahan pustaka	Siswa dapat meningkatkan wawasan yang mendukung proses pembelajaran
	Instalasi listrik	Penggunaan listrik yang lebih aman
	Peralatan laboratorium kimia	Siswa dapat melaksanakan praktikkum kimia untuk menunjang proses belajar mengajar
	Fasilitas WC	Kebersihan dan kesehatan warga sekolah
	Tandon air	Warga sekolah dapat menggunakan air bersih dengan mudah untuk kebersihan dan keperluan lain
	8 buah tempat sampah	Warga sekolah dapat dengan mudah membuang sampah sehingga kebersihan sekolah lebih terjaga
	Guru mengikuti workshop metode pembelajaran	Meningkatnya pengetahuan guru

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil program CSR lebih banyak dirasakan oleh sekolah-sekolah model, yaitu SDN Laburan, SMPN 2 Tanta, dan SMAN 1 Tanta. Sekolah/madrasah lain sangat minim merasakan hasil dari program CSR pendidikan. Pada tabel tersebut diatas, hasil yang diperoleh madrasah dari program CSR hanyalah beasiswa untuk 7 orang siswa, penyelesaian mushala, dan komputer. Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, hasil tersebut tidak berhubungan langsung dengan proses pembelajaran.

Pada sekolah model : SDN Laburan, SMPN 2 Tanta, dan SMAN 1 Tanta, hasil yang diperoleh relatif lebih banyak. Apabila dicermati, tidak semua hasil program CSR tersebut berdampak langsung bagi proses pendidikan serta prestasi akademik siswa. Hasil yang dapat berdampak pada proses pembelajaran adalah perpustakaan dan bahan pustaka, laptop dan proyektor, peralatan praktik laboratorim kimia, serta workshop guru. Secara khusus, mengenai dampak terhadap proses pendidikan akan digambarkan pada bagian berikut.

2) Dampak Program CSR Pendidikan Terhadap Proses Pendidikan

Program CSR pendidikan di Kabupaten Tabalong relatif lebih terlihat daripada di Kabupaten Balangan. Terutama terkait dengan pelaksanaan program CSR oleh LP3AP. Terkait dengan proses pendidikan, beberapa hasil yang dapat dilihat adalah perpustakaan keliling, workshop metode pengajaran untuk para guru, perpustakaan LP3AP, dan program pengembangan sekolah (yang dikenal sebagai sekolah model). Terkait dengan program LP3AP, program CSR tersebut memberikan hasil yang dapat dirasakan pihak sekolah secara langsung berupa

tersedianya bahan bacaan bagi siswa, bertambahnya pengetahuan guru dalam hal metode pembelajaran, dan hasil lain yang diterima terkait dengan program.

Seperti disebut diatas, sekolah-sekolah model relatif lebih banyak merasakan hasil program CSR di sekolah mereka. Akan tetapi, hasil yang diperoleh dari program CSR tidak memberikan dampak kepada proses pendidikan. Meskipun terbatas, digital proyektor dari program CSR berdampak bagi proses belajar mengajar yang digunakan sebagai media pembelajaran. Akan tetapi, penggunaan media tersebut masih terbatas karena jumlah perangkat tersebut tidak mencukupi.

Di samping itu, Keikutsertaan para guru dalam workshop yang dilaksanakan LP3AP ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap metode dalam proses belajar di sekolah model. Pada SDN Laburan dan MIN Limau Manis proses pembelajaran masih berlangsung secara “sederhana”. Metode yang dilakukan adalah ceramah dengan menggunakan papan tulis. Pada SDN Laburan, yang notabene sekolah model program CSR PT. Adaro Indonesia, pembelajaran dilakukan guru dengan ceramah dilengkapi dengan papan tulis (kapur) serta didukung buku pelajaran. Pada SD ini, workshop guru yang dilaksanakan oleh LP3AP tidak berdampak terhadap proses belajar mengajar di kelas. Hal itu tidak berbeda dengan proses belajar mengajar di MIN Limau Manis yang tidak sekolah model. Proses belajar mengajar di MIN Limau Manis berlangsung dengan metode ceramah menggunakan media papan tulis (kapur tulis) serta buku pelajaran. Guru-guru pada MIN ini tidak pernah mengikuti pada workshop-workshop yang dilaksanakan program CSR PT. Adaro Indonesia. Demikian juga

pada sekolah model model lain, berbagai workshop tidak menunjukkan dampak yang terlihat dalam proses belajar mengajar dikelas.

Jika dua lembaga pendidikan tersebut dibandingkan, dapat dikemukakan bahwa guru sekolah/madrasah yang mengikuti atau tidak mengikuti workshop/pelatihan tidak berbeda dalam mengajar di kelas. Metode pembelajaran yang digunakan tidak berbeda antara guru alumnus workshop/pelatihan dengan guru yang tidak pernah mengikuti. Dengan kata lain, program CSR yang dilaksanakan tidak berdampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Meskipun demikian, terkait workshop/pelatihan, guru yang pernah mengikuti mengakui bahwa kegiatan itu bermanfaat bagi guru. Salah satu hasil dari workshop adalah visi misi sekolah. Visi misi sekolah disusun setelah sekolah mengikuti workshop yang dilaksanakan LP3AP.

Pada tingkat SMA/MA, di SMAN 1 Tanta dan MAN 1 Tanjung terlihat beberapa orang menggunakan perangkat multimedia, khususnya digital proyektor. Akan tetapi, aplikasi workshop yang dilaksanakan sebagai bagian dari Program CSR tidak terlihat dengan jelas. Dengan kata lain, workshop belum bisa dikatakan berhasil meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pada SMAN 1 Tanta, proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah yang kadang-kadang dibantu dengan media digital. Sebagai sekolah binaan PT. Adaro Indonesia, implementasi hasil workshop pembelajaran tidak tampak dilaksanakan oleh para guru. Demikian juga pada MAN 1 Tanjung yang tidak diikuti dalam program CSR PT. Adaro Indonesia.

Dampak lain yang berhubungan dengan proses pembelajaran adalah berupa perpustakaan serta bahan pustaka, dan peralatan laboratorium kimia. SDN Laburan dan SMAN 1 Tanta dapat merasakan dampak terkait dengan perpustakaan. Para siswa dapat membaca dan menambah wawasan dari buku-buku tersebut. Demikian juga hasil berupa peralatan laboratorium kimia, para siswa SMAN 1 Tanta dapat melakukan praktikkum kimia yang dapat mendukung keberhasilan proses pendidikan.

Bagi sekolah/madrasah yang bukan sekolah model, hasil yang dirasakan mereka sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. MIN Limau Manis, MTs Ar Raudlah, dan MAN 1 Tanjung sangat sedikit merasakan manfaat langsung program CSR, kecuali MIN Limau Manis yang mendapat bantuan untuk mushala dan komputer yang diterima MTs Ar Raudlah. Hal itu, tidak berdampak bagi proses belajar mengajar. Dengan kata lain, program CSR pada madrasah-madrasah tersebut tidak menunjukkan hasil serta dampak pada proses belajar mengajar.

Hal lain yang berhubungan dengan proses pendidikan non akademik kegiatan ekstra kurikuler. Pada sekolah model dan non model dalam penelitian ini tidak menunjukkan hasil serta dampak dari program CSR pendidikan. Seperti halnya di Kabupaten Balangan, program CSR tidak memberikan perhatian kepada kegiatan Ekskul sebagai upaya mengasah kecerdasan non akademik siswa. Oleh karena itulah, pelaksanaan kegiatan Ekskul di sekolah/madrasah tidak bisa dianggap sebagai hasil dari program CSR pendidikan. Dengan demikian, prestasi non akademik siswa-siswa juga tidak dapat diklaim sebagai hasil dari program

CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia. Mengenai jumlah Ekskul pada sekolah dan madrasah dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11.

3) Dampak Program CSR Pendidikan Terhadap Prestasi Akademik Siswa

Berbeda dengan Kabupaten Balangan yang melaksanakan bimbingan belajar oleh Primagama, Kabupaten Tabalong lebih mengutamakan proses pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dengan pelaksanaan workshop untuk para guru sekolah model. Peningkatan kualitas guru tersebut diharapkan memberikan dampak bagi prestasi akademik siswa. Pertanyaan yang cukup menarik pada bagian ini adalah apakah program CSR yang dilaksanakan di Kabupaten Tabalong, khususnya di sekolah model berdampak positif bagi hasil pendidikan? Dampak secara umum dapat dilihat dari pencapaian rata-rata UASBN/UN di tingkat kabupaten serta di tingkat sekolah/madrasah. Sekolah model PT. Adaro Indonesia yang menjadi *epicentrum* program CSR pendidikan dapat menjadi pembanding bagi sekolah/madrasah lain yang bukan sekolah model. Dengan perbandingan itu dapat dilihat apakah program CSR memberikan dampak yang konsisten dan terlihat bagi peningkatan prestasi siswa.

Secara umum, pencapaian ujian UASBN/UN Kabupaten Tabalong selama dua tahun tidak menunjukkan adanya dampak yang positif dari program CSR PT. Adaro Indonesia. Hal itu logis terjadi karena program CSR pendidikan lebih berkonsentrasi pada sekolah-sekolah model sehingga tidak menyebar merata sebagaimana di Kabupaten Balangan yang melaksanakan Bimbel untuk seluruh

siswa yang mengikuti UN. Rata-rata UASBN/UN tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.10
RATA-RATA NILAI UASBN/UN KABUPATEN TABALONG SERTA
PERINGKAT SE-KALIMANTAN SELATAN

NO	TINGKAT	2007		2008		2009		2010		2011	
		RATA2	RANK	RATA2	RANK	RATA2	RANK	RATA2	RANK	RATA2	RANK
1	SD/MI	5,75	-	5,98	10	6	10	6,38	9	6,43	-
2	SMP/MTs/SMPT	6,8	-	7,1	-	7,11	6	7,16	10	7,22	11
3	SMA/MA	6,43	-	6,54	-	6,94	9	6,98	11	7,61	-

Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas (2009, 2010) dan Direktorat Pembinaan TK dan SD (2010)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata nilai UASBN/UN Kabupaten Tabalong cenderung meningkat. Pada tahun 2009, pada tingkat SD/MI rata-rata UASBN yang diraih adalah 6,01 peringkat ke-9 Kalimantan Selatan dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi 6,38 pada peringkat 9 se-Kalimantan Selatan. Pada tingkat SMP/MTs, hasil UN di tahun 2009 adalah 7,11 peringkat 6 se-Kalimantan Selatan dan meningkat menjadi 7,16 di tahun berikutnya tetapi peringkat menurun menjadi ke-10 se-Kalimantan Selatan. Tingkat SMA/MA nilai UN yang capai adalah 6,94, peringkat 9 se-Kalimantan Selatan dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi 6,98, tetapi peringkat se-Kalimantan Selatan menurun menjadi peringkat ke-11.

Di Kabupaten Tabalong, dampak program CSR lebih tepat jika dilihat dari perbandingan sekolah model dengan non model. Perbandingan prestasi

akademik siswa, akreditasi dan kegiatan non akademik siswa, antara sekolah model dan madrasah non model tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4.11
RATA-RATA NILAI UASBN/UN SEKOLAH/MADRASAH DAN EKSKUL
DI KABUPATEN TABALONG

NO	SEKOLAH/MADRASAH	UN				EKSKUL
		2008	2009	2010	2011	
1	MAN 1 Tanjung	7,12	7,23	6,92	7,11	4
2	SMAN 1 Tanta	6,56	6,76	7,23	7,78	1
3	MTs Ar Raudlah	6,6	6,77	7,62	7,59	3
4	SMPN 2 Tanta	7,2	7,46	6,89	6,68	0
5	MIN Limau Manis	4,7	4,81	6,47	7,54	3
6	SDN Laburan	5,21	5,31	5,86	6,39	1

Sumber : Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendiknas (2010), Dokumentasi sekolah/madrasah

Pada tabel tersebut terlihat dampak dari Program CSR bagi sekolah/madrasah. Program CSR pendidikan tidak berdampak bagi nilai UN sekolah model program CSR pendidikan. MIN Limau Manis yang bukan sekolah model melaksanakan tiga kegiatan ekstrakurikuler dan lebih aktif daripada SDN Laburan yang hanya melaksanakan satu kegiatan ekstrakurikuler. MTs Ar Raudlah dengan rata-rata nilai UN 7,62 serta melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler tiga jenis yang lebih baik daripada SMPN 2 Tanta dengan rata-rata nilai UN 6,89. Selain itu, SMPN 2 Tanta yang merupakan sekolah model ini tidak melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Pada tingkat SMA/MA dapat dilihat

bahwa MAN 1 Tanjung meraih nilai UN 6,89 dan melaksanakan Ekskul empat jenis kegiatan. Nilai UN tersebut lebih rendah daripada nilai UN SMAN 1 Tanta, yang merupakan sekolah model. Namun, SMAN 1 Tanta hanya melaksanakan kegiatan Ekskul satu kegiatan: Pramuka.

MTs Ar Raudlah dalam tabel tersebut memiliki kegiatan ekskul yang relatif banyak jika dibandingkan dengan sekolah lain. Akan tetapi, sekolah ini belum terakreditasi sejak berdiri tahun 1985. Tentang akreditasi ini, kepala madrasah menceritakan, “kami sudah memohon untuk akreditasi ke Diknas Kabupaten Tabalong, tetapi menurut mereka kouta untuk kabupaten telah habis. Mungkin itu terkait dengan dana akreditasi yang disediakan Dinas Pendidikan untuk proses akreditasi tersebut belum tersedia”. Meskipun keadaan gedung madrasah tidak memadai, jika dilihat dari kelengkapan administrasi sekolah, MTs ini relatif lebih teratur daripada SMPN 2 Tanta. Hal itu tergambar dari mudahnya menemukan data-data sekolah yang mereka himpun pada map arsip.

Hal itu berhubungan dengan kepala madrasah yang selalu berusaha mengembangkan madrasah. Kepala MTs Ar Raudlah adalah seorang lelaki berusia menjelang 40 tahun dan berpendidikan S-1 Pendidikan Agama Islam. Kepala madrasah yang lebih inovatif sangat berpengaruh bagi kemajuan sekolah. Dalam konteks itu, penelitian ini melihat bahwa sekolah/madrasah yang tidak mendapat bantuan dari program CSR bisa saja lebih baik daripada sekolah yang mendapat bantuan jika dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang inovatif.

Dalam konteks kualitas sekolah/madrasah, terutama di Indonesia, akreditasi sekolah/madrasah dapat dijadikan tolok ukur. Pada tabel 4.12 dapat

dilihat peringkat akreditasi sekolah/madrasah tersebut. Oleh karena itulah, dampak program CSR juga dapat dilihat dari perbandingan hasil akreditasi sekolah model yang menjadi program CSR pendidikan dengan sekolah non model. Sekolah-sekolah model yang mendapat sokongan dari program CSR PT. Adaro Indonesia ternyata memiliki peringkat akreditasi yang sama dengan madrasah. SDN Laburan meraih peringkat B sedangkan MIN Limau Manis juga meraih peringkat B. Demikian juga, SMAN 1 Tanta dan MAN 1 Tanjung. Dua sekolah ini juga mendapat peringkat B. Lebih detil mengenai akreditasi sekolah/madrasah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.12
NILAI, PERINGKAT, TAHUN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH DI
KABUPATEN TABALONG

NO	SEKOLAH/MADRASAH	NILAI	PERINGKAT	TAHUN
1	MAN 1 Tanjung	83	B	9 -11-2009
2	SMAN 1 Tanta	78	B	23-11-2010
3	MTs Ar Raudlah	-	-	-
4	SMPN 2 Tanta	82	B	23-11-2010
5	MIN Limau Manis	75	B	31-12-2007
6	SDN Laburan	80	B	26-11-2009

Sumber : BAN Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Selatan tersedia <http://www.ban-sm.or.id/provinsi/kalimantan-selatan/akreditasi>

Pada tabel diatas dapat dilihat secara lebih detil bagaimana nilai akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini. Sekolah model : SMPN 2 Tanta, serta SDN Laburan lebih baik nilai akreditasinya daripada madrasah yang bukan sekolah model, meskipun peringkatnya sama. Akan tetapi, sekolah model

masa berlaku akreditasi akan kadaluarsa lebih belakangan daripada madrasah non model. SDN Laburan misalnya, meraih akreditasi B pada tanggal 26 November 2009, sedangkan MIN Limau Manis telah terakreditasi B pada tahun 2007. Jika masa berlaku akreditasi sekolah lima tahun sejak ditetapkan, status terakreditasi MIN Limau Manis akan berakhir pada tahun 2012, sedangkan akreditasi SDN Laburan akan habis masa berlakunya pada tahun 2014.

Berbeda dengan itu, nilai akreditasi sekolah model pada tingkat SMAN lebih rendah daripada madrasah non model. MAN 1 Tanjung yang model program CSR tetapi nilai yang diraihnya lebih baik : 83 dari pada SMAN 1 Tanta yang meraih nilai akreditasi 78, meskipun sama-sama meraih peringkat B. Jika melihat nilai akreditasi tersebut, terutama pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, program CSR tampak memiliki dampak terhadap akreditasi sekolah/madrasah. Meskipun demikian, dampak tersebut terlihat tidak konsisten pada setiap jenjang pendidikan. Dampak terlihat pada tingkat SD dan SMP tetapi tidak terlihat pada tingkat SMA.

Mencermati beberapa aspek yang telah dijelaskan pada bagian ini, Program CSR tidak konsisten menunjukkan hasil dalam peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di Kabupaten Tabalong. Dengan kata lain, pengeluaran dana CSR yang besar untuk pembiayaan pendidikan di dua kabupaten tersebut tidak sebanding dengan output yang dihasilkan.

8. Rangkuman Hasil Penelitian

Pada bagian ini telah dijelaskan permasalahan dalam pengelolaan dana CSR pendidikan PT Adaro Indonesia di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Permasalahan tersebut adalah

- a. Pada fase perencanaan anggaran, peran tim perumus (pemerintah kabupaten) sangat besar sehingga sekolah/madrasah hampir tidak terlibat pada fase ini. Hal itu menyebabkan distribusi dan alokasi tidak tepat sasaran, bahkan terjadi pemborosan. Implikasi lebih jauh adalah kebutuhan nyata sekolah/madrasah untuk peningkatan kualitas pembelajaran tidak menjadi pertimbangan dalam perencanaan.
- b. Mekanisme dan proses penyaluran dana CSR tidak memiliki pedoman/standar atau kriteria yang dapat menjadi ukuran pelaksanaan tahapan tersebut. Hal itu menyebabkan seluruh program dilaksanakan hanya berdasarkan keinginan pihak yang mendapat bantuan dana dari program CSR pendidikan.
- c. Sebagai implikasi dari fase perencanaan tersebut, distribusi dan alokasi tidak berdasarkan pertimbangan apakah wilayah tersebut merupakan terdampak operasional atau tidak. Selain itu, ditemukan pula sekolah dan madrasah di desa terdampak yang mayoritas siswanya dari desa terdampak tidak mendapat alokasi dana CSR. Di sisi lain, distribusi dan alokasi lebih banyak diberikan kepada pihak ketiga serta lembaga yang bukan sekolah/madrasah, seperti PAUD/TK, TKA/TPA dan pengajian.

- d. Penggunaan oleh pihak ketiga (Primagama, LP3AP, dan GNOTA) menjadi pemicu biaya (*cost driver*) sehingga alokasi yang benar-benar sampai untuk program CSR di sekolah/madrasah berkurang. Hal itu akan berdampak bagi menurunnya kualitas program dan hasil dari program tersebut.
- e. Pertanggungjawaban tidak diumumkan kepada publik (siswa, orang tua, guru, dan masyarakat) sebagai bentuk transparansi. Pertanggungjawaban tersebut tidak pernah diperiksa oleh auditor ke lapangan untuk memastikan akuntabilitas laporan.
- f. Pengawasan program CSR pendidikan tidak dilakukan dengan maksimal sejak proses perencanaan sampai penggunaan. Camat yang bertanggungjawab sebagai pengawas tidak melaksanakan tugasnya dalam program CSR pendidikan. Pengawasan dilakukan oleh CSR PT Adaro Indonesia dalam hal pembangunan fisik serta oleh LP3AP terkait workshop/pelatihan guru dalam pembelajaran di sekolah. Keterlibatan publik dalam pengawasan ini juga tidak ada sehingga dana CSR tersebut dimanfaatkan tanpa ada kontrol dari pihak luar.
- g. Hasil program CSR yang dirasakan sekolah/madrasah tidak mendukung proses belajar mengajar secara maksimal sehingga program CSR sangat hanya sedikit berdampak pada proses dan hasil pendidikan. Jika ditinjau dari proses pendidikan, prestasi akademik siswa dan akreditasi sekolah tidak tergambar secara konsisten bahwa program CSR memberikan dampak positif terhadap pendidikan di sekolah/madrasah sebagaimana yang diharapkan.

B. Pembahasan

Bagian ini merupakan analisis dari penyajian hasil temuan penelitian yang telah digambarkan pada bagian terdahulu. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan beberapa persoalan yang menjadi temuan penelitian terkait dengan pengelolaan bantuan dana dari program CSR bidang pendidikan PT. Adaro Indonesia. Temuan tersebut dilihat dari perspektif administrasi pendidikan dan ilmu lain relevan.

1. Proses Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Program CSR Pendidikan

Pada tahap perencanaan, bantuan dana pendidikan (program CSR Pendidikan) PT. Adaro Indonesia sangat ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Tim perumus yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten memutuskan distribusi dan alokasi program CSR per tahun. Pada susunan tim perumus sangat jelas terlihat sangat dominannya posisi pemerintah kabupaten dalam fase perencanaan anggaran program CSR dan rendahnya partisipasi serta peran sekolah/madrasah pada fase tersebut. Dominannya pemerintah kabupaten ini didasari sikap perusahaan yang ingin bersinergi dengan pembangunan daerah serta menghindari *overlapping* program.

Oleh karena itu, kebijakan PT. Adaro Indonesia, terkait CSR, antara satu kabupaten dengan kabupaten lain bisa saja berbeda karena perbedaan kebijakan pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, ada perbedaan program CSR di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Di Kabupaten Balangan, pemerintah kabupaten cenderung mengalokasikan *special project* Rp. 3.000.000.000,- untuk membiayai bimbingan belajar oleh Primagama. Berbeda

dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong lebih cenderung untuk melibatkan LP3AP (sekarang : YABN) dalam *special project* dengan alokasi sebesar Rp. 2.142.857.143,- untuk melaksanakan program pendidikan berupa workshop untuk guru, siswa, serta perpustakaan keliling.

Dalam kerangka otonomi daerah yang mengharuskan pemilihan langsung (baca: Pemilukada), program CSR sangat rentan dengan kepentingan politik penguasa, terutama calon *incumbent*. Bupati yang mencalonkan kembali akan bisa memanfaatkan prosedur dan mekanisme ini untuk memberikan kepada satu pihak untuk kepentingan kampanye. Pihak PT. Adaro Indonesia, dalam hal ini YABN, tidak begitu peduli. Salah satu pimpinan YABN mengatakan, “terserah pihak kabupaten. Kalau bupatinya jeli bisa saja itu digunakan untuk kepentingan politik. Saya pribadi tidak terlalu merisaukan itu”. Dengan kata lain, keterlibatan pemerintah kabupaten dalam mekanisme dan prosedur penyaluran program CSR tersebut akan berimplikasi adanya kepentingan politik (Pemilukada) dalam pemberian dana CSR.

Pada bagian hasil penelitian telah disebutkan bahwa tim perumus sangat berperan dalam menetapkan program yang akan didanai oleh program CSR dan merupakan kebijakan pemerintah kabupaten. Sangat mungkin, tim perumus merupakan bentuk akomodasi perusahaan terhadap aspirasi pemerintah. Dominannya peran pemerintah kabupaten pada perencanaan anggaran program CSR ini juga menyebabkan program CSR hanya untuk kepentingan pemerintah kabupaten, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Pada bidang pendidikan, pemerintah kabupaten hanya mementingkan lembaga pendidikan yang berada pada wewenang mereka : sekolah. Sementara madrasah, lembaga pendidikan yang tidak menjadi bagian otonomi daerah, tidak diperhatikan secara proporsional. Hal itu dapat dilihat pada alokasi dana CSR PT. Adaro Indonesia yang tidak ada didistribusikan ke madrasah pada tahun 2010 di Kabupaten Balangan, dan hanya satu madrasah mendapat alokasi di Kabupaten Tabalong.

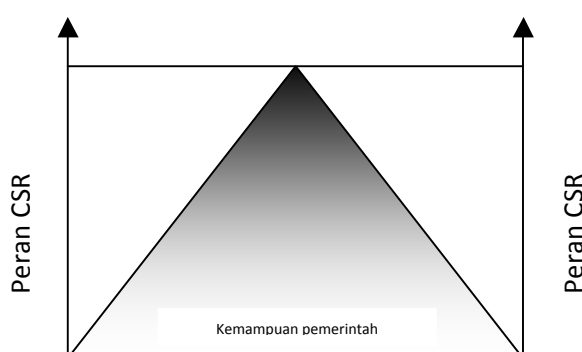
Hal itu, tentu saja, berhubungan dengan tidak dilibatkannya pihak Kemenag Kabupaten Balangan dan Tabalong dalam susunan tim perumus. Pada susunan tim perumus yang di atas, tidak ada satupun yang dapat mewakili aspirasi madrasah dalam penetapan anggaran program CSR PT. Adaro Indonesia. Oleh karena itulah, usulan-usulan proposal madrasah tidak ada yang memperjuangkan di rapat tim perumus. Madrasah dilibatkan dalam konteks kerja sama dengan IAIN Antasari. Itupun hanya satu madrasah per kabupaten.

Seperti telah disebut di atas, pada struktur pengurus tim perumus pemerintah terlihat akan sangat dominan dalam menetapkan program. Hampir seluruh tim perumus adalah aparat pemerintah sehingga program akan lebih berpihak terhadap kebijakan pemerintah kabupaten, bukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itulah, sangat dimungkinkan misalnya, pemerintah akan membagi rata program CSR pada seluruh wilayah kabupaten tanpa mempertimbangkan “wilayah terdampak” operasi perusahaan. Fenomena itu berlawanan dengan prioritas yang ditetapkan PT. Adaro Indonesia.

Persoalan bagaimana peran pemerintah dalam CSR telah dikemukakan oleh Frynas (2009 : 169). Menurutnya, bagaimana kondisi pemerintah menentukan bagaimana hak dan tanggung jawab perusahaan. Pemerintah yang tidak mampu menyediakan kebutuhan publik dan peraturan yang efektif sangat memerlukan dukungan CSR dalam menyediakan fasilitas publik untuk masyarakat. Publik akan mengharapkan perusahaan untuk mengisi kelemahan pemerintah tersebut. Sebaliknya, kebutuhan atas perusahaan akan lebih rendah pada pemerintah yang berhasil dalam menyediakan kebutuhan publik. Selain itu, menurut Frynas, di mana pemerintah yang berhasil dalam membuat dan menjalankan peraturan kelestarian lingkungan, CSR tidak diperlukan. Itulah argumen mengapa Brazil Petrobras (BP) tidak melaksanakan CSR di Algeria, tetapi BP menggunakan jutaan dolar untuk CSR di Angola. (Frynas, 2009 : 52)

Peran pemerintah dalam CSR dapat dilihat pada gambar berikut

GAMBAR 4.3
KEMAMPUAN PEMERINTAH DAN PERAN PROGRAM CSR



Sumber : Dikembangkan dari Frynas (2009)

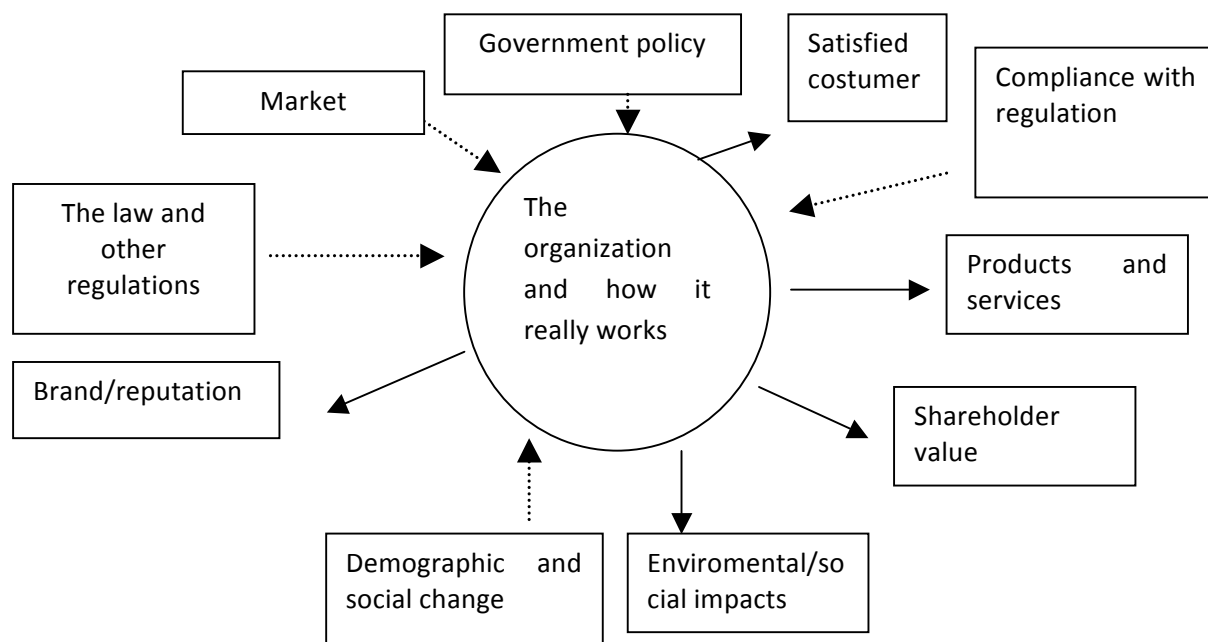
Pada gambar tersebut terlihat bahwa dalam kondisi pemerintah yang memiliki kemampuan dan berhasil dalam penyediaan kebutuhan publik bagi

masyarakat, peran CSR perusahaan tidak begitu diharapkan. Sebaliknya, peran program CSR sangat dituntut ketika pemerintah tidak mampu dan gagal dalam menyediakan fasilitas publik untuk masyarakat. Di Nigeria misalnya, perusahaan minyak dan gas ditekan pemerintah untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Di Saudi Arabia, Kuwait, dan Mesir, perusahaan produser minyak tidak dituntut dan ditekan untuk berperan banyak karena negara telah menyediakan kebutuhan publik dengan sangat baik. Manager perusahaan minyak di Mesir mengatakan bahwa mereka memberikan beberapa donasi tetapi pemerintah telah melakukan itu. (Frynas, 2009) Kaitannya dengan CSR Adaro, pemerintah kabupaten masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan publik.

Oleh karena itulah, program CSR memang tepat untuk mengisi kelemahan pemerintah tersebut. Pada bidang pendidikan misalnya, pemerintah kabupaten memiliki sumber daya yang terbatas sehingga tidak dapat menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk semua sehingga program CSR sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah dapat menekan pihak perusahaan untuk turut serta dalam menyediakan fasilitas publik, terutama pada pemerintahan yang tidak menyediakan fasilitas tersebut.

Posisi pemerintah tersebut terkait dengan kebijakan serta regulasi dimana perusahaan beroperasi. Posisi pemerintah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut

GAMBAR 4.4
POSISI PEMERINTAH BAGI PERUSAHAAN



Sumber : Rosam and Rob Peddle (2004 : 5)

Perdebatan sebenarnya pada level apa pemerintah dalam program CSR. Apakah pemerintah seharusnya terlibat dalam penetapan program, distribusi dan alokasi anggaran? Atau pemerintah bertindak sebagai pembuat regulasi terkait lingkungan hidup dan peraturan lain misalnya pajak sementara program CSR menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan?

Pada satu sisi, keterlibatan pemerintah kabupaten sangat tepat dalam program CSR ini agar program CSR dialokasikan untuk sesuatu yang mereka tidak mampu menyediakannya. Akan tetapi, pada sisi lain keterlibatan pemerintah yang terlalu dominan pada penganggaran membawa CSR masuk dalam kepentingan politik penguasa.

Terkait dengan pembahasan tersebut, ada dua hal yang harus dicermati terkait keterlibatan pemerintah dalam mekanisme dan proses penyaluran.

a. Penegasan Prioritas CSR Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak operasional terhadap wilayah sekitar. (Aras and Crowther, 2009, Frynas, 2009) CSR tidak dilaksanakan karena tekanan peraturan atau permintaan pemerintah, tetapi didasari oleh kesadaran perusahaan sebagai bagian dari usaha keberlanjutan dari perusahaan. Solihin (2009) yang mengutip *The Commission for European Communities*, menegaskan bahwa CSR tidak hanya terbatas sebagai melaksanakan kewajiban yang dibebankan peraturan hukum yang berlaku, tetapi merupakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum serta melakukan investasi lebih dibidang *human capital*, lingkungan hidup, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Terkait dengan itu, program CSR PT. Adaro Indonesia merupakan cerminan tanggung jawab PT. Adaro Indonesia terhadap dampak operasional tambang terhadap masyarakat sekitar, tidak karena tekanan peraturan hukum yang berlaku. Program CSR PT. Adaro Indonesia tidak bisa dilepaskan dari desa-desa dengan katagori Ring 1 dan Ring 2 sebagai prioritas utama pelaksanaan CSR perusahaan. Prioritas tersebut harus ditegaskan dalam bentuk standar tertulis yang jelas dan dipegang oleh tim perumus. Dengan demikian, dana CSR akan mengalir kepada yang memang berhak dan sesuai dengan dasar filosofis CSR tersebut.

Prioritas tersebut menjadi kabur ketika fase perencanaan didominasi pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten cenderung untuk memposisikan semua wilayah mereka sama tanpa mempertimbangkan prioritas yang telah ditetapkan perusahaan dan membagi rata program CSR ke semua wilayah kabupaten. Ironisnya, sekolah/madrasah yang berada ring I bisa saja tidak tersentuh program CSR karena pemerintah kabupaten melihat sekolah/madrasah tidak memiliki urgensi untuk mendapat bantuan dari CSR. Dengan kata lain, keberpihakan PT. Adaro Indonesia terhadap siswa yang berada di sekitar tambang menjadi samar ketika kebijakan pemerintah kabupaten tidak memperhatikan prioritas yang sebenarnya menjadi pegangan perusahaan. Dua contoh yang dapat mengkonfirmasi itu adalah

1) Kasus Bimbingan Belajar Primagama di Kabupaten Balangan

Bimbingan Belajar Primagama telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan diklaim menjadi faktor utama keberhasilan siswa dalam UN di Kabupaten Balangan. Semua siswa kelas IX MTs/SMP dan kelas XII MA/SMA/SMK di seluruh kabupaten berhak ikut serta dalam bimbingan belajar tersebut. Kasus ini dengan sangat jelas menunjukkan program CSR telah dibagi rata kepada semua siswa di kabupaten tanpa memperhatikan tempat tinggal siswa. Kebijakan tersebut juga membelakangi prinsip prioritas yang telah ditetapkan oleh PT. Adaro Indonesia.

Penunjukkan langsung Primagama tersebut didasari alasan bahwa bimbingan belajar merupakan bidang yang sangat khusus serta spesifik dan hanya Primagama yang beroperasi di Balangan. Dua hal itulah yang membolehkan

dilakukan penunjukkan langsung meskipun PT. Adaro Indonesia pada dasarnya mengharuskan dilaksanakan proses lelang (tender). Pada tahun 2010, program bimbingan belajar tersebut diikuti oleh 1448 orang siswa tingkat MTs/SMP di Kabupaten Balangan dan 589 siswa pada tingkat MA/SMA. Dengan demikian, jumlah total peserta UN tahun 2010 di Kabupaten Balangan adalah 2037 orang siswa dengan total alokasi dana Rp. 3.000.000.000,-. dengan *unit cost* sebesar Rp. 1.472.754, 5 per siswa. Alokasi untuk Primagama ini akan didiskusikan lebih pada bagian selanjutnya.

2) Kasus SDN Dahai Balangan dan SDN Padang Panjang Tabalong

Dua SDN ini merupakan SDN yang terletak di desa Ring 1 operasional tambang. Hal itu berarti SDN ini merupakan prioritas bagi program CSR Adaro. Akan tetapi, kedua sekolah tersebut tidak tersentuh program CSR secara proporsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 SDN Dahai Balangan hanya menerima tas, seragam dan peralatan sekolah 134 buah yang kemudian diserahkan kepada seluruh siswa. Pada tahun-tahun sebelumnya, sekolah menerima bantuan pengecatan ruang kelas dan pemasangan instalasi air bersih. Pihak sekolah pernah membuat proposal untuk sarana prasarana multimedia tetapi sampai awal tahun 2011 tidak ada kejelasan status permohonan tersebut.

Sekolah ini sangat merasakan dampak operasional tambang. Pada dinding salah satu ruang kelas SDN Dahai terlihat retakan yang cukup lebar akibat kegiatan belasting yang dilakukan PT. Adaro Indonesia sekitar tahun 2008. Retakan di kelas lain sudah diperbaiki oleh pihak sekolah. Tidak jelas mengapa

sampai sekarang pihak sekolah tidak mengupayakan untuk merehabilitasi dinding tersebut. Pihak SDN Dahai bisa saja memperbaiki dinding yang retak tersebut dengan dana BOS atau sumber lain sepertinya halnya retakan dinding di kelas lain. Selain retakan dinding lebih besar, pihak sekolah juga terkesan sengaja membiarkan kerusakan tersebut. Retakan pada dinding sekolah juga dapat ditemui di kantor ruang guru SDN Padang Panjang 1 Tabalong. Jika dibandingkan dengan SDN Laburan, sekolah ini pun tidak tersentuh program CSR Adaro secara proporsional. Terkait dengan itu, pemilihan SDN Laburan sebagai sekolah model di Tabalong dapat dipertanyakan.

b. Keterlibatan Sekolah/madrasah pada Fase Perencanaan Anggaran

Pada bagian terdahulu telah ditegaskan bahwa perencanaan anggaran serta program CSR merupakan prerogatif pemerintah kabupaten melalui tim perumus. Dominannya pemerintah kabupaten pada fase perencanaan anggaran tidak memberikan peluang kepada sekolah/madrasah untuk berpartisipasi dalam fase tersebut. Pihak sekolah/madrasah hanya mengirim proposal permintaan bantuan dana untuk pembangunan fisik/pengadaan barang, tidak berperan dalam merancang program berdasarkan kebutuhan mereka. Oleh karena itulah, program CSR sering tidak bisa berjalan dengan baik ketika harus diimplementasikan pada proses belajar mengajar di sekolah. Beragam workshop yang di laksanakan LP3AP, seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, sangat sulit dipraktikkan oleh guru karena beragam persoalan. Hal itu tidak akan terjadi jika program workshop tersebut di dasari oleh perencanaan yang melibatkan pihak sekolah/madrasah.

Konteksnya dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan CSR Adaro tersebut, terutama pada fase perencanaan, keterlibatan madrasah/sangat penting. Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah memberikan otonomi yang sangat luas bagi sekolah dalam proses perencanaan di sekolahnya. Kajian perencanaan pendidikan memberitahukan bahwa perencanaan pendidikan dimulai dengan menentukan masalah. (Banghart & Albert, 1973) Bagaimanapun juga Sekolah/madrasah lebih memahami persoalan apa saja yang menghambat proses belajar di lembaga mereka. Perencanaan program CSR yang tidak melibatkan sekolah/madrasah menjadi satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan program CSR bidang pendidikan.

Pada publikasi CSR PT. Adaro Indonesia disebutkan mekanisme perencanaan program CSR yang selama ini dilaksanakan juga melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, proposal masyarakat/individu, serta hasil penelitian. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas, untuk tidak mengatakan tidak ada, sekolah/madrasah tidak pernah diajak diskusi secara khusus tentang bagaimana sebaiknya program CSR pendidikan dikelola.

Melibatkan sekolah/madrasah dalam proses perencanaan memunculkan dilema. Sekolah/madrasah akan berharap seluruh kebutuhan sekolah/madrasah mendapat alokasi dari program CSR tanpa berupaya mengefektifkan sumber daya yang sudah tersedia di sekolah/madrasah. Selama perbincangan dengan para kepala sekolah/madrasah dan guru menunjukkan fenomena lain. Sekolah/madrasah yang dikunjungi dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. *Pertama*, kepala sekolah/madrasah serta guru yang

kecewa dengan program CSR. Mereka tampak menaruh harapan yang terlalu besar terhadap program CSR. Bayangan mereka tentang CSR adalah tentang banyaknya dana yang akan mereka terima sehingga mereka cenderung menyalahkan perusahaan ketika sekolah/madrasah tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah.

Kedua, kelompok yang tidak berharap dengan program CSR dan menggunakan secara efektif dana yang mereka miliki. Kondisi sekolah/madrasah ini cenderung lebih baik daripada kelompok pertama. Kebersihan lingkungan, keindahan, program ekstra kulikuler, administrasi sekolah/madrasah relatif lebih baik dari kelompok pertama. Responden pada sekolah/madrasah ini relatif tidak bersikap apriori terhadap program CSR PT. Adaro Indonesia meskipun sekolah/madrasah mereka tidak mendapat alokasi program CSR.

Jika sekolah/madrasah dilibatkan dalam fase perencanaan, kelompok pertama akan berharap sepenuhnya kepada program CSR untuk semua persoalan di lembaga mereka. Mereka akan meminta segalanya dari program CSR tanpa usaha keras untuk memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. Pada kondisi ini, karena keterbatasan waktu dan tenaga pihak perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memutuskan program apa yang harus dilaksanakan di sebuah sekolah/madrasah.

Bukti lain yang dapat menegaskan bahwa perencanaan program CSR tidak melibatkan sekolah/madrasah dan cenderung mengabaikan kebutuhan sekolah/madrasah adalah kasus rencana pembangunan perpustakaan SMPN 2 Tanta. Program CSR berencana membangun sebuah perpustakaan di SMPN 2

Tanta dan sudah pada tahap pengukuran lahan. Akan tetapi, ternyata sekolah telah memiliki perpustakaan, pembangunan pun dibatalkan. Pihak sekolah pun meminta untuk diganti dengan bangunan laboratorium, tetapi tidak dikabulkan. Hal itu tentu tidak akan terjadi jika pembangunan tersebut berbasis kebutuhan sekolah yang belum memiliki bangunan laboratorium.

Minimnya keterlibatan sekolah/madrasah dalam proses perencanaan ini bertolak belakang dengan trend desentralisasi dalam *school based management* (SBM). Manajemen berbasis sekolah merupakan desentralisasi kewenangan ke tingkat sekolah. World Bank (2009) menyebutkan bahwa SBM akan meningkatkan outcome pendidikan dengan beberapa alasan pertama, SBM Akan meningkatkan akuntabilitas kepala sekolah dan guru bagi siswa, orang tua, dan guru. Mekanisme akuntabilitas yang menempatkan publik pada pusat pelayanan dan meningkatkan outcome dengan memfasilitasi partisipasi dalam pelayanannya. *Kedua*, SBM akan memberikan kesempatan pada penentu kebijakan lokal untuk memutuskan input yang tepat dan kebijakan yang sesuai realitas dan kebutuhan lokal. Dua temuan menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang kepada sekolah tersebut memberikan dampak terhadap hasil skor ujian. Jumlah keputusan yang dibuat di level sekolah akan berdampak terhadap hasil skor ujian. (King and Ozler, 1998 & Ozleer, 2001)

Proses perencanaan kegiatan yang tidak melibatkan sekolah tersebut akan mengabaikan kebutuhan dan realitas sekolah. Salah satu kritik terhadap CSR di beberapa negara adalah perhatian yang tidak sesuai dengan kenyataan politik, ekonomi, dan masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Di Nigeria misalnya,

prioritas CSR adalah investasi sosial pada infrastruktur misalnya jalan, rumah sakit, dan pusat pelayanan masyarakat. Itu tidak sesuai dengan masalah nyata masyarakat seperti lingkungan, korupsi, kurangnya akuntabilitas, kemunduran industri, dan pertanian yang hanya sedikit mendapat perhatian. (Idemudia, 2011)

Perencanaan merupakan fase yang sangat menentukan dalam pembiayaan pendidikan. John dan Edgar L. Morphet (1975) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan instrumen utama dalam pembangunan yang efektif termasuk penyediaan dukungan dana. Dia mengakui bahwa perencanaan yang efektif merupakan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi paling tidak perencanaan itu merupakan komitmen dan didukung oleh pemerintah di semua level, dana yang cukup, dan sumber daya yang digunakan secara efektif.

2. Mekanisme dan Proses Penyaluran Dana CSR Pendidikan

Seperti halnya dalam perencanaan, seluruh mekanisme dan proses penyaluran dana sangat sedikit melibatkan sekolah/madrasah. Rendahnya keterlibatan pihak sekolah/madrasah dalam seluruh proses ini menjadi faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan program CSR dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peran sekolah/madrasah dalam program CSR merupakan salah satu cerminan pelaksanaan SBM. Seperti telah dikutip sebelumnya, World Bank (2009) menyebutkan bahwa SBM akan meningkatkan outcome pendidikan. Pelimpahan wewenang kepada sekolah tersebut memberikan dampak terhadap hasil skor ujian. Jumlah keputusan yang dibuat di level sekolah akan berdampak terhadap hasil skor ujian. (King and Ozler, 1998 & Ozleer, 2001)

Oleh karena itulah, seluruh mekanisme dan proses harus memaksimalkan peran sekolah/madrasah sejak tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dengan demikian, alokasi yang diterima sekolah/madrasah akan lebih maksimal karena langsung diterima mereka. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyaluran dana CSR akan menjadi *cost driver* dan mengurangi alokasi yang sampai ke proses pendidikan di sekolah/madrasah. Pembahasan lebih jauh tentang hal-hal tersebut akan dikemukakan pada bagian tersendiri.

Mengurangi keterlibatan pihak ketiga dalam program CSR pendidikan akan menyederhanakan proses dalam pelaksanaan program. Barraza (2010 : 72) menyebutkan bahwa penyederhanaan proses merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *rate return on investment*. Proses yang panjang membuka peluang pemborosan sehingga memperbesar input untuk proses tersebut.

Selain itu, mekanisme dan proses dalam pelaksanaan program CSR pendidikan tidak memiliki standar harga/biaya penggunaan dana CSR sebagai upaya untuk memperkecil peluang pemborosan atau penyalahgunaan dana. Pihak sekolah atau pihak ketiga menggunakan dana CSR dengan leluasa tanpa memperhatikan standar biaya yang dapat menjadi tolok ukur kewajaran penggunaan dana. Oleh karena itu, pengeluaran dana dapat lebih mahal daripada harga pasar dan dapat pula lebih murah dari pasar tetapi kualitasnya yang lebih rendah. Pembangunan sarana prasarana dan pembelian alat laboratorium yang tidak berdasarkan pada standar biaya tertentu sangat rentan terjadi penyalahgunaan atau *mark up* alokasi harga sehingga merugikan program CSR.

Salah satu penyebab rendahnya perhatian perusahaan kepada upaya preventif penyalahgunaan program CSR tersebut adalah tidak adanya undang-undang tentang tindak pidana korupsi di kalangan swasta. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara jelas mengatur ancaman korupsi di kalangan swasta. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan antikorupsi di Indonesia tidak secara spesifik dan khusus menempatkan sektor swasta sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Penegak hukum sangat sulit untuk mengusut pidana korupsi di kalangan swasta yang tidak terkait dengan keuangan negara. Dengan perundang-undangan yang tegas dan jelas tersebut peluang korupsi dapat di reduksi. Singapura adalah contoh dimana pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan mengurangi peluang untuk korupsi dan meningkatkan hukuman bagi koruptor. (Quah, 1999)

Upaya pencegahan korupsi di sektor swasta telah mendapat perhatian serius negara-negara di dunia. Dalam *Article 12 United Nations Convention Against Corruption* disebutkan bahwa negara harus mencegah tindakan korupsi di sektor swasta, kemudian pada *article 21* juga disebutkan tentang penyuaian di sektor swasta yang harus dianggap sebagai tindakan kriminal. Lebih detail pada *article 12 poin 2* konvensi tersebut juga menyebutkan kewajiban negara-negara peserta konvensi untuk melakukan pencegahan korupsi yang melibatkan sektor swasta, meliputi antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama di antara badan-badan penegakan hukum dan badan-badan hukum perdata yang bersangkutan;
- b. Meningkatkan pengembangan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas badan-badan hukum swasta yang bersangkutan;
- c. Meningkatkan transparansi di antara badan-badan hukum swasta;
- d. Mencegah penyalahgunaan prosedur-prosedur yang mengatur badan hukum perdata;
- e. Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan menerapkan pembatasan-pembatasan, dimana perlu, untuk jangka waktu yang wajar, bagi kegiatan-kegiatan profesional mantan pejabat-pejabat publik;
- f. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan memperhitungkan struktur dan besarnya mereka, memiliki pengawasan audit internal membantu mencegah dan melacak perbuatan-perbuatan korupsi.

Korupsi sektor swasta juga mendapat perhatian serius negara-negara di Afrika. *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption article 11* menegaskan bahwa setiap negara harus mengambil tindakan-tindakan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi yang berkaitan dengan agen-agen di sektor swasta; membuat mekanisme untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta untuk memerangi persaingan curang; menghormati prosedur tender dan hak atas kekayaan intelektual; serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka mencegah perusahaan-perusahaan dari pemberian suap untuk memenangi suatu tender di antara para pelaku bisnis.

Peran sektor swasta dalam pemberantasan korupsi dalam segala bentuk termasuk pemerasan dan penyuapan ditegaskan pula pada prinsip kesepuluh *The UN Global Compact's*. Sundaram (2009 : xxi) menyebutkan keterlibatan aktif komunitas perusahaan adalah salah satu strategi untuk melawan korupsi. Keterlibatan perusahaan tersebut tercermin pada pengaturan CSR yang mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan tindakan anti korupsi sebagai cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan. Etika bisnis dan integritas tersebut merupakan bukti praktik dan manajemen yang baik.

3. Distribusi dan Alokasi Dana Program CSR Pendidikan

Persoalan distribusi dan alokasi dana program CSR PT. Adaro Indonesia sangat terkait dengan proses perencanaan anggaran yang merupakan prerogatif pemerintah kabupaten. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bagaimana alokasi dana program CSR pendidikan didistribusikan. Bertolak dari hal tersebut dapat dilihat bahwa distribusi dan alokasi tidak berdasarkan kepada prioritas PT. Adaro Indonesia serta ada beberapa tidak menyentuh lembaga pendidikan.

Distribusi CSR pendidikan di Kabupaten Balangan tidak didasari oleh pemaknaan yang benar tentang lembaga pendidikan. Oleh karena itu, distribusi dan alokasi CSR cenderung diberikan kepada lembaga yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, misalnya untuk pembangunan ruang pengajian Alquran pada Polres Balangan dengan alokasi Rp. 100.000.000,- . Pada saat yang sama, sekolah hanya menerima Rp. 95.000.000,- yang dibagi untuk tiga sekolah: SDN Sungai Ketapi sebesar Rp. 15.000.000,-, SMPN 3 Paringin sebesar Rp. 50.000.000,- dan SMPN 4 Halong sebesar Rp. 30.000.000,-. Ironisnya, pada tahun 2010, di Balangan, tidak ada satu madrasahpun yang mendapat distribusi dana program CSR PT. Adaro Indonesia, dan hanya satu madrasah di Tabalong yang mendapat distribusi dana CSR PT. Adaro Indonesia.

Fakta itu memberikan sinyalemen bahwa distribusi dan alokasi CSR sangat berhubungan dengan kedekatan pemerintah dengan pihak penerima dana tersebut. Tim perumus serta PT. Adaro Indonesia lebih memilih mendistribusikan kepada pihak kepolisian daripada memberikan kepada sekolah/madrasah yang tidak memberikan manfaat praktis bagi pemerintah/perusahaan. Distribusi kepada

pihak kepolisian diyakini akan memberikan manfaat jika pihak pemerintah/perusahaan berurusan dengan penegak hukum tersebut. Keuntungan praktis tersebut tidak akan terjadi jika mendistribusikan kepada sekolah/madrasah. Ditinjau dari prioritas program CSR, diabaikannya madrasah dalam program CSR ini tidak tepat. Siswa-siswa pada madrasah tidak mustahil ada yang berasal dari desa pada wilayah Ring 1 dan Ring 2. Siswa-siswa tersebut berhak untuk ikut serta dalam program CSR daripada siswa dari daerah yang tidak terdampak. Penelitian ini telah menggambarkan bahwa pada MTsN Layap dan MAN 1 Paringin terdapat siswa yang berasal dari daerah Dahai serta desa terdampak lain. Peneliti mengkonfirmasi kepada 6 orang siswa MTsN Layap dan 2 orang siswa MAN 1 Paringin. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak tersentuh program CSR PT. Adaro Indonesia selama menempuh pendidikan di madrasah itu. Siswa madrasah tersebut juga tidak mendapat fasilitas dari antar jemput dengan bis sekolah bantuan PT. Adaro Indonesia. Mereka yang tidak memiliki alat transportasi (sepeda motor) harus mengeluarkan ongkos transport Rp. 5.000,- per hari untuk biaya angkutan pedesaan. Bis sekolah bantuan PT. Adaro Indonesia tersebut dioperasikan untuk SMPN 4 Paringin dengan alasan lokasi sekolah tidak di jalan raya dan tidak dilewati angkutan pedesaan.

Dari sudut pandang hakikat CSR, distribusi untuk siswa yang tidak berasal dari wilayah terdampak sangat tidak tepat. Pada hakikatnya, program CSR dilaksanakan karena adanya dampak operasional tambang terhadap masyarakat. Oleh karena itulah, prioritas distribusi CSR adalah masyarakat yang terdampak

operasional tambang. Prioritas tersebut merupakan pemaknaan atas aspek-aspek dari *sustainability* (istilah terbaru untuk CSR) yang perlu dikenali

- a. Pengaruh sosial yang merupakan dampak pada masyarakat oleh perusahaan;
- b. Dampak lingkungan yang merupakan dampak perusahaan atas geofisik lingkungan;
- c. *Organisational culture* yang merupakan hubungan perusahaan dengan internal stakeholder: karyawan, dan semua aspek;
- d. *Finance* yang merupakan sebuah kecukupan hasil dari risiko program yang diambil. (Aras and Crowther, 2009)

Aspek pengaruh sosial dan lingkungan, menjadi aspek yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan CSR. CSR yang tidak memperhatikan aspek tersebut berarti mengingkari hakikat dari CSR itu sendiri. Dengan kata lain, program CSR pendidikan harus diletakkan diatas filosofi bahwa yang paling berhak untuk mendapat alokasi program CSR adalah siswa-siswa yang tinggal di daerah terdampak operasional tambang PT. Adaro Indonesia. Terkait dengan CSR tersebut, Elkington (1997) mengembangkan konsep *triple bottom line* yaitu *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Melalui konsep ini Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang ingin terus menjalankan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu *profit*, *people* dan *planet*. Perusahaan selain untuk meraih keuntungan (*profit*), mereka juga harus mengambil bagian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat (*people*), dan berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan (*planet*). Dalam tataran praktis, konsep yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan CSR tersebut,

mendorong perusahaan untuk secara serius melaksanakan program yang benar-benar bermanfaat dan dinikmati masyarakat.

Terlepas dari itu, distribusi dana CSR untuk madrasah masih sangat sedikit. Madrasah menjadi bagian yang terpisahkan dari pendidikan di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Madrasah dan sekolah berada dalam posisi yang sejajar dalam Sistem Pendidikan Nasional. Hubungan sekolah dan madrasah adalah hubungan komplementer (saling melengkapi) Posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional telah ditegaskan dalam SKB 3 Menteri Tahun 1975 bahwa madrasah dan sekolah berada posisi yang sejajar. SKB tersebut menyebutkan bahwa madrasah dan sekolah sejajar dengan syarat madrasah diharuskan untuk memuat 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Sebelumnya, upaya pemerintah untuk menyatukan lembaga pendidikan dalam satu departemen telah dilakukan pada tahun 1972. Pada Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1972 disebutkan bahwa semua pendidikan formal harus diatur dibawah kementerian pendidikan. Konsekuensi keputusan ini, semua kementerian yang mengelola sekolah harus menyerahkan wewenang ke kementerian pendidikan. Pada tahun 1974, presiden mengeluarkan instruksi presiden untuk menguatkan Keppres Nomor 15 Tahun 1972.

Akan tetapi, beberapa kelompok dalam Kemenag dan ulama menganggap bahwa memindah wewenang pendidikan ke kementerian pendidikan tidak perlu dilakukan. Mereka menganggap bahwa kementerian pendidikan tidak memiliki ahli dalam pendidikan agama, materi keagamaan dalam madrasah akan hilang. Mereka khawatir madrasah akan berubah menjadi sekuler dan peraturan pendidikan

tidak akan mengakomodasi keberadaan madrasah. Alasan lain adalah munculnya trauma bahwa dalam pemerintahan dipengaruhi oleh komunis yang tidak ingin madrasah berkembang. Selain itu, mereka beranggapan bahwa para pemimpin kementerian pendidikan ditingkat provinsi mengabaikan madrasah. Perdebatan itulah yang kemudian mendorong lahir SKB 3 Menteri sebagai solusi atas penolakan terhadap Keppres Nomor 15 Tahun 1975. (Zuhdi, 2005)

Perbedaan pengelolaan semakin tegas ketika UU Nomor 22 Tahun 1999 diundangkan, yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah, pendidikan (sekolah) berada dibawah otonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat yang sama, pengelolaan madrasah masih sentralistis karena berada di bawah Kemenag yang tidak termasuk paket desentralisasi. Konsekuensinya, madrasah dianggap tidak merupakan bagian dari pemerintah daerah. Hal itu berdampak pada program-program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam program CSR Pendidikan PT. Adaro Indonesia.

Terlepas dari hal itu, dapat pula dilihat bahwa program CSR pendidikan berupa bantuan pembangunan fisik atau dana, banyak didistribusikan untuk pendidikan Alquran TK/TPA, bukan untuk sekolah/madrasah. Apakah TKA/TPA tersebut dapat di katakan sebagai sekolah/madrasah? Pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan bahwa pendidikan Alquran dapat dikelompokkan sebagai pendidikan diniyah nonformal. Selain pendidikan Alquran, pendidikan diniyah

nonformal berbentuk pengajian kitab, majelis taklim, diniyah taklimiyah, dan bentuk lain yang sejenis.

Dalam konteks PP tersebut serta kondisi TK/TPA, dapat dikatakan bahwa pendidikan Alquran belum bisa disamakan dengan pendidikan pada MI/MTs/MA yang setara dengan SD/SMP/SMA berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tersebut, sebenarnya, membuka kesempatan untuk pendidikan diniyah dapat disamakan dengan madrasah SKB 3 Menteri tersebut. Pada pasal 18 ayat 1 dan 2 disebutkan agar dapat disetarakan dengan pendidikan dasar (SD/MI) pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Pada tingkat menengah, kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. Bertolak dari persyaratan tersebut, TK/TPA di kabupaten Balangan atau Tabalong belum dapat disamakan dengan Madrasah SKB 3 Menteri tahun 1975. Oleh karena itulah, TK/TPA masih berada pada posisi sebagai lembaga keagamaan layaknya majelis taklim serta pengajian kitab.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa alokasi dana CSR yang langsung diberikan ke sekolah/madrasah berbentuk sarana prasarana fisik. Alokasi itu sebagian tepat untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah/madrasah. Akan tetapi, sebagian besar tidak sesuai dengan prioritas yang harus didahulukan. Bantuan CSR berbentuk Alquran digital yang dialokasikan untuk SMPN 3

Paringin adalah contoh alokasi yang tidak sesuai dengan prioritas sekolah karena pada kenyataannya sekolah ini sangat membutuhkan proyektor digital untuk menunjang kualitas belajar mengajar. Kurangnya digital proyektor tersebut menyebabkan para guru harus bergantian memakai media tersebut. SMPN 2 Tanta yang mendapat bantuan sumur bor juga tidak tepat karena sekolah ini masih belum memiliki laboratorium sekolah. Pembangunan laboratorium ini bisa direalisasikan jika PT. Adaro Indonesia dapat merevisi rencana pembangunan perpustakaan yang dibatalkan karena SMPN 2 Tanta telah memiliki perpustakaan. Di samping itu, pembangunan sumur tersebut juga tidak didasari pertimbangan yang teliti tentang keadaan air tanah sehingga sumur bor tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, alokasi untuk pembuatan sumur bor tersebut merupakan pemborosan alokasi dana CSR.

Alokasi untuk pembangunan mushala, perlengkapan sekolah (tas dan seragam), bimbingan belajar, pembangunan pagar, merupakan alokasi yang tidak tepat. Alokasi tersebut tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah yang membutuhkan media pembelajaran sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Media tersebut sangat penting menjadi perhatian karena mayoritas sekolah/madrasah tidak memiliki media pembelajaran yang mencukupi. Bahkan, mayoritas sekolah/madrasah masih menggunakan kapur tulis dalam pembelajaran. Penggunaan kapur tulis tersebut membuat pembelajaran tidak efektif karena kotor, berbahaya bagi kesehatan, dan tidak praktis. Pada penelitian ini, hanya SMPN 3 Paringin yang sudah menggunakan whiteboard di dalam kelas. Dengan kata lain,

alokasi pada sekolah/madrasah yang selama ini terjadi tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah/madrasah itu sendiri.

Alokasi yang tidak tepat dapat menjadi faktor tidak adanya dampak positif dari pengeluaran untuk pendidikan tersebut. Program CSR PT. Adaro Indonesia akan berdampak positif jika memprioritaskan dua hal

a. Kelengkapan Sarana Prasarana Pembelajaran

Sarana Prasarana yang memadai akan sangat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, terutama sarana yang berhubungan dengan media pembelajaran. Penelitian Crampton (2009) yang dilakukan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur sekolah termasuk pemeliharaan perlengkapan, renovasi, komputer, dan perlengkapan sekolah lain memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan prestasi siswa. Prasarana yang paling penting adalah *instructional support* tersebut meliputi pengeluaran biaya untuk supervisi pembelajaran, pengembangan kurikulum, pelatihan pembelajaran dan media, perpustakaan, audio visual, televisi, dan komputer untuk pembelajaran. Morilla dan Roman (2011) juga menyimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar sekolah (air, listrik, drainase limbah), fasilitas pengajaran (fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan), yang dilengkapi pula dengan buku-buku perpustakaan dan komputer memiliki dampak terhadap prestasi siswa sekolah dasar. Kondisi fasilitas sekolah yang tidak memadai atau rusak tidak hanya menyebabkan rendahnya prestasi akademik siswa tetapi juga turut berkontribusi terhadap tingkat kehadiran siswa di sekolah dan angka putus sekolah (Branham, 2004) Akan tetapi, kelengkapan sarana prasarana sekolah

tersebut menjadi perhatian utama hanya sampai dalam batas sarana prasarana minimal. Dengan kata lain, sarana prasarana sekolah/madrasah tidak sampai memunculkan kesan mewah.

b. Peningkatan Kualitas Guru

Alokasi kedua yang seharusnya menjadi prioritas adalah meningkatkan kualitas guru. Normore dan Ilon (2006) mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan akan mempengaruhi hasil belajar jika digunakan untuk meningkatkan kualitas guru. Biaya yang dikeluarkan lebih murah dan efektif jika dialokasikan untuk meningkatkan rasio staf administrasi dan guru/pembantu guru, serta meningkatkan kualitas guru (pelatihan, workshop) juga akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Elliot (Ross, et.all, 2007 : 481) menegaskan bahwa prestasi siswa akan meningkat jika biaya digunakan untuk membayar guru dan melatih guru dalam metode pengajaran yang efektif. Di lain pihak Hanushek (2000) yang dikutip Nishimuko (2007) juga menekankan pentingnya guru. Dia berpendapat bahwa meningkatkan kualitas guru adalah satu kunci penting untuk meningkatkan prestasi siswa. Guru berkualitas yang dihitung dari rata-rata tahun lamanya pelatihan guru akan dapat mengurangi angka putus sekolah. Menurut mereka, sekolah dengan guru yang berkualitas akan menahan siswa untuk tetap bersekolah. (Ross, 2007)

Disamping itu, program CSR juga harus memperhatikan peningkatan penghasilan guru berdasarkan kinerja pasca berbagai pelatihan/workshop yang dibarengi pengawasan oleh konsultan independen. Insentif bagi para guru tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas belajar mengajar. Chakka Fattah

mengungkapkan bahwa Gaji guru yang rendah sangat potensial berdampak terhadap rendahnya kesempatan pendidikan siswa. (Tn, 2011) Jika merujuk pada pendapat Fattah (2006: 137), pembiayaan pendidikan yang berkorelasi signifikan dengan proses belajar mengajar (PBM) adalah (1) gaji dan kesejahteraan pegawai, (2)biaya pembinaan guru, (3)pengadaan bahan pelajaran (4)pembinaan kesiswaan, dan (5)biaya pengelolaan sekolah. Terlepas dari persoalannya dalam implementasi di sekolah, pelatihan/workshop guru yang dilaksanakan secara berkesinambungan di Kabupaten Tabalong sangat tepat.

Selain itu, alokasi program CSR pendidikan harus merujuk pada prinsip *equity*, *efficiency* dan *adequacy* dengan tetap melihat pada prioritas terdampak operasional tambang. Monk dan Plecki (1999 : 491-492) mencatat bahwa *equity* diperdebatkan bagaimana sebaiknya dalam pembiayaan pendidikan. Pertama, siswa-siswa memiliki hak yang sama untuk mendapat perhatian dan setiap mereka harus diperlakukan sama dalam pendidikan. Penyaluran sumber daya merupakan satu bagian penting dari perhatian publik bagi siswa dan ketidaksamaan sumber daya menguatirkan dari perspektif *equality*. Kedua, *equity* merujuk pada pengenalan terhadap perbedaan satu siswa dengan siswa lainnya. Misalnya, beberapa siswa yang kurang mampu memiliki implikasi pada berapa sumber daya yang disediakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa siswa yang tinggal di daerah yang ongkos hidupnya tinggi juga memerlukan sumber daya yang lebih tinggi pula.

Dalam perspektif konsep *equity* yang kedua itulah, siswa yang tinggal di daerah terdampak semestinya mendapat sumber daya yang lebih baik dari

perusahaan. Sumber daya tersebut memang merupakan hak mereka dan tidak disamakan dengan siswa lain yang tinggal di daerah tidak terdampak. Dalam perspektif hakikat CSR, meskipun ada perbedaan sumber daya (baca : dana) antara siswa dalam satu kabupaten, tidak dapat dikatakan sebagai ketidakadilan, justru disitulah letak *equity* dalam pembiayaan pendidikan.

Effeciency alokasi CSR pendidikan merujuk pada produktivitas pendidikan dengan melihat pada hubungan antara supply sumber daya dan hasil dalam pembelajaran. *Adequacy* berhubungan dengan efesiensi dalam pembiayaan pendidikan. Penetapan standar pembiayaan sangat sulit dilakukan karena inefesiensi dapat juga menambah kebutuhan terhadap sumber daya dana untuk pendidikan.

Berdasarkan pendekatan *equity*, *effeciency*, dan *adequacy* tersebut, praktik CSR pendidikan PT. Adaro dapat dinilai ketepatan alokasinya. Alokasi untuk bimbingan belajar menjadi satu hal yang jelas berseberangan dengan prinsip tersebut. Di satu sisi, siswa yang tinggal di desa terdampak tidak mendapatkan haknya dari CSR pendidikan secara proporsional karena 69,2% alokasi CSR pendidikan terkuras untuk persiapan UN melalui bimbingan belajara Primagama yang dibagi rata untuk semua siswa di kabupaten. Itu tidak sejalan dengan prinsip *equity* dalam pembiayaan pendidikan. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang tidak mengalokasikan dana untuk bimbingan belajar tersebut, hasil UN kabupaten tidak lebih baik. Perbandingan dengan pengeluaran dengan hasil yang tidak sebanding tersebut mencerminkan ketidakefesiengan, untuk tidak mengatakan pemborosan, alokasi program CSR. Alokasi yang tidak efisien

untuk Bimbel tersebut berimplikasi tidak dicapainya kecukupan (*adequacy*) dalam pembiayaan pendidikan.

Alokasi dana CSR Kabupaten Balangan yang terkuras pada program bimbingan belajar sebesar 69,2 % dari total alokasi CSR yang sebesar Rp. 4.335.000.000,-. Alokasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- untuk bimbingan belajar yang dikelola Primagama tersebut memunculkan pertanyaan yang cukup tajam Primagama merupakan sebuah lembaga profit bidang pendidikan atau badan usaha pendidikan yang berorientasi kepada keuntungan finansial sehingga tidak dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan. Dengan kata lain, alokasi itu memberikan gambaran pendidikan di Kabupaten Balangan yang ingin berhasil dengan cara instan dengan mengabaikan proses.

Jika kebijakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan hasil Ujian Nasional, persiapan untuk UN tersebut seharusnya lebih banyak melibatkan sekolah/madrasah. Remedial mata pelajaran dapat dilakukan sepenuhnya oleh sekolah/madrasah dengan dukungan dana CSR PT. Adaro Indonesia, tanpa melibatkan Primagama. Dengan *unit cost* yang selama ini disediakan sebesar Rp. 1.472.754 per siswa program remedial tersebut akan lebih bermanfaat jangka panjang kepada sekolah/madrasah. *Unit cost* tersebut dapat digunakan untuk pengadaan media pembelajaran, laboratorium, peningkatan kualitas guru, serta insentif guru yang dapat berdampak kepada hasil belajar.

Manfaat yang dirasakan sekolah/madrasah tidak hanya selama remedial tetapi dapat dirasakan bertahun-tahun setelah remedial tersebut. Media pembelajaran, perlengkapan laboratorium, dan workshop guru akan dapat

digunakan terus menerus untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemampuan pihak sekolah/madrasah untuk melaksanakan remedial tersebut tidak perlu diragukan karena kualitas guru tidak berbeda dengan para mentor Primagama. Menurut informasi seorang responden di MAN 1 Paringin, “mentor Primagama tersebut tidak menguasai sepenuhnya materi, mereka sangat menguasai materi pada soal yang diajarkan tetapi kalau materi mata pelajaran kadang-kadang para guru lebih menguasai”.

Selain itu, penetapan alokasi untuk Primagama tersebut memberikan dua sinyalemen yang dapat menunjukkan

a. Kepentingan Ekonomi dan atau Politik

Alokasi dana tersebut berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan atau kekuasaan pribadi penentu kebijakan dalam hal ini pejabat Kabupaten Balangan dan atau PT. Adaro Indonesia. Dengan kata lain, distribusi dan alokasi yang menyerap 69, 2% anggaran CSR pendidikan tidak didasari kesadaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan tetapi lebih didasari kepentingan pribadi dalam hal ini kepentingan politik. Responden-responden yang ditemui dalam penelitian ini tidak memberikan petunjuk tentang hubungan kepemilikan Primagama dengan Bupati atau pejabat lain. Oleh karena itu, alokasi untuk Primagama lebih berhubungan dengan kepentingan politik penguasa. Jika dikaitkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Balangan yang dilaksanakan 2 Juni 2010, alokasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara instan untuk kepentingan kampanye *incumbent*. Alokasi untuk Bimbel tersebut sejak tahun 2009 bertepatan dengan

keputusan Kabupaten Balangan untuk tidak mengalokasikan dana CSR untuk LP3AP.

Kepentingan politik tersebut juga berhubungan alokasi yang banyak diberikan kepada TK/TPA serta pengajian yang tidak dapat disamakan dengan sekolah/madrasah SKB 1975. Dengan mengalokasikan untuk TK/TPA pada item CSR pendidikan akan meningkatkan alokasi dana pendidikan yang sedang menjadi trend setelah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 memutuskan bahwa pemerintah wajib menganggarkan 20% dari anggaran negara untuk pendidikan. Di samping itu, perhatian kepada TK/TPA dapat menaikkan citra penguasa sebagai pemimpin yang religius dan memperhatikan agama, apalagi penyerahan dana dilakukan dengan upacara yang dihadiri banyak orang. Hal itu akan memberikan dampak positif untuk pemilihan kepala daerah atau untuk memenuhi janji ketika dulu berkampanye.

Jika dugaan itu benar, tindakan Pemerintah Kabupaten Balangan diatas sejalan dengan apa yang ditulis Machiavelli bahwa penguasa harus menggunakan kekuatan yang nyata, memanfaatkan legalitas konstitusional untuk melancarkan aksi politik, serta memanfaatkan bonafiditas lembaga untuk membangun opini publik bahwa penguasa adalah pendukung moralitas. Itu dilakukan untuk mendapat dukungan rakyat. Machiavelli mengajarkan bahwa rakyat gampang dibohongi dan dimanipulasi dukungannya lewat penampilan-penampilan penguasa secara menarik dan persuasif karena rakyat sangat mudah diyakinkan dengan apa yang mereka lihat dan saksikan secara langsung. (Machiavelli, 1996)

Itu berbeda dengan Kabupaten Tabalong yang telah melaksanakan Pilkada Bupati pada 29 Oktober 2008 dan dimenangkan oleh incumbent sehingga pada tahun 2009 program CSR relatif tidak digunakan untuk kepentingan politik. Hal itu dapat dilihat dari persentasi alokasi dana yang langsung untuk sekolah/madrasah lebih besar dari pada di Kabupaten Balangan.

Adanya kepentingan politik dalam distribusi dan alokasi program CSR merefleksikan kemungkinan adanya korupsi dalam program tersebut. Huang (2008:3) yang mengutip Klitgaard, Maclean-Abaroa & Parris (2001) menyebutkan bahwa korupsi merupakan kesalahan penggunaan public office untuk kepentingan pribadi, yang terus mewabah di negara maju dan negara berkembang. Dampak korupsi terhadap pendidikan, menurut Huang, adalah meningkatkan biaya dan menurunkan kualitas pelayanan pendidikan. (Huang, 2008 : 2)

b. Pemaknaan Hakikat Pendidikan yang Keliru

Pemerintah Kabupaten Balangan tidak memahami tentang hakikat dan substansi pendidikan. Pemerintah tidak memahami bahwa alokasi yang sangat besar untuk bimbingan belajar tidak berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah/madrasah sehingga alokasi dana Rp. 3.000.000.000,- hanya pemborosan dana CSR PT. Adaro Indonesia. Filosofis Bimbingan Belajar Primagama adalah latihan menjawab soal-soal mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional. Bimbingan belajar tidak melakukan transfer nilai-nilai kepada siswa yang merupakan esensi dari pendidikan tetapi lebih berorientasi kepada cara menjawab soal-soal Ujian Nasional. Apa yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten

Balangan sangat bertentangan dengan makna hakiki pendidikan seperti disebut B. Herry Priyono “mendidik bukan pertama-tama urusan membuat murid pintar pelajaran matematika atau ekonomi, tetapi urusan kesetiaan menemani murid untuk menghasrati apa yang luhur dan memperoleh kebiasaan hidup yang luhur. Pelajaran fisika ataupun geografi, sastra ataupun ekonomi adalah sarana mendidihkan hasrat dan kebiasaan luhur itu”.

Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Balangan menganggap bahwa hasil Ujian Nasional adalah cerminan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tidak dapat dinilai dari prestasi dalam ujian saja. Menurut Beck dan Murphy (1996), beberapa peneliti melihat sekolah yang sukses dari sudut pandang prestasi tradisional siswa, dalam bentuk angka/result oriented. Dengan kata lain, sekolah yang sukses dilihat dari nilai yang diraih siswa. Akan tetapi, banyak peneliti menyimpulkan bahwa sekolah sukses tidak hanya terkait dengan hasil test.

Penilaian terhadap sekolah berkualitas lebih tepat jika dilihat dari *process oriented*. Pentingnya *process oriented* dijelaskan oleh Hill (2001) dan Walsh (1999). Hill berkeyakinan bahwa nilai tambah (*value added*) merupakan sebuah satu tolok ukur terhadap keberhasilan sekolah. Ini berarti, penilaian harus mempertimbangkan karakteristik asal siswa. Seperti dikutip Raihani (2010 : 7), inti efektivitas sekolah adalah ide tentang nilai yang ditambahkan sekolah, ketimbang hanya besaran *outcome*-nya saja. Walsh (1999 : 32) juga mengindikasikan sekolah sukses merupakan sekolah yang mampu menjadikan siswanya berkembang dengan cukup signifikan. Dengan kata lain, sekolah sukses adalah sekolah yang berhasil meningkatkan kemampuan siswa lebih baik daripada

sebelumnya. Soal apakah kemampuan tersebut mencapai standar tertentu tidak menjadi poin penting.

Beck dan Murphy (1996 : 118), menjelaskan ada empat hal penting untuk sekolah sukses:

- a. Imperatif untuk mengembangkan pembelajaran secara khusus tetapi tidak secara eksklusif untuk siswa.
- b. Imperatif bagi pribadi –pribadi untuk mengemban tugas-tugas kepemimpinan dan memusatkan energi serta sumber-sumber dari stake holder secara produktif.
- c. Imperatif untuk memelihara suasana komunal di dalam sekolah dan menyatukan sekolah dengan masyarakat secara lebih luas dan saling menguntungkan.
- d. Imperatif untuk mendukung usaha-usaha membangun kapasitas staf administrasi, pengajar, dan orang tua sehingga mereka dapat lebih mendukung pembelajaran siswa.

Di pihak lain, *Winsconsin Departement of Public Instruction*/WDPI (2005) menunjukkan karakteristik tambahan yang meliputi visi, kepemimpinan, standar akademik yang tinggi, standar sikap dan emosi, keluarga, sekolah, kemitraan komunitas, perkembangan profesional, dan perkembangan profesional, dan bukti-bukti keberhasilan. Ukuran keberhasilan sekolah versi WDPI sangat komprehensif dan menyangkut banyak hal, tidak hanya standar akademik yang tinggi.

Itu berbeda dengan Beck dan Murphy (1996) yang menekankan pada proses sekolah sebagai indikator menilai sekolah sukses. WDPI justru memberi tekanan dan disertakannya hasil-hasil sekolah: bukti kesuksesan sekolah yang dicerminkan pada prestasi sekolah, sebagai salah satu karakteristik sekolah yang sukses. Bertolak dari dua literatur tersebut, pendapat Riley dan MacBeath (1998) menjadi relevan. Mereka menilai bahwa sekolah sukses harus mempunyai karakteristik proses dan hasil yang bagus. Itulah yang membedakan dengan sekolah efektif, sekolah efektif, menurut mereka, hanyalah salah satu karakteristik sekolah sukses. Sekolah efektif menekankan pada prestasi siswa sedangkan sekolah sukses adalah sekolah yang kulturnya memberikan kesempatan untuk tumbuh, tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi dan para pemimpin sekolah (Riley & MacBeath, 1998 : 146)

Dengan lebih praktis, Barth (2009) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadikan sekolah yang baik. Pertama, sekolah yang baik adalah sebuah sekolah yang diisi oleh komunitas pembelajar. Sebuah sekolah sebagai komunitas pembelajar berpegangan dengan banyak komponen dan untuk yang semua hal yang mengikat. Semua warga sekolah masuk kepada hubungan kolaboratif untuk mencapai prestasi yang tidak bisa dicapai dengan bekerja sendiri.

Kedua, hubungan kolegial. Hubungan dalam sekolah bukanlah hubungan persaingan atau permusuhan : guru melawan murid, guru melawan guru, kepala sekolah melawan guru, dan pihak sekolah melawan orang tua. Pada sekolah yang baik, menurut Barth, guru dan kepala sekolah merupakan bagian yang tak

terpisahkan. Di sekolah, guru dan kepala sekolah saling bertukar ilmu dan secara aktif menolong yang lain untuk lebih baik. Pada sekolah yang baik akan terbangun hubungan kerja sama dan persatuan bersifat kolegal.

Ketiga, pengambil risiko. Sekolah yang baik dimana siswa dan yang lain didorong untuk mengambil risiko dan ada “jaring pengaman” untuk melindungi yang berisiko. Peningkatan kualitas sekolah harus didasari dengan program yang berbeda dengan sebelumnya. Keputusan itu berrisiko jika dibandingkan dengan meneruskan program pengembangan yang sudah berjalan. Risiko yang diambil, menurut Barth, sangat berhubungan dengan pembelajaran.

Keempat, recommitmen. Krisis pendidikan untuk warga sekolah adalah kurangnya komitmen daripada recommitmen. Rutinitas alami sekolah membuat semua warga sekolah menjadi otomatis. Siswa hadir ke sekolah karena ada kewajiban hukum untuk itu, mereka harus hadir ke sekolah. Banyak orang terkekang oleh kewajiban. Di sekolah diperlukan recommitmen secara periodik yang akan mengingatkan semua orang kepada sebuah profesi vital dan tidak menjadi sebuah pekerjaan yang membosankan.

Kelima, menghormati perbedaan. Sekolah yang menyenangkan, tulis Barth, adalah sekolah yang sangat menghormati perbedaan orang-orang. Orang-orang yang berbeda, guru, orang tua, siswa, dan kepala sekolah, menyukai itu dan akan belajar lebih baik dalam sekolah yang menghormati perbedaan. Perbedaan filosofi, gaya, dan semangat adalah sumber daya yang sangat hebat untuk pengembangan sekolah.

Keenam, tempat untuk para pemikir. Sekolah yang baik menurut Barth, adalah tempat yang menyediakan kesempatan bagi orang-orang untuk bertanya “mengapa”, tempat para pemikir. Tidak ada yang lebih penting daripada membangun sebuah kultur penelitian dan sebuah komunitas pembelajar. Di sekolah perlu dirancang mekanisme yang memungkinkan pengujian secara terus menerus dan mengungkapkan pertanyaan, cara yang untuk melakukan sesuatu.

Ketujuh, humor. Sekolah, ujar Barth, adalah sebuah tempat yang lucu. Humor, tulisnya, sangat berhubungan belajar dan pengembangan intelegen, tanpa menyebut kualitas hidup. Humor dapat menjadi perekat seorang individu atau group ke dalam komunitas.

Kedelapan, komunitas para pemimpin. Pemimpin, tulis Barth, adalah merealisasikan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Kepala sekolah mempercayai banyak hal dan membuat semua itu menjadi kenyataan. Guru, pustakawan, konselor, orang tua, dan siswa juga ingin merealisasikan apa yang mereka percayai. Sekolah yang saya sukai, ujar Barth, adalah sekolah yang setiap orang dapat kesempatan untuk menjadi pemimpin. Dengan sebuah komunitas pemimpin akan datang sebuah komunitas pembelajar.

Kesembilan, sedikit keinginan dan tinggi standar. Karakteristik sekolah yang disukai oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah adalah berhubungan dengan keinginan dan standar-standar. Beberapa sekolah berkarakteristik dengan keinginan yang tinggi dan berstandar rendah serta ada pula sekolah beringinan tinggi dan berstandar rendah. Menurut Barth, sekolah yang meningkatkan keinginan terkait belajar sangat banyak. Akan tetapi, sekolah yang mereformasi

sekolah dengan meningkatkan standar masih sedikit. Dengan mengambil contoh di Boston, dia mengungkapkan bahwa banyak siswa yang stress, sakit kepala, serta minum alkohol dan menyalahgunakan obat.

Dalam kasus Indonesia, kualitas sekolah ditentukan oleh tiga faktor utama setelah suatu sekolah diakreditasi dengan nilai tertentu. Ketiga faktor tersebut meliputi input, prosedur, dan *outcome* yang telah distandarisasi. Input mengacu pada modal yang dimiliki sekolah, seperti sumber daya sekolah, fasilitas, dan karakteristik awal para siswa, sedangkan prosedur mengacu pada proses-proses pendidikan yang digunakan untuk mencapai hasil-hasil yang distandarisasikan. Tiga faktor tersebut dijabarkan menjadi sembilan komponen yang menentukan kualitas sekolah: kurikulum dan proses belajar mengajar; administrasi dan manajemen sekolah; organisasi sekolah; fasilitas sekolah; sumber daya manusia; pendanaan sekolah; siswa; keterlibatan komunitas; serta lingkungan dan kultur sekolah (BASN, 2003 : 7-26; 39)

4. Penggunaan Dana CSR Pendidikan

a. Penggunaan oleh Sekolah/Madrasah

Penggunaan dana CSR oleh sekolah/madrasah berdasarkan pada alokasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan bupati. SMPN 2 Tanta misalnya, pada tahun 2010 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- untuk perlengkapan IT sekolah. Dana yang diterima tersebut oleh sekolah digunakan untuk membeli dua unit laptop. Demikian juga praktik penggunaan dana pada MIN Limau Manis. Madrasah ini pada tahun 2009 menerima dana CSR sebesar Rp. 13.000.000,- yang dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan mushala. Pihak madrasah kemudian menggunakan itu untuk penyelesaian mushala madrasah sesuai peruntukan itu.

Praktik penggunaan dana CSR itu tidak diatur selayaknya penggunaan uang negara yang berdasarkan standar biaya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 menjelaskan bahwa standar biaya merupakan satuan biaya ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran rencana atau anggaran yang berupa standar biaya masukan dan standar biaya keluaran. Terkait dengan itu PT. Adaro Indonesia tidak menetapkan standar biaya yang dapat dijadikan sekolah/madrasah sebagai pedoman dalam menggunakan dana CSR. PT. Adaro Indonesia juga tidak mengharuskan kepada sekolah/madrasah untuk merujuk kepada standar biaya umum (SBU) Kementerian Keuangan yang biasanya digunakan instansi pemerintah. Tidak adanya standar biaya atau keharusan menggunakan standar biaya umum kementerian Keuangan tersebut menyebabkan sekolah/madrasah menggunakan dana CSR tersebut seperti halnya

membelanjakan uang pribadi. Pengadaan laptop tersebut tanpa menggunakan Surat Perintah Kerja dan penawaran harga oleh beberapa perusahaan atau CV bidang yang relevan.

Seperti disebutkan responden, PT Adaro Indonesia sebagai perusahaan kontraktor pemerintah mengharuskan penggunaan dana CSR melalui proses lelang (tender) pengadaan barang dan jasa seperti halnya instansi pemerintah. Akan tetapi, proses tersebut bisa saja tidak dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Pada penelitian ini telah mengungkapkan bahwa seluruh penggunaan dana CSR tidak melalui proses tersebut. Hal itu menunjukkan kecenderungan pemaknaan CSR sebagai bentuk karitatif perusahaan. CSR yang bersifat karitatif merupakan CSR yang dimaknai sebagai kedermawanan perusahaan, tanpa adanya perintah peraturan yang jelas.

Meskipun secara teoritis perusahaan menyatakan bahwa CSR adalah bentuk dari *sustainability* perusahaan, pada praktiknya CSR masih merupakan “bagi-bagi uang” (karitatif) kepada publik. Hal itu juga bertentangan dengan CSR yang dipahami sebagai *accountability* yang terfokus kepada tanggung jawab perusahaan yang bertolak dari peraturan yang mengharuskan untuk itu. (Mares, 2008 : 3)

Pada satu sisi, penggunaan dana CSR tanpa proses lelang (tender) tersebut menguntungkan dalam hal efisiensi waktu. Itu berbeda dengan penggunaan dana dengan proses lelang (tender). Proses itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk menetapkan kontraktor yang kompeten melaksanakan pembangunan sarana sekolah. Akan tetapi, penggunaan dana tanpa lelang

(tender) sangat rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang akan menurunkan kualitas pencapaian program CSR bidang pendidikan itu sendiri. Kondisi demikian sangat terkait dengan tidak adanya ketegasan dalam perundang-undangan tentang korupsi sektor swasta sehingga perusahaan cenderung tidak peduli terhadap upaya pencegahan korupsi. Hal itu telah dijelaskan pada halaman 240 – 242.

Pengaruh korupsi dalam pendidikan dipaparkan dengan baik sekali oleh Huang (2008). Tulisannya itu mengutip Mauro (1997) yang menyebutkan bahwa korupsi memiliki efek terhadap komposisi dari pengeluaran negara. Mauro menemukan, tulis Huang, pengeluaran negara untuk pendidikan sangat signifikan berasosiasi dengan dengan korupsi. Negara yang korup, menurut Mauro, menghabiskan uang sedikit untuk pendidikan. Selanjutnya Huang (2008) mengungkap tentang efek korupsi tersebut dalam pendidikan. Dia mengutip Azfar dan Gurgur (2001), serta Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2006) bahwa korupsi diindikasikan dapat mengurangi hasil tes, ranking sekolah, dan meningkatkan variasi hasil ujian antarsekolah. Selain itu, korupsi dapat menambah biaya dan menurunkan kualitas.

Pada hasil riset yang mengambil sampel 50 negara tersebut, Huang (2008 : 6) menyimpulkan bahwa korupsi berhubungan dengan hasil pendidikan. Negara yang memiliki indeks korupsi lebih tinggi, ujar Huang, cenderung memiliki skor tes TIMSS (*Trend in International Mathematics and Science Study*) lebih rendah dan *scholl life expectancy* yang rendah pula. Sebuah negara yang lebih tinggi indeks korupsi tinggi cenderung untuk mengalokasikan anggaran negara lebih

sedikit untuk pendidikan serta lebih rendah skor tes TIMSS daripada negara yang indeks korupsinya lebih rendah.

Konteksnya dengan program CSR PT. Adaro Indonesia bidang pendidikan, korupsi sangat perlu untuk dicermati. Anggaran CSR yang sangat besar di dua kabupaten untuk pendidikan tersebut sangat membuka peluang untuk terjadinya praktik korupsi. Praktik korupsi, menurut Klitgard yang dikutip Huang (2008) merupakan persamaan $Corruption = monopoly + discretion - accountability$. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa korupsi adalah akan terjadi jika ada praktik monopoli dan keleluasaan (tanpa kejelasan aturan) serta kurangnya akuntabilitas.

b. Penggunaan Oleh Pihak Ketiga

Dana CSR juga digunakan oleh pihak ketiga yaitu Primagama, LP3AP, GNOTA, dan lembaga lain. Melibatkan Primagama dalam program CSR merupakan kebijakan yang sangat tidak tepat. Hal itu telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Penggunaan oleh Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) juga bisa menjadi *cost driver* penggunaan yang tidak perlu atau pemborosan. Alokasi yang telah disediakan harus dibebani oleh biaya operasional GNOTA serta biaya lain yang semestinya dapat dihilangkan jika alokasi langsung ke sekolah/madrasah. Banyaknya komponen yang harus ditanggung oleh alokasi untuk pihak ketiga tersebut akan menjadi faktor menurunnya kualitas hasil dari program CSR karena dana yang benar-benar sampai kepada proses hanya sedikit.

Di Kabupaten Tabalong, penggunaan alokasi CSR dilaksanakan oleh LP3AP yang belakangan (2011) melebur ke Yayasan Adaro Bangun Negeri

(YABN) bentukan Adaro Energy, induk perusahaan PT. Adaro Indonesia. Yayasan ini memilih empat sekolah: SDN Laburan, SD Plus Murung Pudak, SMP Plus Murung Pudak, SMPN 2 Tanta dan SMAN 1 Tanta. Program CSR diarahkan kepada apa yang mereka sebut sebagai *School Improvement Program* (SIP). Program yang dilaksanakan berupa workshop guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kapasitas profesional. Sekolah dalam program itu hanya menerima dan mengikuti kegiatan yang ditetapkan, sementara penggunaan alokasi sepenuhnya oleh LP3AP dengan menunjuk PT. SG sebagai pelaksana. Akan tetapi, PT. SG kemudian menunjuk sebuah konsorsium untuk melaksanakan workshop tersebut.

Penggunaan oleh LP3AP yang melibatkan banyak pihak tersebut sangat tidak efektif. Paling tidak ada tiga pihak yang menyerahkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang, dari LP3AP ke PT. SG kemudian diserahkan lagi ke subkontraktor konsorsium. Praktik penggunaan semacam itu akan menjadi *cost driver* terjadinya pengeluaran biaya yang tidak diperlukan. Dengan kata lain, panjangnya proses penggunaan akan menjadikan program berbiaya tinggi karena semua pihak akan menarik fee dari kegiatan, terutama badan hukum yang berorientasi pada profit. Implikasi lebih jauh adalah dana yang sampai kepada proses workshop/pelatihan tersebut akan banyak berkurang dan berpengaruh kepada kualitas proses serta hasilnya.

Di sisi lain, menjadi menarik ketika SIP versi LP3AP itu dibandingkan dengan *The Manitoba School Improvement Program* (MSIP). MSIP dilaksanakan di Kanada oleh sebuah yayasan, *the Walter and Duncan Gordon*

Foundation. (Haris Alma, 2000) Satu hal yang menjadi fondasi awal MSIP adalah secara langsung memberikan dana kepada sekolah-sekolah untuk program pengembangan sekolah tersebut. Yayasan itu kemudian melakukan tekanan dan dukungan dalam pelaksanaannya. Dana total yang disediakan untuk program tersebut sekitar 5 Million US Dollar dan diberikan langsung ke setiap sekolah. Jika dibandingkan dengan alokasi dana CSR pendidikan di Kabupaten Balangan atau Kabupaten Tabalong, alokasi yang disediakan untuk MSIP tersebut tidak jauh berbeda.

Setiap sekolah yang menjadi peserta MSIP membuat rencana program yang berisi maksud program, tujuan, sumber daya yang diperlukan, anggaran dana serta metode evaluasi. Proses penyusunan tersebut dibuat bersama dengan koordinator MSIP dan konsultan evaluasi yang memberikan nasihat dalam penyusunan proposal tersebut. Pada tahap akhir, team MSIP bekerja sama dengan sekolah untuk menjamin rencana itu masuk akal dan jelas, baik, dan bisa dilaksanakan.

Penilaian terhadap proyek MSIP ini didasarkan pada kriteria

- a. Proyek harus berbasis sekolah (*school based*) dan inisiasi guru
- b. Proyek harus fokus pada kebutuhan siswa
- c. Proyek harus diarahkan isu fundamental pengembangan sekolah dan pembelajaran siswa
- d. Proyek harus berpotensi untuk berdampak dalam jangka panjang (Haris, 2000)

Perbedaan mendasarkan dari proyek SIP CSR PT. Adaro Indonesia dengan MSIP tersebut adalah keterlibatan sekolah dalam seluruh proses. SIP CSR PT. Adaro Indonesia hanya melibatkan pihak sekolah dalam mengikuti program yang telah diputuskan sedang MSIP selalu melibatkan sekolah dengan didampingi pelaksana proyek. Hal kedua yang membedakan adalah penggunaan dana. MSIP menyerahkan dana langsung kepada sekolah dan digunakan sesuai proposal mereka dengan tetap didampingi konsultan dari yayasan. Pada SIP CSR PT. Adaro Indonesia, dana tidak diserahkan langsung ke sekolah tetapi digunakan oleh LP3AP dan pihak sekolah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Pada beberapa kegiatan LP3AP menyerahkan dana langsung ke sekolah. Misalnya, dalam *tryout* UN, pihak LP3AP menyerahkan dana konsumsi selama *tryout* dilaksanakan kepada pihak sekolah. Dana yang diserahkan ke sekolah ini tidak dalam jumlah yang besar dan hanya merupakan satu komponen dari program CSR yang sudah ditetapkan oleh LP3AP.

5. Pertanggungjawaban Sekolah/madrasah Penerima Dana CSR Pendidikan

Proses pertanggungjawaban penggunaan dana CSR Pendidikan dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah. Laporan diserahkan dengan melampirkan bukti kuitansi dan diserahkan kepada pihak CRR PT. Adaro Indonesia. Pada tingkat sekolah/madrasah tidak ada proses audit untuk memeriksa kebenaran penggunaan oleh sekolah/madrasah. Selain itu, pihak sekolah/madrasah, pihak ketiga (LP3AP, Primagama, dll) tidak diharuskan untuk mempublikasikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itulah, publik yang ingin mengetahui program serta alokasi dananya menjadi sangat sulit. Pertanggungjawaban penggunaan yang tidak disertai dengan transparansi akan mengurangi akuntabilitas program tersebut.

Dalam pertanggungjawaban, juga seluruh proses pelaksanaan Program CSR, sangat penting adanya transparansi. Bukti empiris dari keuntungan transparansi adalah pendidikan di Uganda (Ackerman, 2006 : 82) Tingkat korupsi di negara tersebut sangat tinggi sehingga setiap \$ 1 dari dana pemerintah untuk pendidikan hanya 20 cent yang sampai ke sekolah dasar lokal yang menjadi target. Perubahan dengan meningkatkan publikasi (sehingga orang tua sadar tentang alokasi dana) dan monitoring meningkatkan dana yang sampai ke sekolah tersebut menjadi \$ 80 cent. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, penelitian tersebut membuktikan bahwa transparansi dalam pembiayaan pendidikan akan meningkatkan input langsung terhadap proses pendidikan yang akan berimplikasi pula pada kualitas hasil pendidikan tersebut.

Dalam perspektif baru, akuntabilitas membawa dua konotasi : *answerability* dan *enforcement*. *Answerability* adalah kewajiban dari pengelola untuk menginformasikan publik dan menjelaskan atau menjustifikasi apa rencana, yang sedang dikerjakan atau yang telah dikerjakan. *Answerability* memiliki dua elemen yaitu informasi dan justifikasi. Tanpa informasi yang terbuka dalam kegiatannya, organisasi atau pemerintah sangat sulit untuk akuntabel. *Enforcement* merupakan kemampuan organisasi untuk memberikan sanksi terhadap yang lalai dalam melakukan tugas dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja dengan baik. (Ma and Hou, 2009) Pada sekolah, Adam dan Kirts (1999 : 464) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menyangkut peningkatan prestasi akademik siswa tetapi menyangkut membina hubungan dengan masyarakat yang dapat memicu dukungan masyarakat terhadap sekolah. Akuntabilitas menjadi faktor pendorong kepercayaan publik kepada lembaga pendidikan.

Akuntabilitas program dapat pula dilihat dari proses audit. Menurut pihak CSR PT. Adaro Indonesia, audit program CSR dilakukan oleh audit internal perusahaan serta lembaga pemerintah (BPKP). Pada praktiknya, pertanggungjawaban yang dibuat oleh sekolah/madrasah tidak diaudit oleh yang berwenang. Pemeriksaan dilakukan oleh CSR PT. Adaro Indonesia dengan cara memotret bangunan fisik yang dibangun program CSR. Menurut beberapa sekolah yang menerima bantuan berbentuk “uang”, audit terhadap bantuan tersebut tidak pernah dilakukan sampai ke level sekolah.

Selain berbentuk “uang” segar, bantuan kepada sekolah/madrasah berbentuk barang atau bangunan fisik. Sekolah/madrasah yang menerima bantuan jenis itu hanya menandatangani serah terima kemudian mencatat barang/bangunan itu sebagai inventaris sekolah/madrasah. Pertanggungjawaban lebih detil tentang pembangunan/pengadaan barang tersebut dibuat oleh pelaksana dari PT. Adaro Indonesia. Pembangunan fisik tersebut tidak diperiksa secara langsung ke lokasi pembangunan oleh auditor. Responden dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa hanya pihak PT. Adaro Indonesia saja yang datang memotret bangunan tersebut sebagai bukti pelaksanaan program CSR. Oleh karena itu, mutu bangunan tersebut tidak bisa digaransi sesuai dengan nilai dana yang dikeluarkan Program CSR.

Audit dalam penggunaan dana sangat penting untuk menilai efektifitas dan ketepatan penggunaan anggaran. Jika audit dipahami sebagai pemeriksaan apakah kinerja telah sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004 : 213), persoalannya adalah standar kriteria program CSR tersebut tidak pernah dibuat. Pihak PT. Adaro Indonesia tidak memiliki ketentuan tentang standar biaya umum atau ketentuan lain dalam penggunaan CSR. Meskipun demikian, perusahaan dapat mewajibkan sekolah/madrasah atau pihak ketiga untuk merujuk kepada standar biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan tetapi itu tidak dilakukan PT. Adaro Indonesia.

Oleh karena itu, sekolah/madrasah menggunakan dana CSR tidak berdasarkan standar biaya atau ketentuan yang mengatur cara penggunaan dana tersebut sehingga biaya-biaya yang dibelanjakan sekolah/madrasah bisa saja

terlalu mahal atau terlalu murah dari harga pasar. Hal itu akan menyebabkan pemborosan biaya atau berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai karena kualitas yang rendah.

6. Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana CSR Pendidikan

Pada bagian terdahulu telah ditulis bahwa program CSR mengharuskan pengawasan oleh pihak yang ditetapkan oleh bupati. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh sebuah tim pengawas yang terdiri dari para camat dimana program CSR tersebut dilaksanakan. Di Kabupaten Balangan, para camat yang bertugas sebagai pengawas disebutkan secara jelas dalam SK Bupati Balangan. Lebih detil tentang susunan pengawas tersebut dapat di lihat pada lampiran 4.1. Tim pengawas tersebut pada prinsip bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh program CSR. Pada penelitian ini telah disebutkan bahwa pengawasan oleh para camat tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Pengawasan terhadap program CSR yang tidak optimal menjadi salah satu faktor program CSR pendidikan tidak berdampak bagi peningkatan kualitas pendidikan. Schick (1978) mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap anggaran untuk menjamin tidak terjadi pemborosan dan salah kelola terhadap dana yang telah dialokasikan. Pengawasan merupakan upaya pencegahan terhadap penyelewengan serta kelebihan pengeluaran. Pada program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia, pengawasan dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia yang juga bertindak sebagai pelaksana program. Pengawasan tersebut tidak efektif karena pengawas bukan pihak yang independen yang terpisah dari struktur perusahaan atau pelaksana program. Pada tataran tertentu, pengawasan oleh pelaksana program CSR dapat menjamin alokasi telah digunakan sesuai dengan distribusinya, tetapi pada sisi lain pengawasan oleh pelaksana program sangat sulit menjamin tidak adanya praktik manipulasi dalam penggunaan

anggaran. Misalnya, pada tahun 2010 program CSR PT Adaro Indonesia membangun perpustakaan untuk SMAN 1 Tanta dengan alokasi Rp.150.000.000,- Pihak CSR PT Adaro Indonesia beberapa kali datang ke SMAN 1 Tanta untuk melihat proses pembangunan tersebut. Pengawas yang tidak independen akan membuka peluang terjadinya kolusi antara pelaksana, yang sekaligus juga sebagai pengawas, dengan perusahaan kontraktor.

Pengawasan yang tidak dijalankan pada fase penganggaran oleh tim independen juga membuka peluang digunakannya dana CSR untuk kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itulah, dana CSR pendidikan didistribusikan untuk program yang tidak begitu relevan dengan pendidikan, dalam hal ini sekolah/madrasah. Pengawasan terhadap anggaran tersebut merupakan proses yang harus dijalankan secara maksimal. Melalui pengawasan proses penggunaan anggaran akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terkait dengan hal tersebut, pengawasan adalah proses pengendalian dan penyesuaian organisasi dari yang tidak ideal menjadi ideal. Dengan kata lain, pengawasan bertujuan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan anggaran merupakan keharusan dalam suatu organisasi. Hal itu disebabkan: (1) sering terjadi benturan kepentingan antara tujuan individual/kelompok dengan tujuan organisasi sehingga diperlukan alat/personil yang dapat mengembalikan penyimpangan kepada tujuan semula. (2) Tenggang waktu saat tujuan dirumuskan dan tujuan diwujudkan yang membuka peluang

untuk terjadi penyimpangan. (3) pengawasan bertujuan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dana yang tersedia.

Pengawasan dilakukan untuk mengontrol apakah target pada periode berjalan telah tercapai. Jika tidak tercapai, diperlukan langkah untuk mengetahui apa hambatan dan cara mengatasinya. Terkait dengan hal itu, pengawasan sangat erat berhubungan dengan monitoring anggaran. Pelaksanaan monitoring anggaran adalah bagian dari pengawasan pengelolaan anggaran atas fakta-fakta dan informasi yang akurat sebagai bagian dari kontrol pelaksanaan anggaran kegiatan dan program sekolah.

Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana pendidikan sudah menjadi gejala yang umum terjadi di Indonesia. Pada tahun 2010, laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional mendapat penilaian disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. BPK menyatakan disclaimer terhadap laporan keuangan Kemdiknas tahun 2010. Penilaian itu, antara lain, terkait dana tidak disalurkan dan tidak disetor ke kas negara, yakni dana bantuan sosial sebesar Rp 69,3 miliar, tunjangan profesi dan tagihan beasiswa tahun 2010 kurang dibayar Rp 61,9 miliar. Lemahnya pengawasan terhadap anggaran pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya persoalan tersebut. (Kompas, 2011, 22, 7)

Pengawasan yang tidak maksimal pada pengelolaan program CSR PT Adaro Indonesia tidak terlepas dari budaya Banjar yang lebih memaknai pengawasan sebagai mencari aib orang lain. Stigma tersebut bersumber dari pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam yang menganggap pengawasan sebagai mencari aib orang lain dan harus dihindari. Pada masyarakat Banjar,

ajaran agama sangat berpengaruh hampir dalam seluruh aspek kehidupan. Hal itu berimplikasi pada praktik pendidikan. Para pengawas sekolah serta kepala sekolah yang cenderung menegakkan aturan juga dimusuhi oleh para guru. Mereka menganggap pengawas dan kepala sekolah tersebut hanya mencari-mencari kesalahan orang lain meskipun pada kenyataannya itu benar. Kepala sekolah yang “mencoret” daftar hadir seorang guru akan menjadi topik perbincangan serta cenderung disalahkan di kampung meskipun guru tersebut sebenarnya tidak hadir ke sekolah. Oleh karena itulah, pengawasan terutama di sekolah menjadi sulit dilakukan.

Terlepas dari hal tersebut, pengawas dalam program CSR dapat berperan ganda sebagai konsultan program CSR di madrasah/sekolah. Konsultan tidak berarti ahli dalam segala hal terkait program pengembangan sekolah atau pembiayaan pendidikan. Akan tetapi lebih kepada pendampingan yang selalu berada bersama pihak sekolah. Hal itu diungkapkan John dan Morphet (1975 : 83) Peran konsultan diperlukan untuk menambah kepercayaan diri kepala sekolah, guru, dan semua pihak yang terkait program CSR tersebut. Ide-ide pengembangan tidak sepenuhnya diharapkan dari konsultan tetapi konsultan dapat menemukan ide-ide yang lebih baik dari pihak sekolah yang berkompeten. Hal penting lain adalah kehadiran konsultan sepanjang waktu untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman. Konsultan juga harus mampu menjelaskan sesuatu dengan lebih baik dari pihak sekolah dan seiring waktu di sekolah harus ada yang mampu menjelaskan sebaik konsultan.

Peran pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal perusahaan atau para camat atau konsultan independen tetapi dapat pula dengan memberdayakan publik atau lembaga sosial kemasyarakatan sebagai bentuk kontrol sosial. Pengawasan tersebut tidak hanya pada proses implementasi program tetapi sejak perencanaan program. Peran pengawasan oleh publik tersebut merupakan penyeimbang dari otonomi perusahaan yang sangat luas. Pengawasan publik tersebut untuk menjamin bahwa hak-hak publik dalam program CSR telah mereka sebagaimana yang telah direncanakan dalam anggaran program.

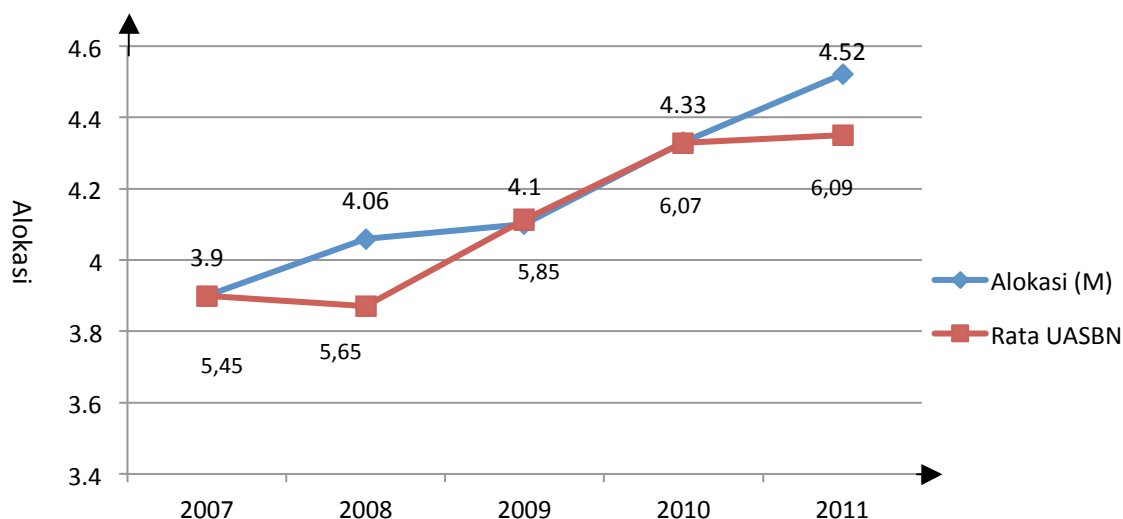
7. Hasil dan Dampak Program CSR Pendidikan

Pada bagian terdahulu telah dapat dilihat bahwa hasil program CSR sangat terbatas pada manfaat langsung dari program CSR dan tidak berdampak secara konsisten bagi kualitas pendidikan. Hal itu bisa dilihat dari proses pendidikan serta prestasi akademik siswa. Berdasarkan salah satu indikator pencapaian program CSR PT. Adaro Indonesia yaitu peningkatan hasil Ujian Nasional, dapat di lihat bagaimana hasil UN Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong dibandingkan dengan alokasi CSR pendidikan.

a. Kabupaten Balangan

Jika dibandingkan alokasi CSR pendidikan di Kabupaten Balangan dengan hasil pendidikan yang ditunjukkan dengan rata-rata UASN SD/MI. Keefektifan dana CSR pendidikan di Kabupaten Balangan mengalami pasang surut. Dana CSR pendidikan tampak paling efektif digunakan pada tahun 2009. Pada tahun tersebut, dengan alokasi CSR pendidikan 4,1 milyar rupiah output yang dihasilkan adalah 5,85. Tingkat efektifitas tersebut paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika digambarkan dalam bentuk kurva dapat dilihat pada tabel berikut

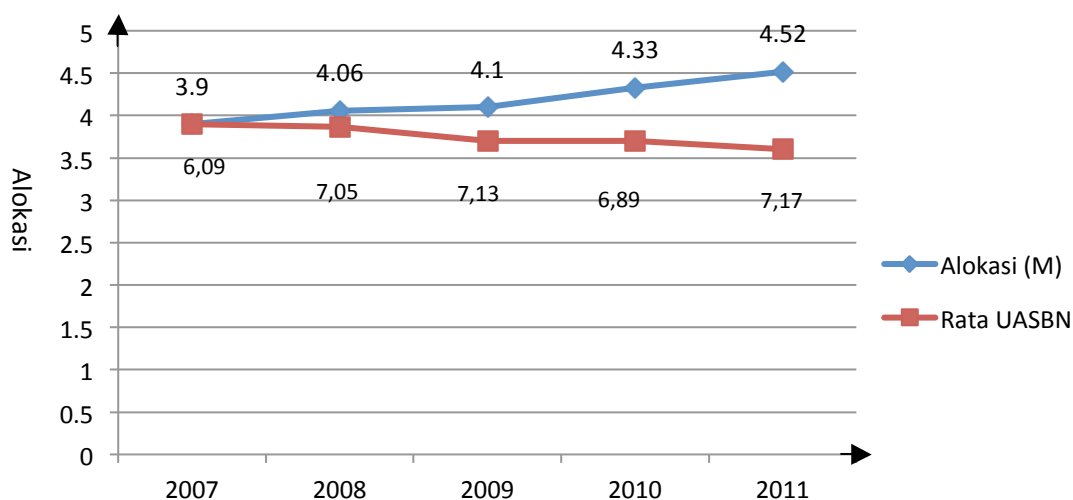
GAMBAR 4.5
ALOKASI CSR PENDIDIKAN DAN HASIL UASBN SD/MI
DI KABUPATEN BALANGAN



Pada gambar diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tingkat SD/MI, garis nilai UASBN relatif terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, jika melihat alokasi yang didistribusikan untuk SD/MI dapat disimpulkan bahwa trend peningkatan rata-rata UASBN tersebut tidak berhubungan dengan alokasi dana CSR pendidikan. Selain itu, jika dilihat dari keefektifan biaya, peningkatan nilai rata-rata UASBN tidak sebanding dengan peningkatan alokasi CSR pendidikan di Kabupaten Balangan.

Pada tingkat SMP/MTs, keefektifan biaya yang dialokasi CSR pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut

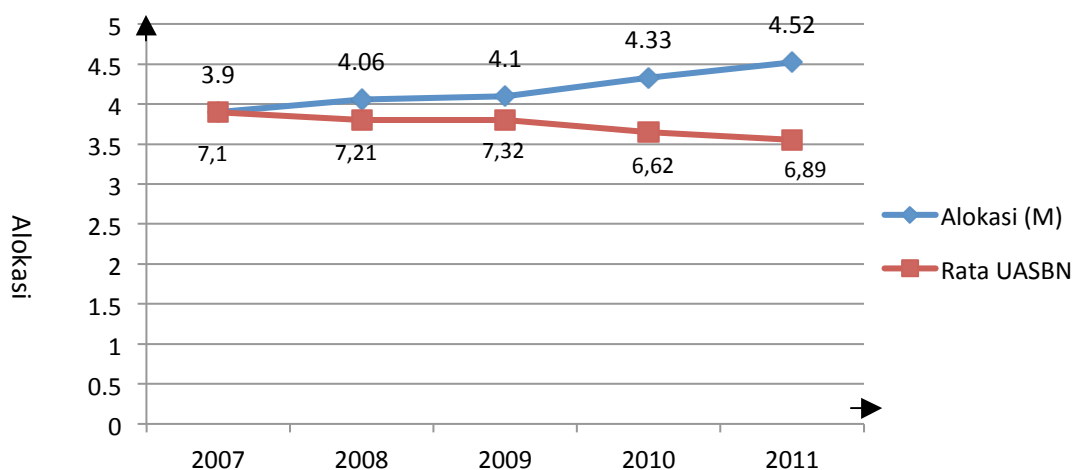
GAMBAR 4.6
 ALOKASI CSR PENDIDIKAN DAN HASIL UN SMP/MTS
 DI KABUPATEN BALANGAN



Pada gambar tersebut terlihat bahwa kurva keefektifan alokasi CSR pendidikan mengalami penurunan. Meskipun, nilai rata-rata UN SMP/MTs mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan 2009, keefektifan biaya justru mengalami penurunan. Dengan alokasi CSR yang lebih dari 4,1 milyar rupiah, nilai rata-rata UN seharusnya dapat lebih tinggi lagi.

Pada tingkat SMA/MA, pengelolaan alokasi CSR pendidikan juga tidak efektif. Keefektifan biaya yang ditunjukkan dengan perbandingan alokasi CSR pendidikan dengan rata-rata UN SMA/MA di Kabupaten Balangan dapat di lihat pada gambar berikut

GAMBAR 4.7
ALOKASI CSR PENDIDIKAN DAN HASIL UN SMA/MA
DI KABUPATEN BALANGAN

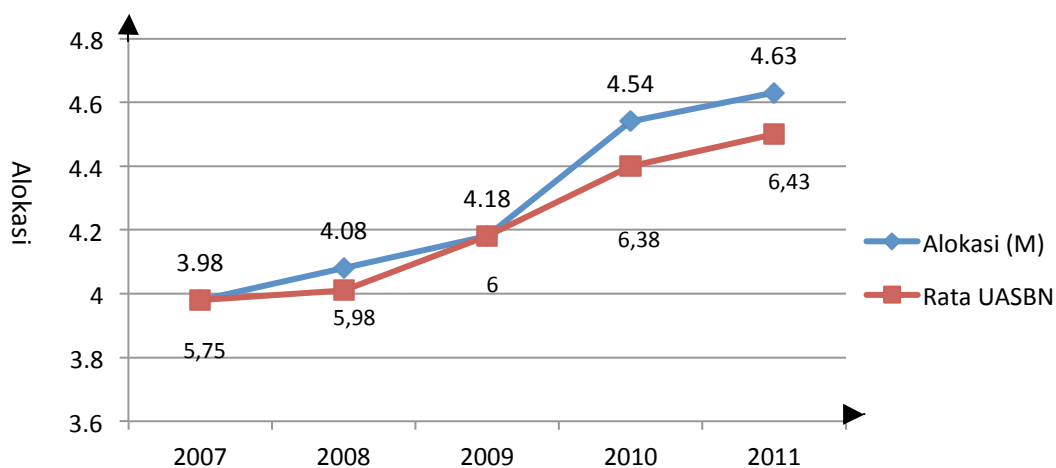


Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa rata-rata UN SMA/MA mengalami penurunan tahun 2010 menjadi 6,62 yang sebelumnya mencapai 7,32. Di samping peningkatan nilai rata-rata UN yang tidak konsisten, keefektifan biaya CSR pendidikan juga terus mengalami penurunan. Dengan kata lain, rata-rata UN SMA/MA tidak sebanding dengan alokasi CSR pendidikan yang didistribusikan di Kabupaten Balangan.

b. Kabupaten Tabalong

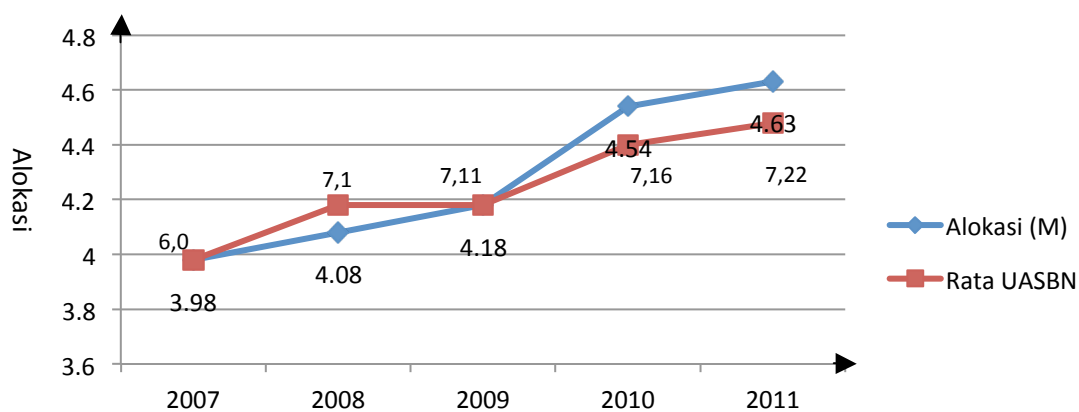
Seperti halnya di Kabupaten Balangan, efektifitas alokasi CSR pendidikan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat dari perbandingan alokasi CSR dengan rata UASBN/UN yang dicapai. Efektifitas tersebut tercermin dalam gambar-gambar berikut

GAMBAR 4.8
ALOKASI CSR PENDIDIKAN DAN HASIL UASBN SD/MI
DI KABUPATEN TABALONG



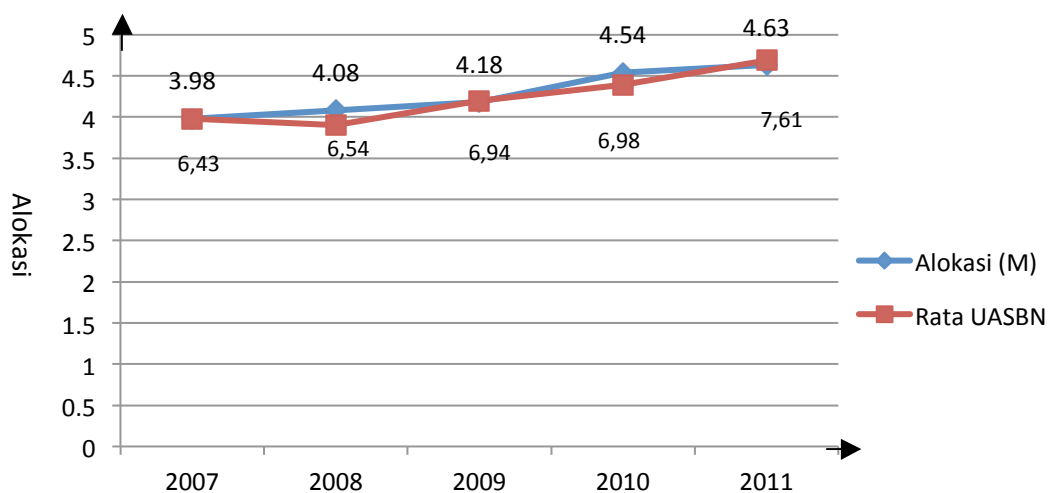
Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa biaya CSR pendidikan tidak efektif secara konsisten dalam meningkatkan hasil pendidikan di tingkat SD/MI. Jika dibandingkan dengan tingkat efektifitas biaya di tahun 2007, alokasi CSR hanya efektif meningkatkan hasil pendidikan yang ditunjukkan dengan rata-rata UASBN pada tahun 2009. Selama dua tahun terakhir, tingkat efektifitas biaya mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan membandingkan dengan efektifitas biaya di tahun 2007, dengan alokasi CSR sebesar 4,54 milyar rupiah di tahun 2010, rata-rata UASBN seharusnya bisa mencapai 6,56.

GAMBAR 4.9
 ALOKASI CSR PENDIDIKAN DAN HASIL UN SMP/MTS
 DI KABUPATEN TABALONG



Pada gambar di atas, efektifitas biaya sangat bervariasi. Pada tahun 2008, alokasi CSR pendidikan relatif lebih efektif meningkatkan rata-rata UN dibandingkan dengan tahun 2007. Akan tetapi, efektifitas biaya mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, dengan alokasi yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, rata-rata UN seharusnya dapat ditingkatkan lagi.

GAMBAR 4.10
 ALOKASI CSR PENDIDIKAN DAN HASIL UN SMA/MA
 DI KABUPATEN TABALONG



Pada gambar tersebut terlihat bahwa rata-rata UN mengalami peningkatan yang relatif sebanding dengan peningkatan alokasi CSR pendidikan. Efektifitas biaya hanya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2010. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alokasi CSR pendidikan pada tingkat SMA/MA ini telah digunakan secara efektif jika melihat peningkatan hasil UN selama lima tahun terakhir.

Terlepas dari perbandingan alokasi dengan rata-rata UN tersebut diatas, rata-rata sekolah/madrasah yang menjadi lokasi penelitian ini tidak menunjukkan fenomena umum di tingkat kabupaten tersebut. Di Kabupaten Balangan, efektifitas biaya CSR pendidikan terlihat relatif lebih baik pada tingkat SD/MI yang sangat sedikit mendapat alokasi CSR. Pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA

yang mendapat alokasi CSR pendidikan melalui Bimbel Primagama, efektifitas biaya justru relatif tidak stabil dan mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir.

Di Kabupaten Tabalong, terlihat variasi nilai pada sekolah model binaan PT. Adaro Indonesia yang menunjukkan ketidakkonsistenan dampak program sekolah model terhadap nilai UN/UASBN tersebut. Nilai UN SMAN 1 Tanta mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir demikian juga SDN Laburan, tetapi SMPN 2 Tanta mengalami penurunan. Di sisi lain, MAN 1 Tanjung yang bukan sekolah model, juga mengalami penurunan pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2011. MTs Ar Raudlah dan MIN Limau Manis, yang bukan sekolah model, mengalami peningkatan hasil UN selama empat tahun terakhir. Dengan kata lain, peningkatan nilai UN/UASBN tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari program CSR pendidikan PT. Adaro Indonesia karena nilai UN/UASBN sekolah/madrasah yang bukan sekolah model juga mengalami peningkatan. Dengan kata lain, alokasi CSR pendidikan di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong tidak berhubungan dengan kualitas hasil pendidikan di dua kabupaten tersebut.

Hal itu disebabkan oleh distribusi dan alokasi CSR PT. Adaro Indonesia. Dampak pembiayaan terhadap hasil pendidikan, sangat terkait dengan distribusi dan alokasi dana tersebut. Alokasi yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak adanya dampak alokasi tersebut terhadap hasil pendidikan. Seperti telah disebut pada bab dua bahwa alokasi yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pendidikan adalah peningkatan kualitas guru serta fasilitas sekolah. Fasilitas dan kualitas guru harus menjadi perhatian dalam program CSR agar berdampak

maksimal terhadap hasil pendidikan. Akan tetapi, pada saat prasarana telah memadai, pengeluaran biaya untuk prasarana harus dikurangi. Sarana prasarana, fasilitas belajar mengajar, dan materi pembelajaran juga penting tetapi disediakan dalam kondisi minimal untuk mencapai kualitas proses belajar mengajar. (Nishimuko, 2007)

Riset-riset telah menunjukkan bahwa alokasi yang sangat berpengaruh terhadap hasil adalah peningkatan kualitas guru. Hanushek (2000) berpendapat bahwa meningkatkan kualitas guru merupakan sebuah kunci penting dari peningkatan prestasi siswa. Hanushek berargumen bahwa kualitas sebuah sekolah dapat dipengaruhi kapasitas kelas (*class size*), pengalaman guru, dan gaji guru. Dukungan pada guru melalui evaluasi, pengawasan dan umpan balik, juga berefek pada kualitas pembelajaran, itu akan menjamin akuntabilitas dalam pembelajaran. (Nishimuko, 2007)

Elliot (Ross, et.all, 2007 : 481) menegaskan bahwa prestasi siswa akan meningkat jika biaya digunakan untuk membayar guru dan melatih guru dalam metode pengajaran yang efektif. Normore dan Ilon (2006) menyebutkan alokasi yang efektif untuk meningkatkan prestasi siswa adalah alokasi untuk meningkatkan rasio tenaga administrasi/guru/pembantu guru dan meningkatkan kualitas guru.

Selain untuk peningkatan kualitas guru, infrastruktur/fasilitas sekolah harus pula mendapat perhatian dalam penganggaran. Fasilitas yang baik akan menjadi faktor penting dalam kualitas pembelajaran. Penelitian Crampton (2009) yang dilakukan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa pengeluaran untuk

infrastruktur sekolah termasuk pemeliharaan perlengkapan, renovasi, komputer, dan perlengkapan sekolah lain memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan prestasi siswa. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kontribusi yang paling signifikan terhadap hasil pembelajaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk *instructional support*. *Instructional support* tersebut meliputi pengeluaran biaya untuk supervisi pembelajaran, pengembangan kurikulum, pelatihan pembelajaran dan media, perpustakaan, audio visual, televisi, dan komputer untuk pembelajaran. Morilla dan Roman (2011) juga menekankan tentang pengaruh ketersediaan infrastruktur dasar sekolah (air, listrik, drainase limbah), fasilitas pengajaran (fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan), yang dilengkapi pula dengan buku-buku perpustakaan dan komputer memiliki dampak terhadap prestasi siswa sekolah dasar di Amerika Latin. Selain itu, Branham (2004) menyimpulkan bahwa kualitas infrastruktur sekolah memiliki efek yang signifikan terhadap kehadiran di sekolah dan tingkat putus sekolah. Menurutnya, siswa kurang menyukai ke sekolah yang membutuhkan perbaikan (rusak), gedung sekolah sementara, dan sekolah yang kekurangan tenaga pelayanan.

Pada satu sisi, pelaksanaan workshop/pelatihan guru oleh LP3AP sangat tepat. Merujuk kepada riset di atas, kegiatan itu diyakini akan lebih dapat meningkatkan kualitas proses belajar dengan kelengkapan sarana prasarana. Akan tetapi, pada tahap implementasi hasil workshop/pelatihan tersebut tersebut tidak terlaksana dalam proses belajar mengajar di kelas. Workshop/pelatihan guru sekolah model dan sekolah lain di Kabupaten Tabalong secara kuantitas memang diikuti oleh banyak peserta tetapi praktiknya tidak sampai ke proses pembelajaran

di kelas. Gagalnya implementasi dalam proses pembelajaran disebabkan oleh tidak adanya evaluasi serta pengawasan dan *feedback*. Program workshop/pelatihan guru tidak disertai dengan pengawasan dan evaluasi oleh pihak LP3AP.

Selain itu, guru berharap program CSR ini akan memberikan dampak bagi penghasilan mereka. Ketika workshop/pelatihan itu mengharuskan metode baru untuk pembelajaran, mereka berharap ada insentif untuk itu. Beberapa wawancara mengisyaratkan bahwa guru tidak mau disulitkan dengan berbagai metode baru. Pernyataan itu ada hubungannya dengan teori-teori yang menyatakan bahwa gaji guru berhubungan dengan kualitas pendidikan.

Kelengkapan sarana prasarana juga berhubungan dengan penerapan workshop/pelatihan tersebut. Pada sekolah-sekolah model : SDN Laburan, SMPN 2 Tanta, dan SMAN 1 Tanta fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran masih belum lengkap. Penggunaan multimedia untuk pembelajaran masih kurang optimal karena media tersebut masih tidak cukup untuk semua kelas. Oleh karena itu, guru-guru relatif lebih memilih untuk menggunakan metode konvensional daripada menggunakan hasil workshop/pelatihan yang dilaksanakan oleh LP3AP.

7. Rangkuman Pembahasan

Diskusi pada bagian ini dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Pada fase perencanaan, partisipasi sekolah dan madrasah yang rendah tidak seiring dengan trend *school base management* yang dapat meningkatkan hasil prestasi siswa.
- b. Mekanisme dan proses penyaluran dana CSR pendidikan tidak memiliki peraturan yang dapat memperkecil peluang penyalahgunaan dana CSR. Hal itu terkait dengan tidak adanya perundangan yang tegas tentang tindak pidana korupsi di sektor swasta.
- c. Distribusi dan alokasi mencerminkan kepentingan-kepentingan pemerintah kabupaten sehingga menyebabkan program CSR tidak dilaksanakan secara efektif. Bimbingan belajar oleh Primagama lebih tepat jika dilakukan oleh sekolah/madrasah melalui kegiatan remedial. Rendahnya alokasi yang langsung untuk sekolah/madrasah dapat menurunkan dampak biaya terhadap prestasi siswa. Distribusi dan alokasi seharusnya lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas guru dan kelengkapan sarana prasarana pembelajaran.
- d. Penggunaan oleh pihak ketiga (Primagama, LP3AP, dan GNOTA) menjadi pemicu biaya (*cost driver*) sehingga alokasi yang benar-benar sampai untuk program CSR di sekolah/madrasah berkurang. Di samping itu, pihak ketiga tidak melibatkan sekolah/madrasah dalam memutuskan program/kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Hal itu akan berdampak bagi menurunnya kualitas program dan hasil dari program tersebut.

- e. Pertanggungjawaban yang tidak melalui proses audit dan tidak diharuskan diumumkan kepada publik membuka peluang terjadinya penyelewengan dalam penggunaan dana CSR. Hal itu akan berimplikasi pada menurunnya kualitas program CSR karena biaya yang sampai untuk program tersebut menjadi berkurang.
- f. Pengawasan program CSR pendidikan yang tidak optimal menyebabkan permasalahan program CSR pendidikan tidak dapat diantisipasi secara cepat. Pada kondisi demikian, pengawas yang sekaligus berperan sebagai konsultan menjadi sangat penting. Pengawasan oleh publik dan media seharusnya juga menjadi bagian dari program CSR pendidikan.
- g. Dampak program CSR pendidikan yang belum maksimal serta tidak terlihat konsisten terhadap kualitas pendidikan di sekolah/madrasah sangat berhubungan dengan kelemahan dalam perencanaan sehingga distribusi dan alokasi serta penggunaan yang tepat pula. Selain itu, pengawasan yang tidak optimal dan pertanggungjawaban yang kurang transparan dalam program CSR pendidikan juga menjadi faktor rendahnya dampak program CSR pendidikan.

Persoalan-persoalan dalam program *corporate social responsibility* tersebut dapat dipecahkan secara strategis dengan sebuah model pembiayaan pendidikan yang berbasis kepada siswa dan melibatkan partisipasi sekolah/madrasah serta masyarakat.

C. Strategi Pengelolaan Dana CSR Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan : Sebuah Model

1. Rasional

Model Strategi Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan ini dikembangkan untuk menjadi solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan dana CSR pendidikan. Permasalahan yang menjadi titik berangkat pengembangan model ini dirumuskan sebagai berikut

- a. Pada fase perencanaan program/kegiatan sangat didominasi oleh pemerintah kabupaten dan mengabaikan partisipasi, aspirasi, serta kebutuhan sekolah/madrasah.
- b. Distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan tidak didasarkan pada desa terdampak serta tidak sampai langsung kepada sekolah/madrasah.
- c. Penggunaan dana CSR pendidikan mayoritas dilaksanakan oleh pihak ketiga dan sangat sedikit yang digunakan langsung sekolah/madrasah.
- d. Pengawasan dalam pengelolaan dana CSR tidak optimal dilaksanakan.
- e. Transparansi tidak dilaksanakan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana CSR pendidikan.

Model ini merupakan strategi agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan sehingga program CSR pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Di samping itu, model ini memberikan peluang yang lebih besar bagi CSR pendidikan untuk memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

2. Landasan Filosofis

Model ini bertolak dari pemaknaan terhadap keadilan dalam pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak semua orang tanpa membedakan status sosial, ras, dan agama. Di sisi lain, hakikat keadilan (*equity*) dalam pendidikan merupakan landasan utama dalam model ini. Berangkat dari filosofis ini, pada program CSR pendidikan siswa yang berada di daerah terdampak operasional tambang tidak bisa disamakan dengan siswa yang tidak tinggal di daerah terdampak. Perbedaan tersebut menunjukkan makna hakikat dari *equity* (keadilan). Miles dan Roza (2006: 46) memaknai *horizontal equity* sebagai *equal treatment of equal students*, dan *vertical equity* sebagai *requiring higher spending for students with greater needs*. Dengan kata lain, keadilan lebih berhubungan dengan kebutuhan riil siswa, bukan bermakna kesamaan alokasi untuk setiap siswa.

Hal itu terkait pula dengan filosofi CSR. Pada hakikatnya, CSR dilaksanakan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, program CSR perusahaan seharusnya tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan dimana masyarakat tersebut berada. Dengan kata lain, program CSR seharusnya tidak dibagikan secara merata kepada seluruh wilayah kabupaten tanpa memperhatikan lokasi daerah apakah terdampak atau tidak. Program CSR berbeda dengan pajak yang dibayar oleh perusahaan tambang kepada daerah. Pajak atau royalti tersebut dapat dibagi secara merata ke seluruh

kabupaten melalui berbagai bentuk pembangunan masyarakat sedangkan dana CSR didistribusikan berdasarkan dampak operasional tambang di daerah tersebut.

Demikian juga Model Strategi Pengelolaan Dana CSR Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan ini. Filosofis model ini adalah memberikan kompensasi secara merata dan adil kepada seluruh siswa yang tinggal di daerah terdampak dengan memperhatikan kebutuhan mereka dalam proses pendidikan. Dengan kata dana CSR pendidikan pada hakikatnya merupakan hak seluruh anak-anak usia sekolah yang tinggal di daerah terdampak tambang dimanapun mereka menempuh pendidikan.

3. Pengertian

Model Strategi Pengelolaan Dana CSR Pendidikan Berbasis Kebutuhan, Pemerataan, dan Keadilan adalah sebuah solusi yang ditawarkan atas persoalan-persoalan dalam pengelolaan dana CSR pendidikan perusahaan pertambangan batu bara sehingga penggunaan dana CSR menjadi efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan madrasah. Ciri khas model ini adalah metode penetapan alokasi dan distribusi dana CSR pada sebuah sekolah/madrasah yang berdasarkan jumlah siswa yang berasal dari desa terdampak (ring 1 dan ring 2). Kelebihan model ini adalah dapat mendorong kompetisi antarsekolah/madrasah untuk meningkatkan jumlah siswa dari desa terdampak dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah tersebut. Di sisi lain, model ini memprioritaskan siswa-siswa desa dari desa terdampak yang selama ini tidak menjadi dasar dalam penetapan distribusi dan alokasi program CSR.

Distribusi dan alokasi pada sebuah sekolah/madrasah sangat tergantung pada jumlah siswa dari desa terdampak yang terdaftar di sekolah/madrasah tersebut. Semakin banyak siswa dari desa terdampak, semakin besar pula dana CSR berbentuk *block grant* (swakelola) yang dialokasikan di sekolah/madrasah tersebut. Dengan demikian, sekolah dan madrasah pun akan mendapat kompensasi yang diterima secara langsung dan berhak memutuskan sendiri untuk apa dana itu digunakan berdasarkan kebutuhan siswa sehingga sejalan dengan esensi manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian, keterlibatan pihak ketiga dapat direduksi sehingga dana yang sampai langsung kepada proses pendidikan akan semakin besar, tanpa harus dibebani *cost* operasional pihak ketiga.

4. Tujuan

Model ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pengelolaan dana CSR pendidikan perusahaan pertambangan batu bara yang komprehensif tepat, dan benar dengan difokuskan kepada hal-hal berikut

- a. Kebutuhan siswa. Dana CSR pendidikan didistribusikan dan dialokasikan berdasarkan aspirasi sekolah/madrasah dengan melihat kebutuhan riil siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan akan dapat langsung memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang berimplikasi kepada peningkatan prestasi siswa.
- b. Pemerataan. Dengan model ini, program CSR pendidikan akan menyentuh seluruh siswa yang tinggal pada desa terdampak berdasarkan kebutuhan riil mereka.

- c. Keadilan. Program CSR pendidikan yang dikelola dengan model ini memberikan kompensasi kepada siswa yang tinggal di desa terdampak untuk proses pendidikan mereka. Kompensasi tersebut merupakan hak karena mereka dampak operasional tambang. Itulah yang membedakan dengan siswa yang tidak tinggal di desa terdampak. Alokasi yang berbeda antara siswa dari daerah terdampak dengan siswa yang tidak terdampak merupakan cerminan dari keadilan dari pengelolaan dana CSR pendidikan dalam model ini.

5. Prinsip-Prinsip

Model ini bertolak dari prinsip pembiayaan pendidikan dan prinsip dalam CSR. Prinsip pembiayaan pendidikan yang bersumber dari program CSR dengan merujuk pada esensi CSR itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam praktik pengelolaan dana CSR pendidikan perusahaan pertambangan batu bara. Prinsip-prinsip model ini adalah

- a. Kebutuhan siswa. Program CSR pendidikan dalam model didasarkan pada kebutuhan siswa dalam pembelajaran baik akademik atau non akademik.
- b. Pemerataan dan keadilan. Model ini menjamin program CSR menyentuh dan dirasakan oleh seluruh siswa yang tinggal di desa terdampak dimanapun mereka menempuh pendidikan.
- c. Transparansi. Semua proses dalam pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran dana yang diterima dari CSR pendidikan harus detil dan terbuka sehingga publik dapat ikut mengawasi program CSR pendidikan di sekolah/madrasah

yang bersangkutan. Transparansi akan meningkatkan alokasi dana yang benar-benar sampai kepada proses belajar mengajar;

- d. Akuntabilitas. penggunaan dana CSR pendidikan oleh sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta digunakan untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar;
- e. Kerja sama. Model ini berdasarkan prinsip saling menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam program CSR pendidikan. Perusahaan, siswa, pihak sekolah, pemerintah, yayasan serta masyarakat bekerja sama;
- f. Manfaat. Model ini menjamin program CSR bermanfaat bagi proses pendidikan akademik dan non akademik di sekolah/madrasah sehingga tidak terjadi pemborosan dana CSR bagi program yang tidak terkait dengan pendidikan.
- g. Tepat dan benar. Prinsip ini memberikan dasar bagi pengelolaan dana CSR pendidikan yang tepat untuk peningkatan kualitas pendidikan serta benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Satu program/kegiatan, satu sumber dana. Prinsip ini merupakan rambu-rambu agar tidak terjadi pemborosan dana dan penyelewengan dalam penggunaan karena sumber dana ganda untuk satu program/kegiatan.
- i. *Sustainability*, alokasi dana CSR yang diterima sekolah/madrasah harus digunakan untuk kegiatan yang berdampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

6. Unsur-Unsur

Seperti telah disebutkan pada awal bagian ini, kekhasan model ini terletak pada metode penetapan distribusi dan alokasi dana CSR pada sekolah/madrasah. Beberapa unsur model ini tersebut adalah

- a. Siswa dari desa ring 1 dan 2. Unsur ini merupakan dasar dalam penetapan alokasi CSR pada sekolah/madrasah. Unsur ini adalah ciri utama dari model ini yang menunjukkan pemerataan dan keadilan dalam alokasi program CSR.
- b. Alokasi Program CSR pendidikan perusahaan pertambangan batu bara. Unsur ini menggambarkan sumber pembiayaan pendidikan yang menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui program CSR;
- c. Konsultan/pengawas. Unsur ini sangat penting untuk menjamin tidak terjadinya *double funding* dalam program/kegiatan yang dilaksanakan sekolah/madrasah serta membantu sekolah/madrasah dalam keseluruhan proses pelaksanaan program CSR. Konsultan/pengawas ditetapkan oleh ditunjuk yayasan yang dibentuk perusahaan dan dinas pendidikan/kementerian agama kabupaten. Secara non struktural, masyarakat juga didorong untuk melakukan pengawasan;
- d. Kebutuhan siswa. Unsur ini mencerminkan apa saja yang dibutuhkan siswa terkait dengan pendidikan sesuai dengan kondisi siswa dan kondisi setempat. Tidak hanya kebutuhan siswa dari desa ring 1 dan 2, tetapi juga kebutuhan seluruh siswa dimana program CSR pendidikan dilaksanakan;
- e. Program atau kegiatan CSR di sekolah/madrasah. Unsur ini merupakan segala upaya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas belajar mengajar.

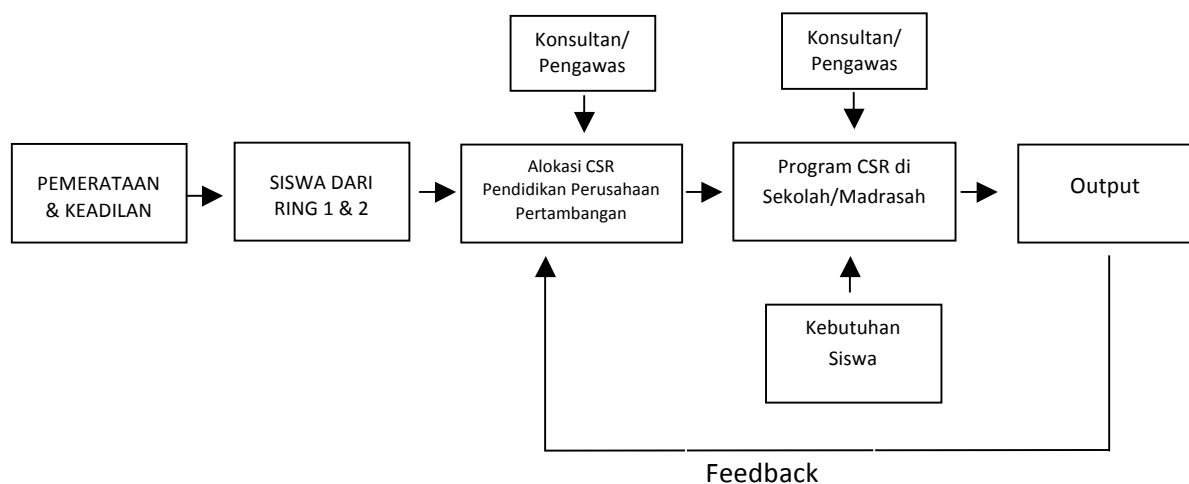
Unsur ini juga menjadi dasar dalam menetapkan pendistribusian dan pengalokasian dana CSR yang diterima sekolah/madrasah. Alokasi untuk sebuah program/kegiatan berdasarkan pertimbangan apakah program/kegiatan tersebut telah dibiayai oleh sumber dana selain dana CSR;

- f. Output, unsur ini menunjukkan hasil dari program CSR yang dilaksanakan di sekolah/madrasah sebagai dukungan terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat. Output dari program CSR pendidikan harus mencerminkan peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan .

Gambaran tentang model ini dapat dicermati pada gambar berikut

GAMBAR 4.11

MODEL STRATEGI PENGELOLAAN DANA CSR PENDIDIKAN
BERBASIS KEBUTUHAN, PEMERATAAN, DAN KEADILAN



Pada gambar tersebut terlihat bahwa model ini lebih menekankan pada bagaimana program CSR perusahaan pertambangan batu bara didistribusikan dan dialokasikan pada sekolah/madrasah. Pada fase awal, alokasi total CSR pendidikan pada sekolah/madrasah ditetapkan berdasarkan jumlah siswa dari desa ring 1 dan 2 pada sekolah/madrasah tersebut. Dengan kata lain, penetapan alokasi yang diterima sekolah sepenuhnya berdasarkan jumlah siswa dari desa ring 1 dan 2 pada sekolah/madrasah tersebut sebagai bentuk pemerataan dan keadilan dalam program CSR pendidikan. Alokasi tersebut diserahkan kepada pihak sekolah/madrasah dengan swakelola atau *blockgrant* sehingga mereka dapat sepenuhnya menetapkan untuk apa dana CSR tersebut dengan melihat kebutuhan siswa di sekolah/madrasah tersebut. Semua proses dalam model ini melibatkan konsultan pendamping/pengawas yang ditunjukan yayasan dan dinas pendidikan kabupaten/Kemenag kabupaten sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Dana yang bersumber dari program CSR merupakan dana komplementer bagi sekolah/madrasah disamping dari pemerintah serta sumber lain. Oleh karena itu, kegiatan/program yang dilaksanakan sekolah/madrasah harus diiringi dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi *double funding* dari dana CSR dan sumber lain. Pertanggungjawaban juga diharuskan untuk transparan sehingga publik bisa mengetahui semua yang terkait dengan alokasi CSR di sekolah/madrasah tersebut.

7. Prosedur Pelaksanaan Model

Sebelum model baru ini diaplikasikan, pihak perusahaan harus melakukan sosialisasi program kepada masyarakat serta kepada sekolah/madrasah, dan pihak

pemerintah kabupaten. Sosialisasi yang baik akan menghindari resistensi masyarakat, sekolah/madrasah, pemerintah, dan pihak lain yang merasa terancam kepentingannya. Titik berat sosialisasi adalah memberikan pemahaman bahwa model ini merupakan sebuah cara yang berpihak kepada masyarakat desa terdampak secara proposional melalui peningkatan kualitas pendidikan yang melibatkan sekolah/madrasah.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, pemerintah kabupaten, serta sekolah/madrasah. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa, *flyer*, brosur, baliho, serta media lain yang mudah diakses oleh publik. Salah satu faktor penting keberhasilan model ini adalah sosialisasi program kepada publik.

Penerapan model ini disusun dalam beberapa tahap yang melibatkan Dinas Pendidikan kabupaten/Kemenag Kabupaten, pihak perusahaan pertambangan, sekolah/madrasah, masyarakat, serta yayasan sebagai perpanjangan tangan perusahaan. Model ini lebih fokus pada penetapan distribusi dan alokasi dana CSR yang diterima sekolah/madrasah. Model ini dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagaimana digambarkan pada gambar berikut

GAMBAR 4.12

ALUR PROSES PENGELOLAAN DANA CSR PENDIDIKAN

TAHAPAN	PENETAPAN ANGGARAN TOTAL CSR PENDIDIKAN	PENETAPAN DISTRIBUSI DAN ALOKASI DANA PADA SEKOLAH/MADRASAH	PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH/MADRASAH	IMPLEMENTASI & PENGGUNAAN DANA PROGRAM	PENGAWASAN	PERTANGGUNG JAWABAN SEKOLAH/MADRASAH	EVALUASI TERHADAP PROGRAM
Perusahaan	●	●			●		●
Pemerintah Kabupaten	●						
Konsultan Pengawas					●		●
Sekolah Madrasah		●	●	●		●	
Masyarakat					●		

a. Penetapan Anggaran Total CSR Pendidikan

Penetapan anggaran total untuk CSR pendidikan dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah kabupaten setelah anggaran total CSR disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penetapan anggaran CSR untuk pendidikan ini berdasarkan pemahaman bahwa investasi untuk pendidikan (*human investment*) sangat penting dan akan menghasilkan benefit yang lebih besar dari pada investasi pada bidang lain. Dengan pemahaman tersebut, alokasi CSR untuk pendidikan akan mendapat prioritas dibandingkan program lain.

Anggaran total pendidikan tersebut dibagi lagi menjadi dua komponen yaitu untuk daerah ring 1 dan ring 2 (50-75%) dan sisanya untuk daerah lain di kabupaten tersebut. Alokasi 50% -75% dari total CSR pendidikan tersebut akan

digunakan untuk program CSR dalam model ini sedangkan sisanya diberikan kepada sekolah/madrasah lain seperti halnya praktik pengelolaan yang berlangsung sekarang.

b. Penetapan Distribusi dan Alokasi Dana pada Sekolah/Madrasah

Proses penetapan distribusi dan alokasi dapat dilakukan setelah penetapan anggaran total CSR pendidikan untuk satu kabupaten, dan dapat pula dilakukan sebelum anggaran total tersebut ditetapkan perusahaan dan pemerintah kabupaten. Proses menetapkan distribusi dan alokasi dapat dilaksanakan sebelum anggaran total CSR tersebut ditetapkan. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan anggaran total CSR pendidikan juga terkait dengan persetujuan anggaran total CSR oleh Kementerian ESDM yang tidak bisa segera diketahui.

Penetapan distribusi dan alokasi pada model ini berdasarkan jumlah siswa dari desa terdampak yang menempuh pendidikan di sebuah sekolah/madrasah. Semakin banyak siswa dari desa terdampak, semakin besar pula alokasi dana CSR yang diterima oleh madrasah/sekolah. Dengan demikian, dimanapun menempuh pendidikan, seorang siswa dari desa terdampak akan merasakan langsung atau tidak langsung program CSR. Pihak sekolah/madrasah mengusulkan kepada perusahaan berapa jumlah siswa dari desa terdampak disertai daftar nama siswa, nama orang tua, dan alamat. Daftar itu diumumkan di lingkungan sekolah/madrasah dan ditempat strategis di sekitar sekolah/madrasah untuk menjamin transparansi dan mendorong pengawasan masyarakat. Data tentang siswa tersebut menjadi dasar penetapan distribusi dan alokasi di tingkat sekolah/madrasah. Pada penetapan ini, asas *equality* dan *equity* pada pembiayaan

pendidikan tidak terabaikan. *Equity* berkenaan dengan keadilan yang dinilai tidak berat sebelah dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya pendidikan. (Levavic, 2008)

Unit *cost* (Biaya Satuan) dapat ditetapkan dengan memilih salah satu alternatif berikut

Alternatif pertama. *Unit cost* ditetapkan oleh perusahaan dengan merujuk kepada standar biaya operasi non personalia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 disertai beberapa penyesuaian untuk membedakan unit *cost* ring 1 dengan unit *cost* ring 2. Unit *cost* berdasarkan Permen Diknas tersebut merupakan besaran minimal dan tidak menutup kemungkinan lebih besar lagi sesuai kemampuan perusahaan. Selain itu, *unit cost* ring 1 dan 2 tidak harus dibedakan, jika alokasi CSR pendidikan yang disediakan perusahaan masih mencukupi untuk itu.

Dengan mengambil contoh Kabupaten Balangan dan Tabalong, penetapan unit *cost* berdasarkan peraturan menteri tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.13
ALTERNATIF 1 PERHITUNGAN *UNIT COST*
PROGRAM CSR PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	STANDAR BIAYA	INDEKS BIAYA*	UNIT COST	UNIT <i>COST</i> RING 1	UNIT <i>COST</i> RING 2 (75%)
KAB. BALANGAN						
1	SD/MI	580.000	1.028	596.240	596.240	447.180
	SMP/MTS	710.000	1.028	729.880	729.880	547.410
	SMA/MA (Rata-Rata Prog. Keahlian)	980.000	1,028	1.007.440	1.007.440	755.580
KAB. TABALONG						
2	SD/MI	580.000	1,052	610.160	610.160	457.620
	SMP/MTs	710.000	1,052	746.920	746.920	560.190
	SMA/MA (Rata-Rata Prog. Keahlian)	980.000	1,052	1.030.960	1.030.960	773.220

* Indeks biaya berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lain

Diolah berdasarkan Permen Pendidikan Nasional Nomor 69/ 2009

Berdasarkan penetapan *unit cost* diatas, alokasi pada sebuah sekolah dapat dihitung dengan persamaan berikut

$$\text{Alokasi Dana CSR pada Sekolah X} = (\text{SR1} \times \text{UC1}) + (\text{SR2} + \text{UC2})$$

Keterangan

- SR1 = Jumlah siswa dari wilayah ring 1
 SR2 = Jumlah siswa dari wilayah ring 2
 UC1 = Unit *cost* ring 1 kabupaten tertentu
 UC2 = Unit *cost* ring 2 kabupaten tertentu

Penetapan *unit cost* dengan metode di atas mengharuskan perusahaan menyediakan dana CSR dalam jumlah tertentu setiap tahunnya berdasarkan jumlah siswa dari ring 1 dan 2 pada semua tingkat. Dengan kata lain, alternatif satu tersebut *unit cost* tidak fleksibel karena mengharuskan perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR dalam jumlah tertentu untuk memenuhi total *unit cost* dalam program CSR. Penetapan anggaran total CSR pendidikan juga harus ditetapkan setelah jumlah total siswa dari ring 1 dan 2 diketahui pada setiap awal tahun pelajaran. Hal itu akan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaksanaan program-program lain.

Alternatif 2 perhitungan *unit cost* berikut lebih fleksibel daripada alternatif satu tersebut. Alternatif 2 adalah perhitungan *unit cost* dengan membagi alokasi total untuk program CSR pendidikan untuk ring 1 dan 2 dengan jumlah total siswa dari desa-desa tersebut. Pada alternatif dua ini, antara *unit cost* siswa dari ring 1 dan 2 tidak dibedakan. Besaran *unit cost* bisa berubah-ubah dan berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lain tergantung alokasi total CSR pendidikan dan perkembangan jumlah siswa dari desa ring 1 dan 2 pada tahun berjalan.

Terlepas dari hal tersebut, alokasi untuk program ini dapat berkisar 50% sampai 75% dari total alokasi dana CSR pendidikan dan selebihnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah diluar ring 1 dan ring 2. Hal itu dapat dilihat pada persamaan berikut

$$\text{Unit Cost Kabupaten X (UCK)} = \frac{75\% \text{ Alokasi CSR Pendidikan}}{\text{Total Siswa dari desa ring 1 dan 2 di Kabupaten X}}$$

Misalnya, pada sebuah kabupaten jumlah total siswa dari desa ring 1 dan ring 2 yang sedang menempuh pendidikan ditingkat SD/MI sampai SMA/MA adalah 1679 orang sedangkan alokasi untuk program ini sebesar Rp. 3.000.000.000 (75% dari alokasi total dana CSR pendidikan). Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui *unit cost* kabupaten tersebut sebesar Rp. 1.786.778,-, seperti tergambar dibawah ini

$$1.786.778 = \frac{3.000.000.000}{1679}$$

Dengan persamaan tersebut, perbandingan *unit cost* dua kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4. 14
ALTERNATIF 2 PERHITUNGAN *UNIT COST* PROGRAM CSR
PENDIDIKAN

KABUPATEN	ALOKASI CSR PENDIDIKAN (Rp) (A)	JUMLAH TOTAL SISWA DARI RING 1 DAN 2 (B)	UNIT COST KABUPATEN (A : B)
BALANGAN	3.000.000.000,-	1679	1.786.778,-,
TABALONG	3.000.000.000,-	4676	641.573,-

Pada tabel tersebut sangat terlihat perbedaan *unit cost* yang disebabkan perbedaan jumlah siswa dari desa ring 1 dan 2 pada dua kabupaten tersebut. Disparitas (kesenjangan) besaran *unit cost* tersebut juga dapat menjadi dasar

bagi pemerintah dan masyarakat untuk menekan perusahaan untuk meningkatkan alokasi CSR pendidikan di kabupaten tersebut. Disparitas tersebut juga menunjukkan alokasi total CSR pendidikan pada kabupaten tidak proporsional berdasarkan jumlah siswa yang berhak. Idealnya, alokasi CSR pada sebuah kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat yang tinggal di desa terdampak. Semakin banyak penduduk yang tinggal di desa ring 1 dan 2, semakin besar pula alokasi CSR di kabupaten tersebut.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui alokasi dana CSR yang diterima sebuah sekolah dengan menggunakan persamaan berikut

$$\text{Alokasi Dana CSR pada Sekolah X} = (\text{SR1} + \text{SR2}) \times \text{UCK}$$

Keterangan

SR1 = siswa dari wilayah ring 1 pada sekolah/madrasah X
 SR2 = siswa dari wilayah ring 2 pada sekolah/madrasah X
 UCK = unit cost kabupaten X

Berdasarkan *unit cost* dan persamaan diatas, berikut akan dikemukakan contoh perhitungan alokasi pada sekolah X. Pada sekolah X, jumlah siswa dari desa ring 1 berjumlah 86 orang dan dari desa ring 2 adalah 53 orang, alokasi dana CSR yang akan diterima sekolah tersebut sebesar Rp. 248.362.142,-.

Hal itu dapat dapat diketahui dengan perhitungan berikut

$$248.362.142 = (86 + 53) \times 1.786.778$$

Kedua alternatif diatas memiliki kelebihan dan kekurangan terkait fleksibilitas dan ketepatan waktu. Alternatif 2 waktu cenderung tidak fleksibel bagi perusahaan dan berimplikasi pada terlambatnya penetapan anggaran total CSR pendidikan karena menunggu penetapan jumlah total siswa. Akan tetapi,

alternatif 1 dapat menghindari disparitas unit *cost* antar kabupaten. Unit cost dengan perhitungan alternatif 2 relatif lebih fleksibel dan berubah berdasarkan jumlah siswa serta alokasi total CSR pendidikan. Penetapan alokasi total CSR pendidikan juga dapat dilaksanakan awal tahun bersamaan dengan program CSR lain. Akan tetapi, kelemahannya bisa terjadi disparitas *unit cost* antarkabupaten.

Oleh karena itu, kedua alternatif tersebut dapat dipilih dengan didukung data perkiraan jumlah siswa dari ring 1 dan 2 yang akurat. Dengan perkiraan berdasarkan data yang akurat tersebut, alokasi total program CSR pendidikan bisa ditetapkan setiap awal tahun dan dapat menghindari disparitas *unit cost* antar kabupaten.

Berapa jumlah siswa dari ring 1 dan ring 2 pada sebuah sekolah/madrasah merupakan hal sangat penting dan resisten terhadap penyelewengan oleh pihak sekolah/madrasah. Hal itu berbeda dengan total alokasi CSR pendidikan yang dapat dengan mudah diketahui. Jumlah siswa dari wilayah terdampak (ring 1 dan ring 2) dapat ditetapkan melalui usul sekolah/madrasah dengan dilampiri bukti fisik data siswa. Usul tersebut diverifikasi oleh perusahaan dan diumumkan kepada publik dengan menunjukkan daftar nama siswa disertai nama orang tua dan alamat lengkap. Dengan transparansi seperti itu, masyarakat akan terlibat dalam pengawasan.

Setelah memenuhi syarat, pihak CSR perusahaan menetapkan distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan untuk masing-masing sekolah/madrasah melalui rekening sekolah/madrasah. Alokasi CSR tersebut langsung diserahkan pihak

perusahaan kepada sekolah/madrasah tanpa melalui perantara pihak ketiga sehingga dapat mengurangi tambahan biaya-biaya operasional pihak ketiga.

c. Program Pengembangan Sekolah/Madrasah

Setelah menerima penetapan alokasi, sekolah/madrasah menyusun rencana program berdasarkan kebutuhan sekolah/madrasah. Rencana sepenuhnya disusun oleh sekolah/madrasah. Rencana program pengembangan ini dasarnya merupakan anggaran yang disusun untuk menggunakan dana yang diterima sekolah/madrasah sehingga anggaran tersebut harus disesuaikan dengan alokasi tersebut. Dalam model ini, penyusunan rencana didampingi oleh konsultan/pengawas yang ditunjuk yayasan dan ahli yang ditunjuk Dinas Pendidikan kabupaten/Kemenag Kabupaten.

Prioritas penggunaan alokasi dana CSR pada sekolah/madrasah adalah

- 1) Peningkatan kualitas guru;
- 2) Pengadaan Media Pembelajaran;
- 3) Kegiatan Ekstra Kurikuler yang menjadi ciri khas sekolah/madrasah;
- 4) Beasiswa khusus untuk siswa dari desa terdampak operasional tambang;
- 5) Tabungan Dana Abadi Sekolah;
- 6) Pengelolaan dan insentif konsultan/pengawas.

Prioritas tersebut dapat saja berubah sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah dengan tetap memperhatikan program/kegiatan apa yang telah dialokasikan oleh sumber biaya yang lain. Sekolah/madrasah yang ingin menjadikan sekolah/madrasah mereka sebagai *green school*, dapat mengoptimalkan dana untuk program tersebut. Sementara sekolah lain memiliki

keinginan untuk menjadikan sekolah mereka sebagai sekolah yang memiliki ciri khas penguasaan Matematika, dapat menggunakan alokasi dana CSR untuk program tersebut. Dengan demikian, semua sekolah memiliki ciri khas masing-masing, yang bersifat akademik atau yang non akademik.

Rencana program serta alokasinya tersebut minimal memuat maksud dan tujuan, anggaran dana, dan indikator keberhasilan. Penyusunan rencana tersebut didampingi oleh pihak Dinas Pendidikan atau Kemenag Kabupaten serta yayasan. Keterlibatan Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten pada penyusunan ini untuk menjamin tidak adanya pembiayaan ganda dengan BOS serta kesesuaian dengan visi pendidikan kabupaten. Penetapan program tersebut berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten. Misalnya, di sebuah sekolah tingkat keterampilan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran masih kurang, mereka bisa memprogramkan workshop penggunaan media IT secara intens.

Pada SD X misalnya, berdasarkan perhitungan alternatif 1, alokasi dana yang diterima sekolah adalah 134 siswa ring 1 dikalikan dengan Rp.596.240,- adalah Rp. 79.896.160. SD X berada di ring 1 sehingga seluruh siswanya berasal dari wilayah ring 1. Rencana program CSR yang dilaksanakan sekolah tersebut sebagai berikut

TABEL 4. 15
PROGRAM PENGEMBANGAN

NAMA SEKOLAH : SDN X KABUPATEN Y
 ALOKASI TOTAL : 134 R1 x Rp.596.240- yaitu Rp. 79.896.160
 TAHUN : 2010

NO	KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	ANGGARAN
1	Workshop Metode Pembelajaran dan pendampingan	Guru dapat menggunakan media pembelajaran/multimedia	Guru terampil menggunakan media pembelajaran	25.000.000,-
3	Pengadaan media pembelajaran	Tersedianya media pembelajaran	Tersedianya media pembelajaran MIPA Tersedianya perangkat multimedia	25.000.000,-
4	Kegiatan Ekstra Kurikuler	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah	Kegiatan Ekskul 1. Pramuka 2. Dokter Cilik/UKS 3. Vokal Group	12.000.000,-
4	Beasiswa Khusus Adaro Untuk Sekolah	Diberikannya beasiswa untuk siswa ring 1 dan 2 yang tidak mampu dan berprestasi	Beasiswa diberikan untuk 1. 6 org siswa tidak mampu 2. 4 orang siswa berprestasi	10 x Rp. 600.000,- = 6.000.000,- 10 x 500.000 = 5.000.000,-
			Total	11.000.000
	Tabungan Abadi Sekolah			11.896.160
			Grand Total	79.896.160

Program ini mewajibkan tabungan dana abadi sekolah. Penempatan dana di bank tersebut, untuk menjaga keberlanjutan program (*suistanability*) apabila pada saatnya nanti perusahaan tidak beroperasi di dua kabupaten tersebut. Pihak yayasan berperan sebagai fasilitator pengelolaan dana tersebut. Pemilihan bank

dapat dapat didasari dengan kesediaan bank tersebut untuk memberikan kompensasi terhadap program. Misalnya, Bank A bersedia menjadi sponsor pelaksanaan pentas kesenian sekolah-sekolah. Untuk menghindari inflasi, dana tersebut bisa juga diinvestasikan dalam bentuk emas dengan bank yang menyediakan layanan tersebut.

Pada sekolah tertentu, ada kemungkinan hanya sedikit siswa dari wilayah terdampak. Dengan demikian, dana yang diterima sekolah juga sedikit. Perencanaan program pada sekolah tersebut akan lebih mudah. Selain itu, apabila pada suatu saat SMA/MA memungut SPP dari siswa karena pihak pemerintah tidak lagi memberikan BOS Kabupaten, sebagian dari nilai unit cost tersebut dapat menjadi SPP. Akan tetapi, siswa tetap dipungut SPP tetapi lebih ringan 25%-75% daripada siswa yang tidak dari wilayah terdampak. Hal itu untuk mendorong partisipasi orang tua untuk pendidikan anaknya.

Penyusunan rencana tersebut juga menjadi fase yang cukup sulit bagi kalangan sekolah. Oleh karena itulah, yayasan dan pihak Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten menjadi pihak yang sangat berperan dalam hal ini. Setiap awal tahun pelajaran, mereka harus menetapkan konsultan/pengawas pendamping sesuai kebutuhan yang dapat dipilih dari para pengawas sekolah atau ahli dari perguruan tinggi. Sebagai parameter untuk kegiatan, proses penyusunan tersebut dapat melalui prosedur kerja berikut

- 1) Setelah menerima penetapan alokasi, pihak sekolah mengirim surat kepada yayasan dan Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten untuk memohon penetapan konsultan/pengawas.

- 2) Pihak yayasan dan Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten menetapkan konsultan/pengawas pendamping masing-masing satu orang dan mengirim surat kepada surat penunjukkan tersebut kepada sekolah. Indikator kinerja pada penetapan ini 2 hari kerja.
- 3) Pihak sekolah mengadakan rapat penyusunan dengan didampingi konsultan/pengawas sebanyak 3 kali dalam periode 2 minggu.
- 4) Setelah mendapat *approve* dari dua konsultan/pengawas tersebut, pihak sekolah mengirim rencana kegiatan ke CSR perusahaan dengan disertai buku rekening sekolah. Proses pencairan dana dari CSR perusahaan ke rekening sekolah maksimal 3 hari.

Ketepatan dan efektifitas program tersebut sangat ditentukan oleh peran konsultan/pengawas pendamping dan juga pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah/madrasah. Pendampingan yang intens sangat diperlukan sehingga tidak ada ditemukan keterlambatan atau kegiatan yang tidak efektif. Oleh karena itulah, pemilihan konsultan/pengawas menjadi sesuatu yang perlu dicermati oleh pihak yayasan dan Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten.

Seperti disebutkan pada bagian terdahulu, posisi dana CSR dalam pembiayaan pendidikan di sekolah sekolah/madrasah adalah komplementer bagi dana dari pemerintah. Oleh karena itulah, CSR dapat digunakan untuk hampir semua kebutuhan sekolah/madrasah yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4.16
 POSISI DANA CSR PENDIDIKAN DALAM PEMBIAYAN PENDIDIKAN
 SEKOLAH/MADRASAH

	INVESTASI LAHAN	INVESTASI NON LAHAN	NON PERSONALIA	PERSONALIA
APBN BOS			X	
APBD	X	X		X
CSR		X	X	

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa CSR diutamakan untuk investasi non lahan yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan dan penyediaan sarana prasarana. Dana CSR juga untuk biaya non personalia, terutama biaya untuk kegiatan peningkatan kemampuan non akademik siswa (kegiatan ekstrakurikuler). Pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten/Kemenag kabupaten melalui konsultan/pengawas harus mencermati dan mengawasi dengan maksimal agar satu program/kegiatan tidak dibiayai oleh dua sumber dana. Oleh karena itulah, program/kegiatan yang diusulkan oleh pihak sekolah/madrasah harus melihat kecukupan alokasi CSR pada sekolah/madrasah tersebut.

d. Implementasi dan Penggunaan Dana Program

Penggunaan dana program ini dirancang untuk memperkecil peluang penyimpangan oleh pihak madrasah dan sekolah. Penggunaan dana sepenuhnya dilakukan sekolah/madrasah tetapi dengan pendampingan dari yayasan, terutama terkait dengan hal kegiatan non fisik. Yayasan bertindak sebagai konsultan/pengawas pendamping dengan anggaran dana yang telah disediakan oleh sekolah/madrasah. Setiap kegiatan workshop/pelatihan untuk guru dalam

program ini dilaksanakan di sekolah/madrasah dan tidak terbatas pada beberapa hari, tetapi selalu ditindaklanjuti selama satu tahun penuh oleh yayasan. Dengan kata lain, pelatihan tidak berakhir setelah berakhirnya pelatihan tetapi terus berlanjut. Guru tetap berhak meminta petunjuk terkait workshop tersebut.

Salah satu problem dari workshop/pelatihan ini adalah guru tidak mempraktikkan hasil pelatihan dalam pembelajaran di kelas. Hal itu sebenarnya tidak akan terjadi lagi karena perencanaan telah melibatkan sekolah/madrasah dan hasil inisiasi para guru. Selain itu, implementasi hasil workshop juga harus dibarengi penghargaan pada guru yang menggunakan hasil workshop pada pembelajaran. Alokasi yang besar untuk workshop lebih diarahkan pula untuk *reward* bagi guru selalu aktif mempraktikkan hasil workshop pada pembelajaran.

Penggunaan untuk pembelian barang disyaratkan dengan perbandingan harga dari beberapa toko yang menjual barang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip tarif harga. Meskipun itu agak menyulitkan tetapi penting untuk meminimalisasi *mark up* harga. Surat penawaran atau keterangan harga tersebut akan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban sekolah/madrasah. Biaya yang dikeluarkan juga merujuk pada standar biaya yang ditetapkan oleh perusahaan atau merujuk standar biaya umum Kementerian Keuangan.

Pada fase ini, pengawasan juga menjadi satu hal yang sangat penting. Pengawasan yang dilakukan yayasan dan Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten menjadi kontrol dalam penggunaan dana yang telah disepakati bersama. Selain itu, pihak CSR perusahaan perlu pula melakukan pengawasan pada waktu-waktu tertentu untuk memastikan penggunaan dana telah tepat sasaran.

e. Pengawasan Program

Pengawasan yang dilakukan terus menerus dapat menjamin penggunaan anggaran efektif dan efisien. Pengawasan dalam penggunaan tidak berorientasi pada mencari kesalahan tetapi untuk mengontrol apakah target akan tercapai pada waktu yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan, jika ada indikasi kegagalan pencapaian akan dapat dicarikan solusi yang tepat. Pengawasan dapat menunjukkan salah kelola sedini mungkin dan memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan aturan yang ditetapkan. Pengawasan juga dapat mengoreksi program yang tidak efektif dan efisien.

Selain oleh perusahaan, pengawasan dalam program ini dilakukan oleh konsultan/pengawas yang ditunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kemenag kabupaten, dan yayasan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga berperan sebagai konsultan pendamping yang mampu mendorong kreatifitas dan inovasi sekolah/madrasah. Konsultan pendamping dapat memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi sekolah/madrasah. Di samping pihak yang ditunjuk sebagai pengawas tersebut, *public control* juga menjadi bagian penting dalam program CSR pendidikan ini. Pengawasan oleh publik tumbuh dari pemahaman bahwa program CSR pada hakikatnya merupakan hak masyarakat yang terkena dampak operasional tambang. Oleh karena itu, pengawasan publik merupakan upaya menjamin hak tersebut sampai kepada masyarakat secara maksimal. Hal itu dapat didorong dengan transparansi dalam seluruh program CSR melalui publikasi kepada publik.

f. Pertanggungjawaban Sekolah/madrasah

Pertanggungjawaban merupakan aspek penting dari akuntabilitas program. Pertanggungjawaban dalam model ini dibuat sekolah/madrasah dengan menyertakan bukti-bukti fisik berupa kuitansi serta foto kegiatan. Pertanggungjawaban dibuat serinci dan sejelas mungkin. Pertanggungjawaban tersebut diserahkan setiap akhir tahun pelajaran ke CSR perusahaan.

Pertanggungjawaban tersebut pada saat tertentu dilakukan audit oleh auditor independen yang ditunjuk perusahaan. Mereka dapat mengkonfirmasi ke sekolah dan melihat kenyataan di lapangan. Audit ini dapat mendorong pihak sekolah/madrasah untuk selalu bertanggung jawab atas penggunaan dana program. Audit yang mengkonfirmasi dan memeriksa sampai ke sekolah/madrasah inilah yang belum dijalankan sepenuhnya pada program CSR yang berjalan sekarang.

Selain itu, transparansi penggunaan juga menjadi hal yang penting dalam pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban juga diberikan kepada seluruh guru dan siswa sebagai bentuk transparansi. Pertanggungjawaban tersebut cukup ditempel di papan pengumuman sekolah sehingga bisa dicermati oleh guru dan orang tua. Transparansi ini juga belum terlihat optimal dilaksanakan dalam program CSR yang berjalan sekarang. Sekolah/madrasah penerima bantuan dana tidak menempel pertanggungjawaban penggunaan di papan pengumuman mereka. Transparansi sangat penting karena merupakan satu indikator dari bersihnya sebuah lembaga dari praktik korupsi.

g. Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil Program

Evaluasi dalam model ini adalah sebuah proses penilaian dan analisis yang sistematis terhadap program CSR pendidikan untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan, pelaksanaan kebijakan, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan program tersebut. Penilaian terhadap program CSR yang dilaksanakan sekolah/madrasah menjadi dasar untuk memutuskan apakah program tersebut berhasil mencapai tujuan, perlu dikoreksi, atau dihentikan. Hasil penilaian dapat dijadikan sebagai bahan review bagi pihak perusahaan dan sekolah/madrasah untuk menetapkan atau perbaikan program di tahun berikutnya. Dengan evaluasi ini, program CSR di sekolah/madrasah dapat terus menerus dikembangkan untuk lebih efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Evaluasi terhadap program pendidikan dapat memberikan manfaat kepada para guru untuk memahami sebuah proses dinamis dari program pendidikan. Evaluasi juga meningkatkan akuntabilitas sekolah/madrasah menjadi lebih baik. (Gramatikoupoulos etall, 2004) Pentingnya evaluasi tergambar dari pernyataan Warna (1995), *organizations that are not self-evaluating are not growing, not making improvements and, therefore, are dying* (organisasi yang tidak melaksanakan evaluasi tidak tumbuh dan tidak berkembang, kemudian mati).

Evaluasi melalui observasi dilakukan oleh kepala sekolah dan para konsultan /pengawas pendamping secara terus menerus. Selain itu, proses evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh pihak pengawas sekolah/madrasah. Oleh karena itu, koordinasi antara pihak perusahaan dengan pemerintah sangat

diperlukan. Evaluasi ini dapat dijadikan sarana melihat keefektifan program CSR dan juga kegiatan sekolah/madrasah yang lain, disamping untuk menghindari terjadi kegiatan/program yang dialokasikan oleh dua sumber dana berbeda (*double funding*). Hasil evaluasi dengan observasi ini dimuat dalam format isian yang berisi nama program, indikator penilaian, bobot nilai serta total nilai. Tingginya bobot nilai mencerminkan tingginya kualitas program tersebut.

Format isian evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4. 17
FORM LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM CSR PENDIDIKAN

Nama Sekolah/Madrasah :

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT NILAI			TOTAL
			1	2	3	
1	Program <i>Green School</i>	1. Kebersihan Ruang Kelas				
		2. Kebersihan WC				
		3. Kebersihan halaman				
		4. Pemeliharaan tanaman penghijauan di sekitar sekolah				
		5. Pemeliharaan tanaman hias				
		Total				

Sumber dana : Program CSR Pendidikan

Apakah juga dibiayai dari sumber lain

€ YA

€ TIDAK

Pada tabel tersebut dapat dilihat contoh penilaian atas program *green school* berdasarkan beberapa indikator yang dapat dilihat secara langsung. Bobot nilai setiap indikator kemudian dijumlahkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan program tersebut. Total nilai yang rendah dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut dan kebijakan perusahaan terkait CSR pendidikan.

Seluruh proses dan prosedur pengelolaan dana CSR pendidikan yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat pada gambar berikut

GAMBAR 4.13

PROSES DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA CSR PENDIDIKAN

